



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH EFEKTIVITAS DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT,
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL, DAN
PELUANG PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP
PROBABILITA KELAYAKAN KREDIT**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi**

**MONITA FRANSISKA
0806392016**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Monita Fransiska

NPM : 0806392016

Tanda Tangan : 

Tanggal : 12 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

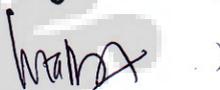
Nama : Monita Fransiska
NPM : 0806392016
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Arus Kas dari Aktivitas Operasional, dan Peluang Pertumbuhan terhadap Probabilita Kelayakan Kredit

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Ancella A. Hermawan ()

Ketua : Dr. Sylvia Veronica NPS. ()

Anggota : Eliza Fatima, S.E., M.E. ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 12 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat yang melimpah sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan bisa memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa dengan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ancella A. Hermawan selaku dosen pembimbing saya. Terima kasih banyak selalu menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Dr. Sylvia Veronica NPS. dan Ibu Eliza Fatima SE., ME. selaku dosen penguji sidang akhir sarjana ekonomi. Terima kasih banyak karena telah meluluskan saya dan memberikan banyak masukan agar hasil skripsi saya menjadi lebih baik dari sebelumnya.
3. Mama dan papaku. Makasih ma, pa atas doanya setiap hari. Maaf juga kalau aku suka sensi di rumah. Hehehe.. makasih buat semuanya. Tanpa kalian skripsiku gak akan selesai. Makasih juga yaa ma, pa, kadang2 aku dianterin nyari data, print, jemput aku. Hikss.. i love you mom, dad.
4. Buat robby, ade gw yang kadang2 anterin gw, bantuin gw. Makasih by..
5. Daviiid pacalkuu, yang selalu setia temenin aku skripsian, anterin aku setiap hari dari rumah-salemba-depok-gading-rumah. Selalu ikut begadang kalau aku begadang. :) Makasih juga yaa sayang selalu kasih semangat kalau aku lagi down trus pijitin kepala aku kalau aku pusing. Maafin yaa nciit kalau aku kadang suka marah2. Hehehe.. makasih onyoong buat bantuannya setiap hari. I love youu.
6. Buat mama keduaku dan persekutuan doa Elshaddai yang selalu doain aku. Makasih yaa ma buat doa2nya. Semua dijawab Tuhan. I love youu..

7. Buat sahabat terdekat, tika, nay, christy, esther, sam, arnold. Kapan kita karaokean lagi? Kapan nonton dvd lagi and berguru sama tikaa? Hahahaha.. Makasih teman2..
8. Buat teman satu bimbingan, arnold, sri, becca, dan lucky. Wahh akhirnya kita lulus. Finally.. Makasih teman2 buat support dan bantuannya..
9. Buat temen kosan, lala, poppy, dll. Makasih buat semangatnyaa. Wahh udah gak bisa ngegosip dan makan brg lagi malam2. Hikss.. Juga buat mbak zul, penjaga kosan yang super duper baik dan gak bawel. Makasih mbak udah jagain akuu.
10. Buat temen2 kampus lainnya yang sll nyemangatin, bantuin, sharing brg. Makasih teman2. I love youu..
11. Buat si B 3353 TJM yang selalu siap dengan rutenya cawang-bekasi-depok-salemba-gading-bekasi-cawang. Woowww.. speedometernya langsung melonjak tinggi.
12. Buat laptop kecil yang jadi pacar baru gw selama 1 semester. Wakakakakak... nemenin gw begadang sampe jam setengah 5 pagi.

Terima kasih atas bantuan dari semua pihak. Akhir kata, saya berharap Tuhan akan membalas segala kebaikan dan bantuan dari kalian semua. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 12 Januari 2012

Monita Fransiska

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Monita Fransiska

NPM : 0806392016

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Arus Kas dari Aktivitas Operasional, dan Peluang Pertumbuhan terhadap Probabilita Kelayakan Kredit

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 12 Januari 2012
Yang menyatakan



(Monita Fransiska)

ABSTRAK

Nama : Monita Fransiska
Program Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Arus Kas dari Aktivitas Operasional, dan Peluang Pertumbuhan terhadap Probabilita Kelayakan Kredit

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas dewan komisaris dan komite audit, arus kas dari aktivitas operasional, dan peluang pertumbuhan terhadap probabilita kelayakan kredit. Efektivitas dewan komisaris dan komite audit diukur berdasarkan skor yang dikembangkan oleh Hermawan (2009). Menurut Hermawan (2009), efektivitas dewan komisaris diukur melalui independensi, aktivitas, jumlah anggota dan kompetensi. Sementara itu efektivitas komite audit diukur melalui aktivitas, jumlah anggota dan kompetensi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik dengan sampel 215 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010. Penetapan kelayakan kredit menggunakan penilaian yang dilakukan oleh Majalah Infobank edisi April 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari efektivitas dewan komisaris dan komite audit, arus kas dari aktivitas operasional, dan peluang pertumbuhan terhadap probabilita kelayakan kredit bank.

Kata kunci: *corporate governance*, efektivitas dewan komisaris, efektivitas komite audit, arus kas dari aktivitas operasional, peluang pertumbuhan, kelayakan kredit

ABSTRACT

Name : Monita Fransiska

Study Program : Accounting

Title: The Effect of Board of Commissioner and Audit Committee Effectiveness, Cash Flow from Operating Activity and Growth Opportunities on the Probability of Creditworthiness

This research aims to know the effect of board of commissioners and audit committee effectiveness, cash flow from operating activities and growth opportunities on the probability of creditworthiness. Board of commissioners and audit committee effectiveness are assessed by using a score that is developed by Hermawan (2009). According to Hermawan (2009), the effectiveness of board of commissioners is assessed based on independency, activity, size, and competence. Meanwhile, the effectiveness of audit committee is assessed based on activity, size, and competence. Hypothesis testing used logistic regression with sampel of 215 companies that are listed at Indonesia Stock Exchange in 2010. The company's creditworthiness is based on the assessment by Infobank Magazine. The results of this study shows that there are positive and significant effect of board of commissioners and audit committee effectiveness, cash flow from operating activity, and growth opportunities on the probability of credit worthiness.

Keywords: corporate governance, board of commissioner effectiveness, audit committee effectiveness, cash flow from operating activity, growth opportunities, creditworthiness

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penelitian.....	8
2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 <i>Agency Problem</i>	11
2.2 <i>Corporate Governance</i>	13
2.2.1 Tujuan dan Manfaat <i>Corporate Governance</i>	15
2.2.2 Prinsip-prinsip <i>Corporate Governance</i>	16
2.2.3 Penerapan <i>Corporate Governance</i> di Indonesia.....	18
2.3 Dewan Komisaris.....	18
2.3.1 Tujuan dan Manfaat Dewan Komisaris.....	19
2.3.2 Fungsi Dewan Komisaris.....	20
2.3.3 Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris.....	20
2.3.4 Efektivitas Dewan Komisaris.....	21
2.3.4.1 Independensi Dewan Komisaris.....	21
2.3.4.2 Aktivitas Dewan Komisaris.....	22
2.3.4.3 Jumlah Anggota Dewan Komisaris.....	23
2.3.4.4 Kompetensi Dewan Komisaris.....	24
2.4 Komite Audit.....	24
2.4.1 Peran, Fungsi dan Kewenangan Komite Audit.....	25
2.4.2 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit.....	26
2.4.3 Efektivitas Komite Audit.....	27

2.4.3.1	Aktivitas Komite Audit.....	28
2.4.3.2	Jumlah Anggota Komite Audit.....	29
2.4.3.3	Kompetensi Komite Audit.....	30
2.5	<i>Corporate Governance</i> dan Laporan Keuangan.....	31
2.6	Arus Kas dari Aktivitas Operasional.....	32
2.7	Peluang Pertumbuhan.....	34
2.8	Bank.....	35
2.8.1	Kredit Bank.....	36
2.8.2	Syarat Mendapatkan Kredit Bank.....	38
2.9	Kerangka Pemikiran.....	40
2.10	Pengembangan Hipotesis.....	43
3.	METODE PENELITIAN	49
3.1	Model Penelitian.....	49
3.2	Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	50
3.2.1	Variabel Dependen.....	50
3.2.1.1	Probabilita Kelayakan Mendapatkan Kredit Bank.....	50
3.2.2	Variabel Independen.....	51
3.2.2.1	Variabel Utama.....	51
3.2.2.1.1	Nilai Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit.....	51
3.2.2.1.2	Arus Kas dari Aktivitas Operasiona.....	52
3.2.2.1.3	Peluang Pertumbuhan.....	52
3.2.2.2	Variabel Kontrol.....	53
3.2.2.2.1	Ukuran Perusahaan.....	53
3.2.2.2.2	Umur Perusahaan.....	53
3.3	Populasi dan Sampel.....	54
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	54
3.5	Metode Analisis Data.....	55
3.5.1	Uji Validitas Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit....	55
3.5.2	Analisis Deskriptif.....	55
3.5.3	Analisis Korelasi.....	56
3.5.4	Analisis Regresi Logistik.....	56
3.5.4.1	Pengujian <i>Goodness of Fit (Hosmer and Lemeshow Test)</i>	58
3.5.4.2	Pengujian Kelayakan Keseluruhan Model (<i>Overall Fit Model Test</i>)	59
3.5.4.3	Pengujian Simultan (<i>Omnibus Test of Model Coefficient</i>).....	59
3.5.4.4	Koefisien Determinasi (<i>Model Summary</i>).....	59
3.5.4.5	Pengujian Hipotesis.....	60
3.5.4.6	Pengujian Akurasi Model.....	60
4.	ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	61
4.1	Deskripsi Sampel Penelitian.....	61
4.2	Uji Validitas Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit.....	64
4.3	Analisis Variabel Model Penelitian.....	64
4.4	Analisis Korelasi Pearson.....	86

4.5 Analisis Regresi Logistik.....	88
4.5.1 Pengujian <i>Goodness of Fit (Hosmer and Lemeshow Test)</i>	88
4.5.2 Pengujian Kelayakan Keseluruhan Model (<i>Overall Fit Model Test</i>)	89
4.5.3 Pengujian Simultan (<i>Omnibus Test of Model Coefficient</i>).....	90
4.5.4 Koefisien Determinasi (<i>Model Summary</i>).....	91
4.5.5 Pengujian Hipotesis.....	92
4.5.5.1 Pengaruh Nilai Dewan Komisaris terhadap Probabilita Kelayakan Pemberian Kredit Bank.....	94
4.5.5.2 Pengaruh Nilai Komite Audit terhadap Probabilita Kelayakan Pemberian Kredit Bank.....	96
4.5.5.3 Pengaruh Arus Kas dari Aktivitas Operasional terhadap Probabilita Kelayakan Pemberian Kredit Bank.....	97
4.5.5.4 Pengaruh Peluang Pertumbuhan terhadap Probabilita Kelayakan Pemberian Kredit Bank.....	98
4.5.5.5 Pengaruh Ukuran dan Umur Perusahaan terhadap Probabilita Kelayakan Pemberian Kredit Bank.....	98
4.5.6 Pengujian Akurasi Model.....	100
5. KESIMPULAN DAN SARAN	103
5.1 Kesimpulan.....	103
5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya	105
5.3 Saran.....	107
5.3.1 Bagi Perusahaan.....	107
5.3.2 Bagi Perbankan.....	108
5.3.3 Bagi Bapepam-LK.....	108
5.3.4 Bagi Bank Indonesia.....	109
DAFTAR REFERENSI	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sistem Informasi Prosedur Memperoleh Kredit Menurut Bank Indonesia.....	39
Gambar 2.2	Rerangka Konseptual.....	43



DAFTAR TABEL

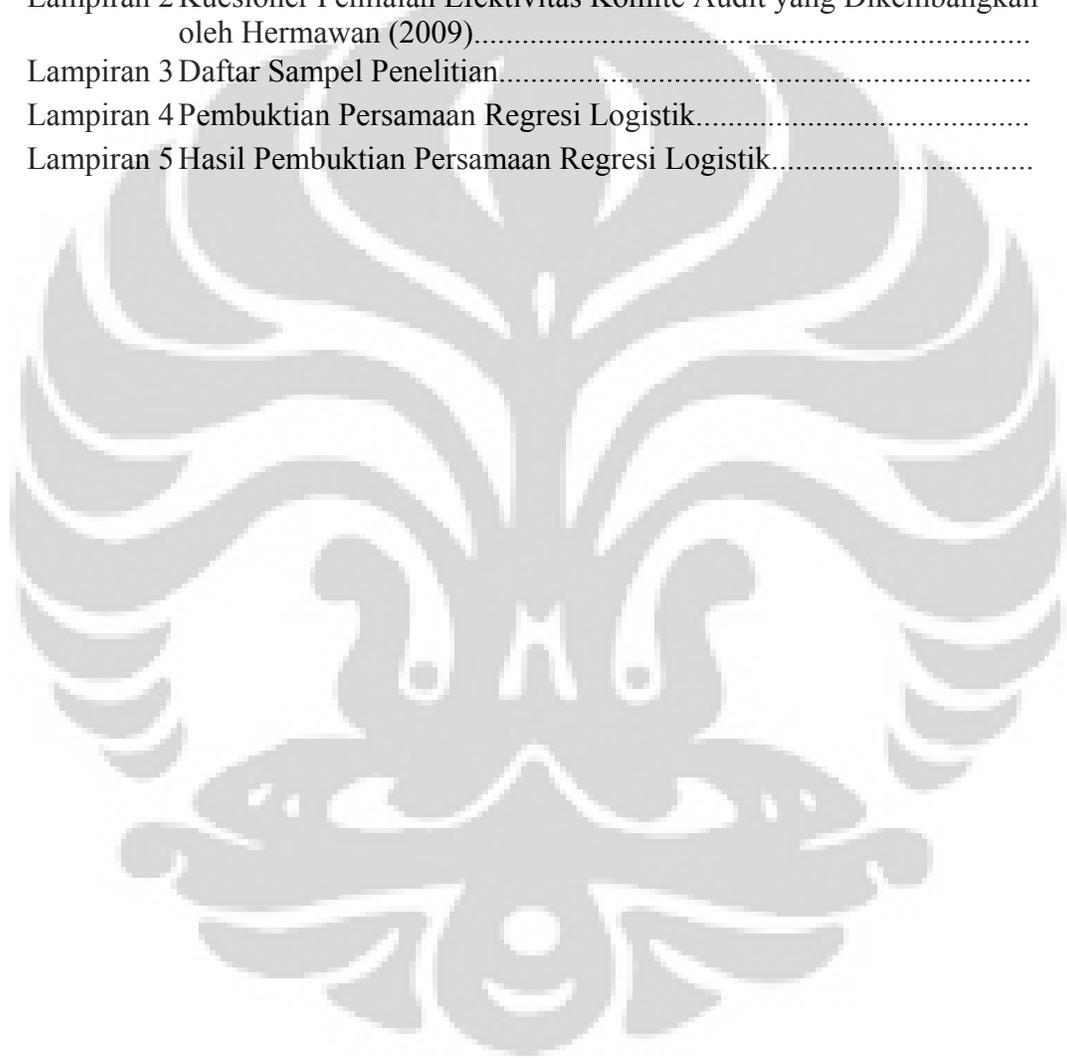
Tabel 3.1	Kriteria Probabilita Kelayakan Mendapatkan Kredit Bank.....	50
Tabel 4.1	Deskripsi Sampel Penelitian.....	62
Tabel 4.2	Distribusi Sampel Perusahaan Berdasarkan Sektor Industr.....	62
Tabel 4.3	Distribusi Sampel Berdasarkan Probabilita Pemberian Kredit Bank.....	63
Tabel 4.4	<i>Reliability Statistics</i>	64
Tabel 4.5	Statistik Deskriptif.....	65
Tabel 4.6	Statistik Deskriptif Skor Dewan Komisaris.....	67
Tabel 4.7	Statistik Deskriptif Pertanyaan Kategori Independensi Dewan Komisaris.....	69
Tabel 4.8	Distribusi Sampel Berdasarkan Nilai Kategori Independensi Dewan Komisaris.....	70
Tabel 4.9	Statistik Deskriptif Pertanyaan Kategori Aktivitas Dewan Komisaris.....	72
Tabel 4.10	Distribusi Sampel Berdasarkan Nilai Kategori Aktivitas Dewan Komisaris.....	73
Tabel 4.11	Statistik Deskriptif Pertanyaan Kategori Jumlah Anggota Dewan Komisaris.....	75
Tabel 4.12	Distribusi Sampel Berdasarkan Nilai Kategori Jumlah Anggota Dewan Komisaris.....	75
Tabel 4.13	Statistik Deskriptif Pertanyaan Kategori Kompetensi Dewan Komisaris.....	76
Tabel 4.14	Distribusi Sampel Berdasarkan Nilai Kategori Komptensi Dewan Komisaris.....	77
Tabel 4.15	Statistik Deskriptif Skor Komite Audit.....	79
Tabel 4.16	Statistik Deskriptif Pertanyaan Kategori Aktivitas Komite Audit	81
Tabel 4.17	Distribusi Sampel Berdasarkan Nilai Kategori Aktivitas Komite Audit.....	82
Tabel 4.18	Statistik Deskriptif Pertanyaan Kategori Jumlah Anggota Komite Audit.....	84
Tabel 4.19	Distribusi Sampel Berdasarkan Nilai Kategori Jumlah Anggota Komite Audit.....	84
Tabel 4.20	Statistik Deskriptif Pertanyaan Kategori Kompetensi Komite Audit.....	85
Tabel 4.21	Distribusi Sampel Berdasarkan Nilai Kompetensi Komite Audit	86
Tabel 4.22	<i>Pearson Correlation Matrix</i>	87
Tabel 4.23	<i>Hosmer and Lemeshow Test</i>	89
Tabel 4.24	<i>Likelihood Overall Fit Block Number 0</i>	89

Tabel 4.25	<i>Likelihood Overall Fit Block Number 1</i>	90
Tabel 4.26	<i>Omnibus Test of Model Coefficient</i>	90
Tabel 4.27	<i>Model Summary</i>	91
Tabel 4.28	Hasil Pengujian Hipotesis.....	92
Tabel 4.29	<i>Classification Table</i>	100
Tabel 4.30	<i>Percentage of Accuracy</i>	101



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penilaian Efektivitas Dewan Komisaris yang Dikembangkan oleh Hermawan (2009).....	116
Lampiran 2 Kuesioner Penilaian Efektivitas Komite Audit yang Dikembangkan oleh Hermawan (2009).....	128
Lampiran 3 Daftar Sampel Penelitian.....	133
Lampiran 4 Pembuktian Persamaan Regresi Logistik.....	140
Lampiran 5 Hasil Pembuktian Persamaan Regresi Logistik.....	149



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, perusahaan membutuhkan modal atau pendanaan dengan jumlah yang besar. Sumber pendanaan yang bisa diperoleh perusahaan adalah pendanaan internal (*internal financing*) dan pendanaan eksternal (*external financing*). Pendanaan internal adalah sumber pendanaan yang berasal dari dana pribadi pemilik perusahaan yang digunakan untuk membangun dan menjalankan perusahaan tersebut. Pendanaan eksternal adalah pendanaan yang berasal di luar dana pribadi pemilik, seperti saham, obligasi, atau kredit bank. Salah satu sumber pendanaan eksternal yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah kredit atau pinjaman kepada perbankan.

Perusahaan yang ingin mendapatkan pendanaan dari kredit bank harus dapat memenuhi syarat kelayakan dari bank tersebut karena pemberian kredit yang dilakukan perbankan dapat memunculkan risiko yang cukup tinggi bagi perbankan tersebut, seperti kredit yang macet, perusahaan tidak mampu membayar pokok pinjaman ataupun bunganya, atau likuidasi. Oleh sebab itu, perbankan akan melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut. Perbankan akan memberikan kredit kepada perusahaan yang memiliki laporan yang baik. Untuk mendapatkan laporan keuangan yang baik, akurat, dan dapat diandalkan, perusahaan harus menerapkan *good corporate governance*. Kualitas *corporate governance* sebaiknya juga menjadi fokus bank dalam pengambilan keputusan pemberian kredit (Firth *et al.*, 2009). Hal ini disebabkan karena *corporate governance* dapat meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan (Shleifer dan Vishny, 1997). Menurut Ball *et al.* (2008) bahwa laporan keuangan yang dikelola dengan baik karena adanya penerapan *good corporate governance* akan mengurangi adanya asimetri informasi diantara kreditur dan laporan keuangan tersebut dapat menyediakan *signal* yang lebih informatif tentang kualitas kredit di masa depan.

Selain itu, *corporate governance* dapat membantu mengoptimalkan risiko kredit dengan memitigasi *agency problem* antara pemegang saham dan manajer. Menurut Jensen dan Meckling (1976), *agency problem* muncul ketika manajemen (*agent*) tidak bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, *bondholders*, atau kreditur (*principal*). Dengan adanya penerapan *good corporate governance*, memberikan keyakinan bagi perbankan, sebagai kreditur, bahwa kredit yang diberikan tersebut dapat digunakan secara efisien oleh perusahaan dan dapat mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya. Beberapa studi seperti Piot dan Missonier-Piera (2007), Blom dan Schauten (2006), Uzun *et al.* (2004), Anderson *et al.* (2004), dan Bhojraj dan Sengupta (2003) telah menemukan bukti empiris bahwa terdapat hubungan negatif antara *corporate governance* dengan biaya hutang.

Struktur *corporate governance* yang membantu menghasilkan laporan keuangan yang baik, akurat, berkualitas, dan dapat diandalkan, serta mengurangi *agency problem* adalah dewan komisaris dan komite audit. Dewan komisaris yang efektif dapat melakukan fungsi *monitoring* terhadap kinerja manajemen dan mendorong manajemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *stakeholders*, baik kreditur ataupun pemegang saham sehingga manajemen dapat menghasilkan kinerja yang baik. Menurut Monks dan Minow (1995), *monitoring* dari *board* dapat meningkatkan kualitas manajemen dalam membuat keputusan dan meningkatkan kinerja manajemen. Sementara itu, komite audit di dalam perusahaan juga berperan dalam mewujudkan *good corporate governance*. Menurut Pincus *et al.* (1989), komite audit merupakan mekanisme *monitoring* yang berbiaya mahal dan perusahaan dengan *agency cost* yang tinggi akan bersedia menerima biaya yang mahal tersebut. Peran komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam mengawasi kinerja manajemen melalui penilaian atas informasi keuangan perusahaan. Dewan komisaris dan komite audit diharapkan berperan penting pada akuntabilitas laporan keuangan yang disajikan (Hermawan, 2009).

Dewan komisaris dan komite audit harus benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif agar fungsi pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan oleh manajemen dapat dilakukan dengan sebaiknya dan semestinya. Menurut Hermawan (2009), efektivitas dewan komisaris dipengaruhi oleh empat karakteristik dari dewan komisaris, yaitu independensi, aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi. Sementara efektivitas komite audit dipengaruhi oleh tiga kategori yang mencerminkan karakteristik komite audit, yaitu aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi. Efektivitas dewan komisaris dan komite audit akan diukur melalui skor yang diperoleh berdasarkan daftar pertanyaan (*checklist*) yang berasal dari penelitian Hermawan (2009). Dewan komisaris yang independen dapat melakukan tugas *monitoring* dengan baik dan berada pada posisi yang tidak memihak siapapun sehingga laporan keuangan perusahaan terkelola dengan baik dan memberikan laporan yang lebih *credible*. *Board of directors* yang independen berpengaruh negatif terhadap biaya hutang (Anderson *et al.*, 2004). Menurut Chen dan Jian (2006), Bhajraj dan Sengupta (2003) menyatakan bahwa *board of directors* yang independen dapat mengurangi *agency problem* dengan kreditur. Mereka menyatakan bahwa perusahaan dapat menerima tingkat bunga yang rendah ketika *board of directors* independen dalam perusahaan semakin banyak.

Dewan komisaris melakukan berbagai aktivitas, seperti menghadiri *meeting*, *review* laporan keuangan, menilai kinerja tahunan dan prospek bisnis yang disiapkan oleh dewan direksi dan aktivitas yang dilakukan oleh komite audit yang berkaitan dengan tugasnya, seperti mengevaluasi pengendalian internal, mengawasi laporan keuangan, menghadiri rapat, dan mengevaluasi auditor eksternal. Dengan adanya aktivitas yang jelas dan berkaitan dengan fungsinya sebagai *monitoring* kinerja manajemen, maka fungsi pengawasan akan berjalan dengan baik. Menurut Xie *et al.* (2003), *board of directors* dan komite audit yang semakin efektif akan meningkatkan kualitas laba. Selain itu, semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris, diharapkan fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan akan semakin efektif. Dengan perusahaan yang memiliki komite audit dalam jumlah banyak, perlindungan

dan pengendalian atas pelaporan keuangan akan semakin meningkat. Hal ini akan memberikan dampak transparansi yang tinggi dan biaya hutang yang rendah. Jumlah anggota *board* mempengaruhi tugas komite audit dan *monitoring* (Klein, 1998 dan 2002a). Menurut Adams dan Mehran (2002), ukuran *board* yang semakin besar dan menyediakan anggota *board of directors* yang memiliki pendidikan baik lebih banyak akan meningkatkan efektivitas dalam *monitoring*. Menurut Anderson *et al.* (2004), perusahaan dengan jumlah komite audit yang besar melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dengan lebih baik.

Dewan komisaris dan komite audit yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai bisnis perusahaan, akuntansi, maupun keuangan, akan sangat membantu dalam proses pengawasan kinerja keuangan perusahaan. Bank akan lebih percaya pada perusahaan yang memiliki dewan komisaris yang telah berpengalaman di posisi top suatu perusahaan atau di bisnis yang serupa dengan perusahaannya sekarang (Firth *et al.*, 2009). Dengan adanya *financial expertise* pada anggota *board of directors* dan komite audit dapat mengurangi *discretionary accruals* (Xie *et al.*, 2003). Menurut Agrawal dan Chadcha (2005), frekuensi *earnings restatement* lebih rendah pada perusahaan yang memiliki *financial expertise* pada anggota *board of directors* dan komite auditnya. Dengan kinerja yang baik, perbankan akan lebih percaya untuk memberikan kredit kepada perusahaan tersebut.

Arus kas merupakan arus kas masuk dan keluar dari perusahaan baik dari aktivitas operasional, investasi, maupun pembiayaan perusahaan. Arus kas dari aktivitas operasional merupakan salah satu sumber selain *good corporate governance* yang dapat memberikan gambaran apakah perusahaan tersebut layak mendapatkan kredit dari perbankan atau tidak. Menurut Cheng *et al.* (1997), arus kas yang berasal dari aktivitas operasional merupakan indikator yang lebih *reliable* sebagai pengukur kinerja perusahaan dibandingkan *reported earnings*. Perhitungan arus kas dari aktivitas operasional tidak dipengaruhi oleh akun-akun akrual, yang ditangguhkan, dan dapat mengeliminasi sumber-sumber manipulasi akuntansi. Selain itu, menurut

pandangan investor, arus kas dari aktivitas operasional dapat digunakan sebagai pengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas di masa depan.

Selain itu, bank juga memperhatikan peluang pertumbuhan dari perusahaan tersebut. Nilai suatu perusahaan dapat dilihat dari peluang pertumbuhan pada perusahaan tersebut (Myers, 1977). Bank akan cenderung memberikan kredit kepada perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi. Akan tetapi, menurut Psillaki *et al.* (2010), peluang pertumbuhan justru menimbulkan risiko kredit karena perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi biasanya melakukan investasi pada proyek yang memiliki *Net Present Value* (NPV) yang tinggi. Oleh sebab itu, banyak perusahaan yang mengajukan kredit untuk mendanai proyek tersebut. Kredit yang besar akan menimbulkan risiko yang besar bagi bank, seperti perusahaan tidak mampu membayar kembali pinjaman dan bunga pinjaman tersebut.

Selain itu, penelitian ini menguji keakuratan dari model regresi yang digunakan dalam memprediksi probabilitas kelayakan kredit. Model regresi yang digunakan pada penelitian ini akan dilihat seberapa besar ketepatan model regresi ini dalam memprediksi layak atau tidaknya perusahaan mendapatkan kredit.

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dewan komisaris yang efektif dalam perusahaan mempengaruhi probabilitas kelayakan kredit?
2. Apakah komite audit yang efektif dalam perusahaan mempengaruhi probabilitas kelayakan kredit?
3. Apakah arus kas dari aktivitas operasional perusahaan mempengaruhi probabilitas kelayakan kredit?
4. Apakah peluang pertumbuhan perusahaan mempengaruhi probabilitas kelayakan kredit?

5. Bagaimanakah keakuratan model yang digunakan dalam memprediksi probabilitas kelayakan kredit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran apakah dewan komisaris yang efektif dalam perusahaan mempengaruhi probabilitas kelayakan kredit.
2. Memberikan gambaran apakah komite audit yang efektif dalam perusahaan mempengaruhi probabilitas kelayakan kredit.
3. Mengetahui apakah arus kas dari aktivitas operasional perusahaan mempengaruhi probabilitas kelayakan kredit.
4. Mengetahui apakah peluang pertumbuhan perusahaan mempengaruhi probabilitas kelayakan kredit.
5. Mengetahui keakuratan model yang digunakan dalam memprediksi probabilitas kelayakan kredit.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian mengenai efektivitas dewan komisaris dan komite audit, arus kas dari aktivitas operasional, dan peluang pertumbuhan perusahaan terhadap kelayakan pemberian kredit bank, maka terdapat manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini memberikan manfaat bagi akademisi, yaitu mengetahui bahwa efektivitas dewan komisaris dan komite audit, arus kas dari aktivitas operasional, dan peluang pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh terhadap probabilitas kelayakan pemberian kredit bank. Akademisi juga mendapatkan informasi perusahaan yang layak mendapatkan kredit dari perbankan karena memiliki dewan komisaris dan komite audit yang efektif, arus kas dari aktivitas operasional, serta peluang pertumbuhan yang baik. Selain itu, diharapkan akan

muncul gagasan baru dari para akademisi terkait penelitian ini untuk memperkaya pengetahuan.

2. Perusahaan

Penelitian ini memberikan gambaran bagi perusahaan yang ada di Indonesia bahwa dewan komisaris dan komite audit yang efektif, arus kas dari aktivitas operasional, dan peluang pertumbuhan yang baik sangat penting bagi perusahaan, terutama ketika perusahaan berusaha mendapatkan pendanaan berupa kredit dari perbankan. Selain itu, anggapan layak mendapatkan kredit tersebut akan memunculkan *image* yang baik bagi perusahaan tersebut dan mempermudah perusahaan tersebut mendapatkan pendanaan, baik dari saham, obligasi, dan terutama kredit dari perbankan.

3. Perbankan

Penelitian ini memberikan informasi kepada perbankan bahwa dewan komisaris dan komite audit yang efektif dalam perusahaan, arus kas dari aktivitas operasional, dan peluang pertumbuhan mempengaruhi kelayakan suatu perusahaan dalam mendapatkan kredit. Selain itu, penelitian ini juga memberikan manfaat bagi sektor perbankan yang ada di Indonesia bahwa ketika terdapat perusahaan yang mengajukan kredit, efektivitas dewan komisaris dan komite audit merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang dianalisis oleh bank. Selain itu, arus kas dari aktivitas operasional, dan peluang pertumbuhan juga merupakan hal yang penting dan perlu dianalisis selain kinerja perusahaan, seperti rasio keuangan.

4. Investor dan pemegang saham

Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi investor dan pemegang saham, yaitu mengetahui perusahaan-perusahaan yang dianggap layak mendapatkan kredit karena memiliki dewan komisaris dan komite audit yang efektif, arus kas dari aktivitas operasional, dan peluang pertumbuhan yang baik. Investor dapat melakukan investasi pada perusahaan tersebut dan tidak terlalu merasa khawatir. Perusahaan yang membutuhkan pendanaan untuk kegiatan bisnisnya akan lebih mudah mendapatkan pendanaan eksternal berupa kredit bank. Perusahaan dapat

menjalankan kegiatannya dan mendapatkan pengembalian atau keuntungan dari hasil kegiatan tersebut. Kinerja keuangan perusahaan akan meningkat dan keuntungan tersebut akan diterima juga oleh pemegang saham.

5. Bapepam-LK

Bapepam-LK dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam membuat dan menyesuaikan peraturan mengenai *good corporate governance*, terutama keberadaan dewan komisaris dan komite audit yang efektif dalam perusahaan. Hal ini disebabkan keberadaan dewan komisaris dan komite audit yang efektif berdampak positif bagi perusahaan dalam berbagai hal, contohnya efektivitas dewan komisaris dan komite audit tidak hanya dapat mengurangi *agency problem*, tetapi juga ternyata bermanfaat dalam hal kelayakan pemberian kredit dari bank.

6. Bank Indonesia

Bank Indonesia juga bisa mengambil manfaat, yaitu memberikan kebijakan bagi perbankan di Indonesia ketika mempertimbangkan pemberian kredit kepada suatu perusahaan untuk tidak hanya melakukan analisis terhadap kinerja keuangan perusahaan saja, seperti rasio keuangan, tetapi juga melakukan analisis terhadap *corporate governance* perusahaan yang dapat diukur melalui efektivitas dewan komisaris dan komite audit, arus kas dari aktivitas operasional, dan peluang pertumbuhan perusahaan. Bank Indonesia dapat membantu perbankan dalam membuat kebijakan baru atau melengkapi kebijakan yang telah ada mengenai analisis terhadap perusahaan ketika ada pengajuan kredit dari perusahaan-perusahaan di Indonesia.

1.5 Sistematika Penelitian

Berdasarkan kerangka penelitian di atas, maka penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

dan sistematika penelitian. Latar belakang penelitian mencakup teori dan alasan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Perumusan masalah mencakup rangkuman dari permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Tujuan penelitian mencakup tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dari penelitian ini. Penelitian ini tak akan berguna jika tidak ada manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bab ini mencakup manfaat dari penelitian ini berbagai pihak. Selain itu, bab ini juga mencakup sistematika penelitian.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi mengenai landasan teori mengenai *corporate governance* yang diukur melalui efektivitas dewan komisaris dan komite audit. Efektivitas dewan komisaris dipengaruhi oleh empat karakteristik dari dewan komisaris, yaitu independensi, aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi. Sementara efektivitas komite audit dipengaruhi oleh tiga kategori yang mencerminkan karakteristik komite audit, yaitu aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi.

Selain itu, landasan teori pada bab ini juga mencakup arus kas dari aktivitas operasional, peluang pertumbuhan, serta teori mengenai kelayakan pemberian kredit bank. Selain itu, bab dua akan mencakup studi literatur mengenai efektivitas dari dewan komisaris dan komite audit, arus kas dari aktivitas operasional, dan peluang pertumbuhan perusahaan, dan probabilitas kelayakan pemberian kredit bank, kerangka konseptual, dan pengembangan hipotesis.

Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini berisikan tentang model penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan periode penelitian, serta metode analisis data. Model penelitian mencakup bentuk model regresi yang digunakan pada penelitian ini. Variabel

pada bab ini mencakup variabel independen, dependen, dan kontrol yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pada bab 3 juga akan dijelaskan populasi dan sampel serta metode untuk memperoleh data dari sampel pada penelitian tersebut. Sementara itu, metode analisis data mencakup metode yang digunakan untuk mengolah sampel atau data pada penelitian ini.

Bab 4 Analisis Hasil Penelitian

Bab ini berisikan pembahasan hasil pengolahan data yang menjabarkan pengolahan statistika data-data sesuai dengan model penelitian. Analisis hasil penelitian mencakup analisis deskriptif dan analisis hasil pengolahan data. Analisis hasil penelitian juga mencakup pembahasan atau interpretasi dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan. Hasil dari pengolahan data dan analisisnya dikaitkan dengan landasan teori dan studi literatur yang ada pada bab dua.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan mencakup rangkuman dari proses dan hasil pengolahan data pada penelitian ini. Keterbatasan penelitian mencakup kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini yang diharapkan dapat digunakan sebagai pembelajaran dan perbaikan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini. Saran mencakup masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan penelitian selanjutnya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini dan juga penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

2.1 Agency Theory

Menurut IICG, konsep *corporate governance* merupakan konsep yang menitikberatkan pada keselarasan hubungan organ-organ perusahaan (pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi yang mengelola perusahaan). Konsep *corporate governance* dihadapkan pada dua isu yang utama, yaitu *agency problem* dan permasalahan kontrak yang tidak lengkap. Menurut Monks dan Minow (1995), perusahaan merupakan mekanisme yang memberikan kesempatan kepada berbagai partisipan untuk berkontribusi dalam modal, keahlian, serta tenaga kerja dalam rangka memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang. Perusahaan dikatakan sebagai *nexus of contract* yang artinya terdapat sekumpulan kontrak timbal balik (*quid pro quo contract*) dalam perusahaan yang memfasilitasi hubungan antara pemilik perusahaan, karyawan, pemasok, dan berbagai pihak lainnya yang terkait dengan perusahaan (Yu, 2004). Menurut Maher dan Andersson (2000), sebagai *nexus of contract*, perusahaan tidak mungkin membuat kontrak yang lengkap. Kontrak yang lengkap disini adalah kontrak yang dapat merinci secara jelas dan adil kepentingan berbagai pihak, yaitu agen dan prinsipal perusahaan dapat menggambarkan tindakan yang memadai dalam berbagai situasi yang mungkin terjadi. Penyebab dari tidak adanya kontrak yang lengkap adalah tidak dapat dilakukan perkiraan setiap kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang atau karena kendala biaya yang mahal untuk mengantisipasi setiap kemungkinan tersebut (Maher dan Andersson, 2000).

Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan adanya solusi berupa tindakan pengendalian yang mungkin tidak dinyatakan dalam kontrak secara eksplisit. Hal

tersebut disebut hak kontrol residual, yaitu hak untuk membuat keputusan jika menghadapi situasi yang tidak dijelaskan dalam kontrak (Grossman dan Hart, 1986), contohnya hak untuk membuat keputusan pada saat pengelolaan suatu investasi menghadapi kondisi yang berbeda dengan apa yang direncanakan. Oleh sebab itu, pemegang saham mempekerjakan agen untuk menjalankan hak kontrol residual tersebut. Dengan kata lain, agen dapat melakukan kontrol residual dan mengalokasikan dana-dana perusahaan sesuai dengan pilihannya (Maher dan Andersson, 2000). Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan keagenan (*agency relationship*) sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan antara prinsipal yang menggunakan agen untuk melaksanakan jasa yang menjadi kepentingan prinsipal dalam hal terjadi pemisahan kepemilikan dan kontrol perusahaan. Ada dua bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham, serta hubungan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholder*).

Agar hubungan kontraktual dapat berjalan lancar, maka prinsipal akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada agen. Secara khusus teori keagenan membahas tentang adanya hubungan keagenan, dimana suatu pihak tertentu (prinsipal) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (agen) yang melakukan pekerjaan. Terdapat permasalahan yang muncul antara pengelola perusahaan (agen) dan pemilik saham pada perusahaan (prinsipal) sehingga diperlukan mekanisme yang dapat mengatasi permasalahan tersebut dan berusaha menyeimbangkan kepentingan masing-masing. Pada beberapa situasi, agen dan prinsipal berusaha untuk memaksimalkan kepuasan mereka dan tidak ada alasan bagi prinsipal untuk percaya bahwa agen selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Manajemen puncak perusahaan sering mengambil keputusan tidak dalam kepentingan terbaik pemegang saham, khususnya bila orang yang oportunistik sangat terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Tanpa independensi dan prosedur pengawasan yang efektif, manajemen puncak perusahaan selalu tergoda untuk menyimpang dari melindungi kepentingan pemegang saham (Fama dan Jensen, 1983). Kreditur maupun investor yang menempatkan dananya dengan memberikan

kredit kepada perusahaan tidak ikut serta dalam pengelolaan dana tersebut, tanpa adanya jaminan bahwa dana tersebut dialokasikan dengan baik, dan tidak akan disalurkan untuk investasi atau proyek yang tidak menguntungkan. Selain itu, agen memiliki otoritas dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan perusahaan. Kesulitan yang dirasakan oleh kreditur ini merupakan inti dari permasalahan keagenan.

Menurut Brigham dan Daves (2003), *financial difficulties* juga sering terjadi karena serangkaian kesalahan, pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan dari manajemen, serta tidak adanya atau kurangnya upaya mengawasi kondisi keuangan sehingga penggunaan uang tidak sesuai dengan keperluan. *Corporate governance* merupakan mekanisme dalam perusahaan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan bertolak belakang kepentingan tersebut dan menyeimbangkan kepentingan masing-masing pihak. Konsep *corporate governance* menitikberatkan pada tanggung jawab perusahaan kepada beberapa pihak dalam perusahaan, tidak hanya pemegang saham tetapi juga kreditur, masyarakat di sekitar lokasi perusahaan, dan pemerintah. Keberadaan dewan komisaris yang berlaku sebagai pengawas perilaku manajemen dan komite audit penting dalam memoderasi perilaku tim manajemen dalam memilih suatu alternatif atau keputusan yang memaksimalkan pribadi mereka daripada kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, dewan komisaris dan komite audit yang efektif dan efisien diperlukan untuk menyelesaikan konflik tersebut dan untuk menjaga kinerja keuangan yang baik.

2.2 Corporate Governance

Good corporate governance (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. *Corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu, penerapan GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat

penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan dan diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan *Good corporate governance* pada umumnya di Indonesia. *Corporate governance* menurut Turnbull (1997) adalah suatu sistem tata kelola yang diselenggarakan dengan mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi proses institusional, termasuk faktor-faktor yang berkaitan dengan fungsi regulator.

Corporate governance menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD, 1999) didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. *Corporate governance* didefinisikan oleh Monks dan Minow (1995) adalah sebagai hubungan partisipan dalam menentukan arah dan kinerja. *Corporate governance* didefinisikan oleh IICG (*Indonesian Institute of Corporate Governance*) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain. *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja.

Corporate governance, menurut FCGI (2001) didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Menurut Bank Dunia (*World Bank*), *good corporate governance* adalah suatu kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan

nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. *Corporate governance* dapat kita definisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (*stakeholders*, dewan komisaris, dan dewan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

2.2.1 Tujuan dan Manfaat *Corporate Governance*

Menurut FCGI (2001), tujuan dari *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Selain itu, ada beberapa tujuan dari *good corporate governance*, yaitu:

- Meningkatkan *monitoring* terhadap manajemen perusahaan dan kinerja perusahaan.
- Mendapatkan kepercayaan dari investor, kreditur, perbankan sehingga mempermudah mendapatkan pendanaan, baik saham, pinjaman, ataupun kredit perbankan.
- Mendapatkan biaya hutang yang rendah.
- Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
- Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.

Manfaat dari *good corporate governance*, antara lain:

- Mengurangi adanya *agency problem* antara manajemen perusahaan (agen) dan pemangku kepentingan (prinsipal) dari tindakan-tindakan yang mementingkan kepentingan diri sendiri.
- Meningkatkan kinerja keuangan perusahaan karena semua pihak atau organ perusahaan melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Peningkatan kinerja perusahaan dapat dilakukan melalui pengambilan keputusan yang tepat

dan efektif bagi semua pihak, menjalankan kegiatan operasional secara efektif dan efisien, memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pemegang saham.

- Meningkatkan kepercayaan investor, kreditur, bank, dan pihak lainnya sehingga perusahaan lebih mudah mendapatkan pendanaan, melalui saham, pinjaman, atau kredit perbankan.
- Mendapatkan biaya hutang maupun modal yang rendah karena adanya kepercayaan yang tinggi dari kreditur maupun investor.
- Memberi kepuasan kepada pemegang saham karena kinerja perusahaan yang meningkat yang sekaligus akan meningkatkan *shareholders' value* dan dividen.

2.2.2 Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance* menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), yaitu:

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi material yang relevan mengenai perusahaan. Pengungkapan (*disclosure*), yaitu penyajian informasi kepada *stakeholders*, baik wajib maupun sukarela, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan, dan risiko usaha perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan dan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Kemandirian (*independence*), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat sehingga tidak ada organ perusahaan yang saling mendominasi dan diintervensi oleh pihak-pihak lain. Independensi

sangat dibutuhkan untuk menghindari adanya bentrok kepentingan, terutama dari pemegang saham mayoritas.

3. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis. Perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan transparan. Oleh sebab itu, akuntabilitas dibutuhkan untuk menjelaskan bahwa setiap pihak telah menjalankan tugasnya dengan tepat dan efektif.
4. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini menekankan akan adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham sehingga semua pihak sadar bahwa mereka memiliki tanggung jawab dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan.
5. Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama pada pemegang saham minoritas dari segala kecurangan atau ketidakadilan pemegang saham mayoritas.

Prinsip *corporate governance* menurut FCGI (2001) adalah:

1. Hak pemegang saham, yaitu memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai perusahaan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang bersifat fundamental terhadap perusahaan, dan memperoleh laba dari perusahaan.
2. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas, minoritas dan pemegang saham asing dengan memberikan pengungkapan penuh terhadap informasi yang bersifat material. Selain itu, organisasi harus melindungi pemegang saham minoritas dari tekanan pemegang saham mayoritas.

3. Peran *stakeholder* yang disusun secara legal serta kerja sama antara perusahaan dengan *stakeholder* untuk menciptakan kesejahteraan, pekerjaan, dan keuangan secara *enterprise*.
4. Pengungkapan yang akurat, tepat waktu, dan transparan atas semua kejadian yang bersifat material untuk kinerja perusahaan, pemilik, dan *stakeholders*.
5. Tanggung jawab *board* dalam manajemen, pengawasan dari manajemen, dan akuntabilitas kepada perusahaan dan pemegang saham.

2.2.3 Penerapan *Corporate Governance* di Indonesia

Dalam UU RI No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, sistem *corporate governance* yang ada di Indonesia menganut *two tier system*, dimana terdapat dewan komisaris dan dewan direksi dalam perusahaan. Peraturan Pencatatan Efek Indonesia telah mengeluarkan peraturan Pencatatan Efek No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa (lampiran II Kep-30/BEJ/07-2004) mengenai keharusan adanya komisaris independen dalam dewan komisaris perusahaan, komite audit, dan sekretaris perusahaan. Dewan komisaris bertugas sebagai pengawas dan dewan direksi bertugas sebagai pengurus perusahaan. Fungsi dewan komisaris dalam perusahaan sebagai wakil dari pemegang saham perusahaan yang tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan. Sementara, dewan direksi berfungsi sebagai pengelola perusahaan. Selain itu, terdapat beberapa komite yang dapat dibentuk oleh dewan komisaris dalam membantu tugas pengawasan mereka, antara lain komite audit, komite nominasi dan remunerasi, dan komite manajemen risiko. Setiap komite melaporkan segala kegiatan atau apapun yang berkaitan dengan perusahaan kepada dewan komisaris.

2.3 Dewan Komisaris

Selain *two tier system* yang diterapkan di Indonesia, yaitu terdapat dewan komisaris dan dewan direksi dalam perusahaan, terdapat sistem lain, yaitu *one tier system* yang dianut oleh Amerika, dimana hanya terdapat *board of director*. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara

umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat atas kebijakan direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan. Berdasarkan UU RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan dan usaha perseroan, serta memberikan nasihat kepada direksi berdasarkan kepada kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

2.3.1 Tujuan dan Manfaat Dewan Komisaris

Keberadaan dewan komisaris memiliki tujuan tertentu. *Board of director* (mempunyai fungsi yang mirip dengan dewan komisaris pada *two tier system*) adalah pusat mekanisme kontrol internal untuk memonitor manajer (Fama, 1980). Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan tidak ikut mengelola perusahaan secara langsung. Pemegang saham tersebut mempercayakan manajemen (agen) perusahaan dalam pengelolaan perusahaan demi kepentingan prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Oleh sebab itu, pemegang saham menugaskan dewan komisaris sebagai wakilnya dengan tujuan untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi sehingga perusahaan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik dan manajemen dapat bertindak berdasarkan kepada kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Dengan adanya dewan komisaris, pemegang saham mendapatkan manfaat terbesar, yaitu adanya perlindungan bagi pemegang saham dari kebijakan-kebijakan manajemen yang merugikan. Selain itu, manfaat dewan komisaris juga dirasakan oleh perusahaan. Dengan adanya dewan komisaris, kinerja perusahaan akan berjalan dengan baik karena adanya pengawasan. Kinerja yang baik tersebut akan berdampak pada nama baik perusahaan dan kepercayaan investor atau kreditur untuk menanamkan modal atau memberikan kredit.

2.3.2 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Menurut KNKG (2006), dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG, tetapi tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut

1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Untuk menjamin pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan anggota dewan komisaris yang memiliki integritas, kemampuan, tidak cacat hukum dan independen, serta yang tidak memiliki hubungan bisnis (kontraktual) atau hubungan lain dengan pemegang saham mayoritas dan dewan direksi (manajemen) baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.3.3 Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan komisaris memegang peranan penting dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) karena dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan agar tidak terjadi benturan kepentingan dan terlaksananya akuntabilitas. Dalam menjalankan tugas tersebut, dewan komisaris berkewajiban untuk memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS. Dewan komisaris juga berkewajiban melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.

2.3.4 Efektivitas Dewan Komisaris

Dewan komisaris memiliki peranan penting dalam perusahaan, yaitu mengawasi kinerja manajemen. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik apabila perusahaan dapat mengoptimalkan efektivitas dewan komisaris dalam perusahaan tersebut. Dewan komisaris yang menjalankan tugasnya dengan baik akan meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan kinerja yang baik, perusahaan akan mudah mendapatkan modal, pinjaman, ataupun kredit bank. Menurut Hermawan (2009), efektivitas dewan komisaris dipengaruhi oleh empat karakteristik dari dewan komisaris, yaitu independensi, aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi.

2.3.4.1 Independensi Dewan Komisaris

Dewan komisaris memiliki peranan penting dalam perusahaan untuk mengawasi kinerja manajemen dalam perusahaan sehingga tidak bertindak sesuai dengan kepentingan sendiri atau beberapa pihak saja, tetapi sesuai dengan kepentingan seluruh pihak dalam perusahaan dan pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Akan tetapi, dalam perusahaan masih terdapat dewan komisaris yang bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham mayoritas saja, bahkan ada beberapa komisaris yang merupakan perwakilan atau salah satu pemegang saham mayoritas. Dewan komisaris tersebut berusaha mengintervensi manajemen atau direksi untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pemegang saham mayoritas saja. Oleh sebab itu, diperlukan adanya independensi dewan komisaris untuk memastikan bahwa dewan komisaris akan bertindak sesuai dengan kepentingan dari perusahaan dan mengambil keputusan dalam perusahaan secara independen. Pemilihan komisaris independen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS (UU RI No. 40 tahun 2007) dan harus memperhatikan pendapat pemegang saham minoritas yang dapat disalurkan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi (KNKG, 2006). Komisaris independen akan bertindak tanpa adanya pengaruh kepentingan siapapun dan berusaha untuk melakukan fungsinya dengan baik dalam perusahaan. Dewan komisaris yang independen akan

melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi dengan baik dan tidak bias dalam memberikan keputusan agar dapat memuaskan semua pihak sehingga manajemen perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan akurat. Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Bapepam-LK, jumlah komisaris independen pada perusahaan minimal 30% dari keseluruhan anggota dewan komisaris.

Menurut Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komisaris independen adalah anggota yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik, dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik. Terdapat penelitian yang mendukung bahwa *corporate governance* yang efektif dan kinerja perusahaan meningkat dengan adanya independensi *board of directors* (Brickley *et al.*, 1994; Byrd and Hickman, 1992). Terdapat beberapa penelitian mengenai independensi *board of directors* antara lain penelitian mengenai keberadaan *board of directors* yang independen dapat mengurangi *agency problem* antara manajemen dan pemegang saham dalam proses penyajian laporan keuangan yang baik (Petra, 2007 dan Beasley 1996). Klein (2002b) menyatakan pengaruh positif antara independensi *board of director* dan komite audit terhadap kualitas laba.

2.3.4.2 Aktivitas Dewan Komisaris

Aktivitas yang dilakukan oleh dewan komisaris adalah melaporkan evaluasinya terhadap kinerja tahunan perusahaan, laporan keuangan, dan prospek bisnis perusahaan yang telah disiapkan oleh dewan direksi. Dengan membuat laporan tersebut, maka dewan komisaris telah menjalankan tugasnya dengan efektif. Dewan komisaris juga melakukan pertemuan atau rapat antar dewan komisaris atau dengan

dewan direksi untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah yang ada dalam perusahaan secara bersama-sama. Semakin banyak pertemuan yang dilakukan oleh dewan komisaris, maka masalah dalam perusahaan akan lebih mudah diselesaikan dan perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya serta menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan. Anderson *et al.* (2003) dan Xie *et al.* (2003) menyatakan bahwa aktivitas *board of director* dan komite audit yang diukur melalui jumlah rapat berhubungan dengan kualitas laporan keuangan.

2.3.4.3 Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Menurut UU RI No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, dewan komisaris terdiri dari 1 orang anggota atau lebih. Setiap perusahaan memiliki kebutuhan akan dewan komisaris yang berbeda sesuai dengan kompleksitas atau risiko perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan (KNKG, 2006). Kompleksitas yang berbeda-beda akan membutuhkan tingkat penanganan yang berbeda-beda pula. Apabila perusahaan cukup besar dan kompleks, maka dibutuhkan proporsi anggota dewan komisaris yang cukup banyak, dan sebaliknya. Jumlah dewan komisaris yang banyak akan membantu fungsinya sebagai pengawas kinerja manajemen dan laporan keuangan bisa terkelola dengan baik. Akan tetapi, jumlah anggota dewan komisaris juga harus dibatasi, tidak boleh terlalu banyak. Hal ini dapat menyebabkan proses diskusi dan negosiasi untuk mencari kesepakatan dan dalam pembuatan keputusan akan menghabiskan waktu yang lama karena adanya perbedaan pendapat dari setiap anggota. Selain itu, jumlah dewan komisaris yang terlalu banyak akan menimbulkan adanya *free rider* (Hermawan, 2009). Dengan jumlah anggota yang cukup, maka dewan komisaris dapat menjalankan setiap tugasnya dengan efektif dalam perusahaan. Perusahaan yang terdiri dari lima anggota *board of director* dipandang lebih informatif oleh pelaku pasar, sehingga laporan keuangannya memiliki kandungan informasi yang lebih tinggi (Vafeas, 2000).

2.3.4.4 Kompetensi Dewan Komisaris

Untuk menjalankan setiap tugasnya dalam perusahaan dengan efektif, dewan komisaris yang ada dalam perusahaan harus memiliki kompetensi yang baik. Kompetensi komite audit dapat dilihat latar belakang pendidikan dan pengalaman dari anggota-anggota dewan komisaris tersebut. Beberapa anggota dewan komisaris, minimal 1 (satu) anggota harus memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Hal ini penting karena salah satu tugas dewan komisaris dalam perusahaan adalah melakukan pengawasan atas kinerja manajemen yang menyusun laporan keuangan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan. Dewan komisaris harus memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, dan pengetahuan mengenai bisnis perusahaan tersebut serta memiliki pengalaman sebagai dewan komisaris di perusahaan lain. Dengan adanya kompetensi yang baik, dewan komisaris dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan dapat memaksimalkan fungsinya dalam perusahaan. Bank akan lebih percaya pada perusahaan yang memiliki *board of director* yang telah berpengalaman di posisi top suatu perusahaan atau di bisnis yang serupa dengan perusahaannya sekarang (Firth *et al.*, 2009). Menurut Xie *et al.* (2003), *discretionary accruals* akan berkurang jika terdapat *financial expertise* pada anggota *board of director* dan komite audit perusahaan. Frekuensi *earnings restatement* juga akan lebih rendah jika perusahaan tersebut memiliki *financial expertise* pada anggota *board of director* dan komite auditnya (Agrawal dan Chadcha, 2005).

2.4 Komite Audit

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, dewan komisaris dapat membentuk beberapa komite sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan tetap mempertimbangkan efektivitas komite tersebut dalam mendukung kinerja perusahaan. Komite yang dapat dibentuk oleh dewan komisaris dalam suatu perusahaan untuk membantunya melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam perusahaan adalah komite audit, komite kebijakan risiko, komite remunerasi dan nominasi, komite kebijakan *corporate governance* (KNKG, 2006). Akan tetapi, menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam No:KEP-339/BEJ/2001, yang

sifatnya wajib dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek hanyalah komite audit. Menurut Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Keberadaan komite audit pada saat ini telah diterima sebagai suatu bagian dari *Good Corporate Governance*. Beberapa komite audit yang terbentuk terdiri dari tiga sampai lima, bahkan terkadang tujuh anggota yang bukan bagian dari manajemen perusahaan sesuai dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan (KNKG, 2006), dimana ketua komite audit merupakan komisaris independen dan anggota lainnya bisa berasal dari pelaku profesi dari luar perusahaan.

2.4.1 Fungsi dan Kewenangan Komite Audit

Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris dalam beberapa hal, yaitu meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, meningkatkan efektivitas fungsi audit internal maupun audit eksternal, membantu mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, menelaah kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang atau peraturan yang berlaku. Komite audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan wewenang, komite audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi audit internal. Kewenangan komite audit terbatas sebagai alat bantu dewan komisaris sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun (hanya sebatas rekomendasi kepada dewan komisaris), kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan komisaris, seperti mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal dan memimpin suatu investigasi khusus.

Peran dan tanggung jawab komite audit akan dituangkan dalam *audit committee charter*. *Audit committee charter* atau piagam komite audit merupakan

dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen dewan komisaris dan dewan direksi dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan yang baik dalam perusahaan. Piagam komite audit yang telah disahkan akan menjadi acuan anggota komite audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam komite audit disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Piagam komite audit akan membantu anggota baru dalam melakukan orientasi sebagai komite audit dan berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk menunjukkan komitmen dewan komisaris dan dewan direksi terhadap efektivitas *corporate governance*, pengendalian internal, *risk assessment*, dan pengelolaan perusahaan secara keseluruhan (FCGI, 2001).

2.4.2 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Menurut Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5, komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris, antara lain meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten atau perusahaan publik.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan.

Tanggung jawab komite audit mencakup pada tiga bidang (Surya dan Yustiavandana, 2006 dalam Anggarini, 2010) yaitu:

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan perusahaan (*Corporate Control*)

Komite audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

2.4.3 Efektivitas Komite Audit

Tugas utama dari komite audit adalah menelaah laporan keuangan perusahaan sehingga dapat digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham ataupun kreditur. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik apabila perusahaan dapat memaksimalkan efektivitas komite audit dalam perusahaan tersebut. Dengan kinerja keuangan yang berkualitas maka diharapkan dapat bermanfaat bagi pengguna dan dapat mengambil keputusan yang terbaik. Komite audit yang menjalankan tugasnya dengan baik dapat membantu dewan komisaris dalam mengawasi kinerja manajemen yang nantinya akan meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan kinerja yang baik, perusahaan akan mudah mendapatkan modal, pinjaman, ataupun kredit bank. Menurut Hermawan (2009), efektivitas komite audit dipengaruhi oleh tiga karakteristik, yaitu aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi.

2.4.3.1 Aktivitas Komite Audit

Komite audit dapat melakukan beberapa aktivitas yang dapat meningkatkan efektivitasnya dalam perusahaan. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, yang antara lain meliputi:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti, laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya agar lebih berkualitas dan dapat diandalkan oleh para pengguna atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.
- Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan dengan efektif.
- Menelaah ruang lingkup (*scope*), keakuratan, efisiensi biaya, independensi dan objektivitas dari akuntan publik.
- Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
- Melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal perusahaan sehingga dapat mengurangi kemungkinan penyelewengan atau kecurangan yang dapat dilakukan pihak-pihak tertentu dalam perusahaan.
- Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan tercatat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh komite audit atas biaya perusahaan tercatat yang bersangkutan.

Selain itu, komite audit juga mengadakan rapat pertemuan yang dihadiri oleh ketua maupun anggota dari komite audit. Rapat pertemuan dapat dilakukan antara komite audit maupun dengan dewan direksi dan dewan komisaris untuk membicarakan tugas dan tanggung jawabnya dalam perusahaan, masalah yang

dihadapi perusahaan, dan mencari solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Semakin banyak pertemuan yang dilakukan dan semakin banyak masalah yang dapat dibicarakan dan diselesaikan bersama-sama, maka komite audit dapat menjalankan tugasnya dengan sangat efektif.

2.4.3.2 Jumlah Anggota Komite Audit

Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk ketua komite audit. Ketua komite audit merupakan komisaris independen dalam perusahaan tersebut. Anggota lainnya dari komite audit berasal dari pihak eksternal yang independen, yang bukan merupakan komisaris, direksi dan karyawan perusahaan tercatat, sedangkan yang dimaksud independen adalah pihak di luar perusahaan tercatat yang tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan perusahaan tercatat, komisaris, direksi dan pemegang saham utama perusahaan tercatat dan mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya, tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Beberapa perusahaan memiliki anggota komite audit yang lebih dari tiga orang, dimana anggotanya bukan bagian dari manajemen perusahaan. Hal ini mungkin disebabkan setiap perusahaan memiliki kompleksitas yang berbeda-beda. Akan tetapi, jumlah dari komite audit tidak boleh terlalu berlebihan karena akan mengganggu efektifitas perusahaan dalam pengambilan keputusan (KNKG, 2006). Selain itu, jumlah yang berlebihan akan memunculkan *free rider* dalam perusahaan yang akan merugikan perusahaan.

2.4.3.3 Kompetensi Komite Audit

Penting bagi perusahaan untuk memperhatikan karakteristik yang dimiliki oleh setiap anggota komite auditnya. Hal ini disebabkan karakteristik komite akan berpengaruh pada peran komite audit dalam pemberian bantuan kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya tentang pengendalian internal dan pelaporan

keuangan dan manajemen. Adapun persyaratan keanggotaan komite audit sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004) adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikan, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Bukan merupakan orang dari kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non-audit, atau jasa konsultasi lain kepada perusahaan dalam enam bulan terakhir.
6. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir.
7. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan.
8. Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan komisaris, direksi atau pemegang saham utama perusahaan.
9. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Komite audit yang ada dalam perusahaan harus kompeten agar dapat efektif dalam menjalankan setiap tugasnya dalam perusahaan. Kompetensi komite audit dapat dilihat latar belakang pendidikan dan pengalaman dari anggota-anggota komite audit tersebut. Salah seorang anggota komite audit harus memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Selain itu, setiap anggota komite audit harus memiliki

kemampuan dalam membaca dan memahami laporan keuangan. Hal ini penting karena salah satu tugas komite audit dalam perusahaan adalah melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti, laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

New York Stock Exchange dalam standarnya mensyaratkan semua anggota komite audit dapat membaca laporan keuangan dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. NYSE yakin keberadaan ahli akuntansi atau keuangan akan memberdayakan komite audit untuk melakukan penilaian secara independen atas informasi yang diterimanya, mengenali permasalahan dan mencari solusi yang tepat. Tidak hanya dilihat dari latar belakang pendidikan saja, kompetensi komite audit dilihat dari pengalaman setiap anggota komite audit dalam perusahaan lain yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Komite audit harus memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, dan pengetahuan mengenai bisnis serta mampu berkomunikasi dengan baik.

2.5 Corporate Governance dan Laporan Keuangan

Suatu perusahaan memiliki kewajiban untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut dan menyediakan laporan keuangan yang dapat diandalkan dalam pengambilan suatu keputusan, baik bagi investor maupun kreditur. Dengan adanya penerapan *good corporate governance*, perusahaan dapat menyediakan laporan keuangan yang dapat diandalkan. Sesuai dengan penelitian Cohen *et al* (2004), bahwa *corporate governance* bermanfaat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mencegah adanya manipulasi laba. Penerapan *corporate governance* juga mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan (Eng dan Mak, 2003). Salah satu atribut *corporate governance* yang berfungsi sebagai pengawas kinerja manajemen sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan adalah dewan komisaris dan komite audit.

Dewan komisaris dalam perusahaan memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja manajemen dalam perusahaan agar bertindak tidak untuk kepentingannya

sendiri, melainkan untuk kepentingan perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan melakukan tugasnya dengan baik, dewan komisaris dapat membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Begitu pula dengan komite audit, komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantunya melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaporan keuangan sehingga perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan yang baik akan membuat investor maupun kreditur bersedia untuk menanamkan modalnya atau memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut. Dengan kualitas yang baik, bank akan bersedia memberikan pinjaman atau kredit terhadap perusahaan tersebut. Dengan demikian, perusahaan tersebut akan dianggap layak untuk mendapatkan kredit dari bank karena kualitas laporan keuangan yang baik dan dapat diandalkan.

2.6 Arus Kas dari Aktivitas Operasional

Arus kas adalah aliran kas perusahaan yang secara riil diterima dan dikeluarkan oleh perusahaan untuk keperluan operasi, pendanaan, dan investasi. Ada dua macam arus kas, yaitu arus kas yang masuk ke perusahaan yang disebut dengan *cash in flow* dan aliran kas yang keluar dari perusahaan yang disebut dengan *cash out flow*. Metode penghitungan arus kas terdiri dari dua jenis, yaitu metode langsung (*direct method*) dan metode tidak langsung (*indirect method*). Arus kas juga dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu arus kas operasional (*Operating Cash Flow*), arus kas pendanaan (*Financing Cash Flow*), dan arus kas investasi (*Investing Cash Flow*). Adapun arus kas dalam perusahaan bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu memberikan seluruh rencana penerimaan kas yang berhubungan dengan rencana keuangan perusahaan dan transaksi yang menyebabkan perubahan kas, sebagai dasar untuk menaksir kebutuhan dana untuk masa yang akan datang dan memperkirakan jangka waktu pengembalian kredit, dan membantu manager untuk mengambil keputusan kebijakan finansial, kreditur dapat melihat kemampuan perusahaan untuk membayar kredit yang diberikan kepadanya.

Menurut PSAK No. 2 (Revisi 2009) mengenai Arus Kas, informasi tentang arus kas suatu entitas berguna bagi para pengguna laporan keuangan, antara lain:

1. Sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhannya untuk menggunakan arus kas tersebut karena setiap pengguna akan melakukan evaluasi terhadap kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.
2. Untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah.
3. Untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (*future cash flows*) dari berbagai entitas.
4. Meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama.

Fungsi dari arus kas, antara lain:

- Fungsi likuiditas dimana dana yang ada dapat digunakan untuk tujuan atau rencana memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bisa dicairkan dalam waktu cepat apabila terdapat kebutuhan mendadak perusahaan tanpa ada pengurangan investasi awal.
- Anti inflasi dimana dana yang disimpan dan untuk menghindari risiko turunnya daya beli di masa akan datang.
- *Capital growth* dimana kas diperuntukkan untuk penambahan atau perkembangan kekayaan dengan jangka waktu relatif panjang.
- Memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham dan kreditur mengenai aliran kas perusahaan yang berasal dari kegiatan operasional, pendanaan, dan investasi perusahaan. Informasi ini dapat menunjukkan kepada investor maupun kreditur mengenai risiko perusahaan,

apakah kegiatan yang dilakukan perusahaan, terutama kegiatan operasional menghasilkan kas yang positif bagi perusahaan sehingga dapat membayar dividen maupun pokok dan bunga pinjaman kepada investor maupun kreditur.

Menurut PSAK No. 2 (Revisi 2009) mengenai Arus Kas, arus kas dari aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas (*principal revenue-producing activities*). Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Menurut Cheng *et al.* (1997), arus kas yang berasal dari aktivitas operasional merupakan indikator yang lebih *reliable* sebagai pengukur kinerja perusahaan dibandingkan *reported earnings*. Perhitungan arus kas dari aktivitas operasional tidak dipengaruhi oleh akun-akun akrual dan yang ditangguhkan serta dapat mengeliminasi sumber-sumber manipulasi akuntansi.

2.7 Peluang Pertumbuhan

Nilai suatu perusahaan dapat dilihat dari peluang pertumbuhan dan *asset-in-place* pada perusahaan tersebut (Myers, 1977). Nilai perusahaan yang tinggi dapat diwakili oleh peluang pertumbuhan yang tinggi dan *asset-in-place* yang rendah pada perusahaan. Gul dan Tsui (1998) menggunakan *market value* untuk menangkap nilai dari perusahaan tersebut. Untuk mengukur peluang pertumbuhan perusahaan tersebut, penelitian ini menggunakan *factor analysis* yang berasal dari Gul dan Tsui (1998), yaitu *market to book value of equity*, *market to book value of asset*, dan *gross property, plant and equipment ratio*. Perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang tinggi akan cenderung membutuhkan dana dalam jumlah yang cukup besar untuk membiayai pertumbuhan atau investasinya tersebut pada masa yang akan datang. Oleh karenanya, perusahaan akan mempertahankan labanya untuk diinvestasikan

kembali pada perusahaan dan pada waktu bersamaan perusahaan diharapkan akan tetap mengandalkan pendanaan melalui utang yang lebih besar (Baskin, 1989). Dengan peluang pertumbuhan yang tinggi tersebut, tentu saja perusahaan akan berinvestasi pada proyek yang menghasilkan pengembalian (*return*) yang tinggi pula. Dengan pengembalian yang tinggi tersebut, maka bank akan lebih percaya dan lebih mudah memberikan kredit kepada perusahaan tersebut. Akan tetapi, menurut Psillaki *et al.* (2010), peluang pertumbuhan justru menimbulkan risiko kredit yang besar karena proyek yang memiliki pengembalian tinggi pasti memiliki risiko yang tinggi pula. Apabila perusahaan mendapatkan risiko tersebut, maka bank sebagai pemberi kredit juga berpotensi untuk menerima risiko tersebut.

2.8 Bank

Bank berasal dari bahasa Italia, yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*. Pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi dua kegiatan pokok atau penting dan satu kegiatan pendukung, yaitu:

- Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Dalam kegiatan ini, bank memberikan balas jasa, seperti bunga dan hadiah yang bertujuan untuk merangsang masyarakat berminat untuk menabung dan senang untuk menabung sehingga mereka menambahkan jumlah tabungan mereka.

- Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman atau kredit kepada masyarakat atau perusahaan. Dalam kegiatan ini, bank akan mengenakan bunga pinjaman bagi masyarakat yang melakukan pinjaman.
- Jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut, seperti menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi, menciptakan uang, menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional, menyediakan pelayanan penyimpanan barang-barang berharga, dan menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana.

2.8.1 Kredit Bank

Kredit bank adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu pihak, misalnya masyarakat atau perusahaan dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati. UU RI No.7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak pinjam-meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Kredit ini memiliki tujuan baik bagi bank (kreditur) maupun peminjam (debitur). Bagi kreditur sendiri, tujuan kredit adalah sebagai instrumen untuk menjaga rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Kredit ini juga bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk bank dan diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan bank untuk menjaga kelangsungan hidup bank tersebut. Sementara, tujuan kredit bagi debitur adalah untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Kredit perbankan memiliki fungsi penting, baik bagi dunia usaha maupun lembaga keuangan seperti perbankan itu sendiri. Fungsi kredit tersebut menurut Bank Indonesia adalah:

- Bagi dunia usaha (termasuk usaha kecil), sebagai sumber permodalan untuk menjaga kelangsungan atau meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha akan

memberikan profit yang tinggi bagi perusahaan atau masyarakat dan pengembalian kredit dapat dilakukan tepat waktu, kesejahteraan perusahaan atau masyarakat akan meningkat. Selain itu, keuntungan usaha yang meningkat akan berdampak positif juga bagi negara, seperti penambahan pendapatan negara melalui pajak yang dikenakan bagi keuntungan perusahaan tersebut.

- Bagi lembaga keuangan (termasuk bank), menyalurkan dana masyarakat (deposito, tabungan, giro) dalam bentuk kredit kepada dunia usaha sehingga uang yang ada dalam bank yang berasal dari simpanan bank tidak akan *idle* atau mengendap di bank. Uang tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat untuk usaha atau kepentingan yang lebih bermanfaat.
- Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dengan memberikan kredit kepada masyarakat atau perusahaan, menyebabkan kegairahan bagi masyarakat atau perusahaan untuk melakukan usaha dan penggunaan uang akan bertambah.

Selain memiliki fungsi, kredit perbankan juga memberikan manfaat bagi beberapa pihak, seperti:

- Bagi debitur, yaitu memberi keuntungan usaha dengan adanya tambahan modal dan berkembangnya usaha.
- Bagi lembaga keuangan (termasuk bank), yaitu memberi keuntungan dari selisih bunga pemberian kredit atau jasa lainnya.

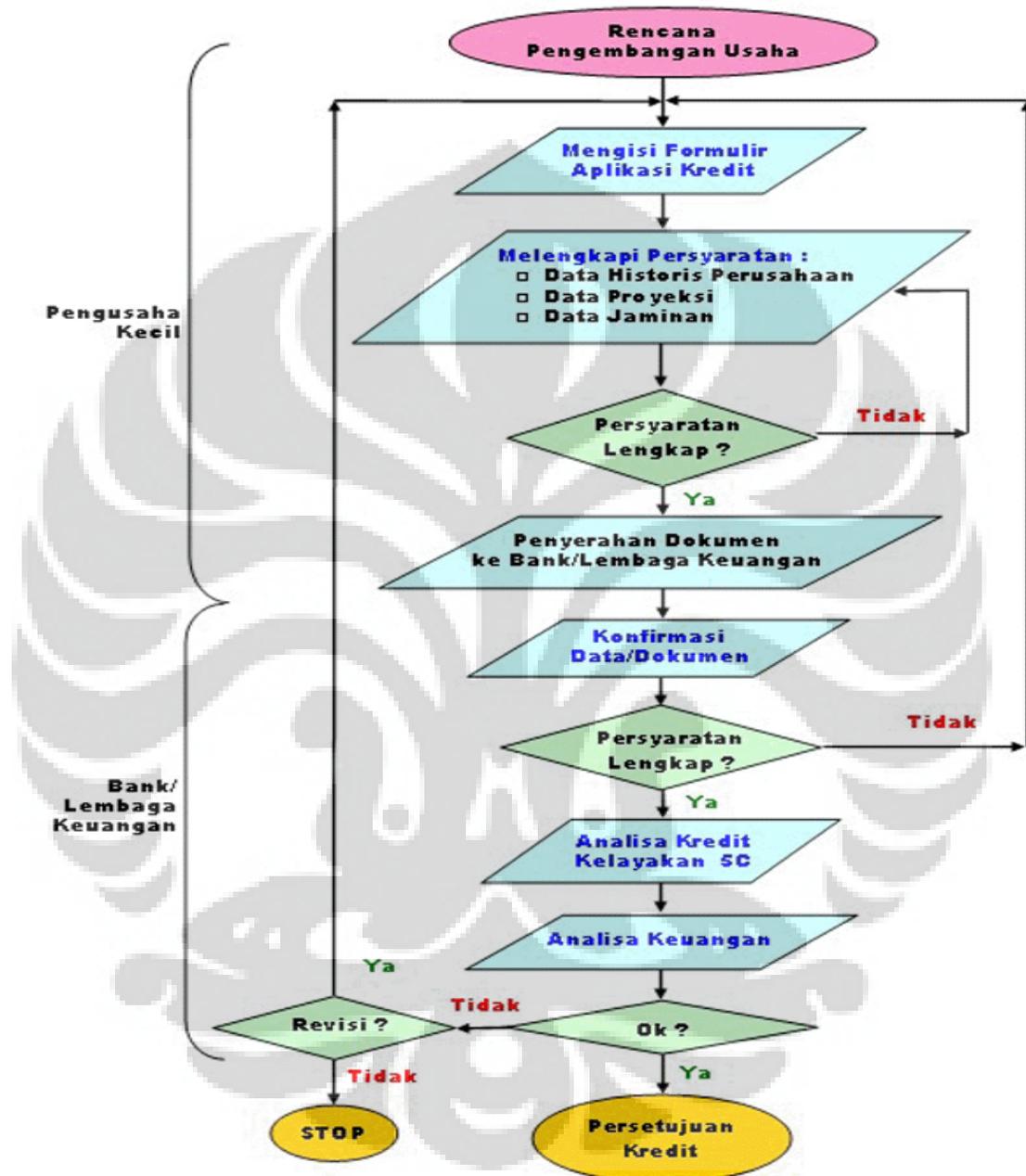
Kredit perbankan juga memiliki risiko, baik bagi bank yang memberikan kredit maupun bagi perusahaan yang mengajukan kredit. Risiko kredit ini terjadi ketika adanya ketidakmampuan dari perusahaan yang melakukan pinjaman untuk membayar kembali pinjaman yang telah diajukan ataupun bunga pinjamannya. Hal ini dapat terjadi jika perusahaan yang melakukan pinjaman untuk mengembangkan usahanya tidak mampu untuk membangun usaha yang baik atau tidak mampu mengolah pinjaman tersebut dengan baik sehingga tidak mendapatkan pengembalian yang baik dari usahanya. Kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut berdampak tidak mampunya perusahaan untuk membayar bunga atau pinjaman pokoknya. Risiko

ini juga dialami oleh bank yang memberikan kredit tersebut, atau disebut kredit macet. Selain itu, kredibilitas bank tersebut akan diragukan karena memberikan kredit kepada perusahaan yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan kredit. Hal tersebut akan berdampak pada kurang percaya masyarakat atau nasabah untuk menyimpan dana mereka pada bank tersebut. Untuk menghindari risiko ini, bank harus terlebih dahulu menganalisis kondisi keuangan perusahaan tersebut dengan baik dan dilakukan oleh orang yang *capable*, apakah perusahaan tersebut layak untuk mendapatkan pinjaman. Selain itu, bank juga harus menganalisis bunga yang akan dibebankan kepada perusahaan yang melakukan pinjaman berdasarkan risiko kredit. Jika risiko kredit besar, bank akan membebankan bunga pinjaman dan jaminan yang tinggi pada perusahaan, dan sebaliknya.

2.8.2 Syarat Mendapatkan Kredit Bank

Setiap bank memiliki persyaratan atau ketentuan yang berbeda-beda dalam hal keputusan pemberian kredit kepada suatu perusahaan. Setiap bank berhak memiliki syarat atau standar tersendiri untuk memberikan kredit. Akan tetapi, terdapat beberapa langkah atau persiapan yang dilakukan oleh perusahaan ketika mengajukan kredit kepada suatu bank. Pada gambar 2.1 dijelaskan langkah untuk mengajukan kredit kepada perbankan bagi pengusaha kecil. Pada gambar tersebut akan dijelaskan langkah dan syarat yang harus dilakukan pengusaha tersebut agar dapat menerima pinjaman atau kredit dari perbankan.

Gambar 2.1 Sistem Informasi Prosedur Memperoleh Kredit Menurut Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia, diambil pada tanggal 12 Desember 2011

Pada tahun 2006, Bank Indonesia melakukan pembentukan Biro Informasi Kredit dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui penyaluran kredit, yang berfungsi sebagai intermediasi antara perbankan dengan badan usaha atau perorangan yang ingin mengajukan kredit. Tugas utama Biro Informasi Kredit adalah menghimpun dan menyimpan data penyediaan dana atau pembiayaan. Data tersebut akan didistribusikan sebagai informasi kredit, yang disebut dengan Informasi Debitur Individual (IDI) Historis. IDI Historis dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan anggota Biro Informasi Kredit (perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank), serta masyarakat baik perorangan maupun badan usaha. IDI Historis dimanfaatkan untuk mengetahui kredibilitas calon debitur, yaitu perusahaan yang ingin mengajukan pinjaman atau kredit.

Menurut Bank Indonesia, informasi pada IDI Historis tersebut akan membantu lembaga keuangan dalam mempermudah analisa untuk pemberian kredit atau pembiayaan sehingga dapat memperlancar proses penyediaan dana dan penerapan manajemen risiko, antara lain untuk menghindari kegagalan membayar pinjaman yang telah diberikan dan mencegah penipuan. Selain bagi perusahaan, IDI Historis juga berfungsi bagi masyarakat untuk memberikan edukasi positif agar masyarakat dapat bertanggung jawab terhadap kewajiban kredit yang telah diterimanya dan membantu melakukan kontrol terhadap kebenaran dan keakuratan data yang disampaikan lembaga keuangan kepada Bank Indonesia.

2.9 Rerangka Konseptual

Dalam hal pemberian kredit, kinerja keuangan merupakan hal yang penting bagi suatu perbankan sebagai tolak ukur apakah suatu perusahaan layak atau tidak mendapatkan kedit. Dengan menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan, perbankan dapat memperkirakan apakah perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya di masa depan. Untuk menghasilkan kinerja keuangan yang dapat diandalkan, perusahaan harus menerapkan *Good corporate governance* pada perusahaanya. Laporan keuangan yang dikelola dengan baik karena

adanya penerapan *good corporate governance* akan mengurangi adanya asimetri informasi diantara kreditur dan laporan keuangan tersebut dapat menyediakan *signal* yang lebih informatif tentang kualitas kredit di masa depan (Ball *et al.*, 2008). *Corporate governance* bermanfaat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mencegah adanya manipulasi laba (Cohen *et al.*, 2004). Penerapan *corporate governance* juga mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan (Eng dan Mak, 2003). *Corporate governance* sangat penting diterapkan dalam perusahaan karena *corporate governance* merupakan mekanisme dalam perusahaan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan bentrok kepentingan tersebut dan menyeimbangkan kepentingan perusahaan dengan kreditur, yaitu perbankan yang memberikan kredit.

Struktur *corporate governance* yang dapat membuat laporan keuangan perusahaan terkelola dengan baik, yaitu dewan komisaris dan komite audit. Keberadaan dewan komisaris dan komite audit dalam perusahaan berfungsi untuk mengawasi kinerja manajemen sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, objektif, dan dapat diandalkan karena tidak dipengaruhi kepentingan manajemen. Dewan komisaris yang efektif dapat melakukan fungsi *monitoring* terhadap kinerja manajemen dan mendorong manajemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *stakeholders*, baik kreditur ataupun pemegang saham sehingga manajemen dapat menghasilkan kinerja yang baik. *Monitoring* dari *board* dapat meningkatkan kualitas manajemen dalam membuat keputusan dan meningkatkan kinerja manajemen (Monks dan Minow, 1995).

Peran komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam mengawasi kinerja manajemen melalui pengawasan dan penilaian atas informasi keuangan perusahaan. Dewan komisaris dan komite audit diharapkan berperan penting pada akuntabilitas laporan keuangan yang disajikan (Hermawan, 2009). Dengan adanya dewan komisaris dan komite audit tersebut, maka perusahaan akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut dapat berguna dan diandalkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik investor maupun

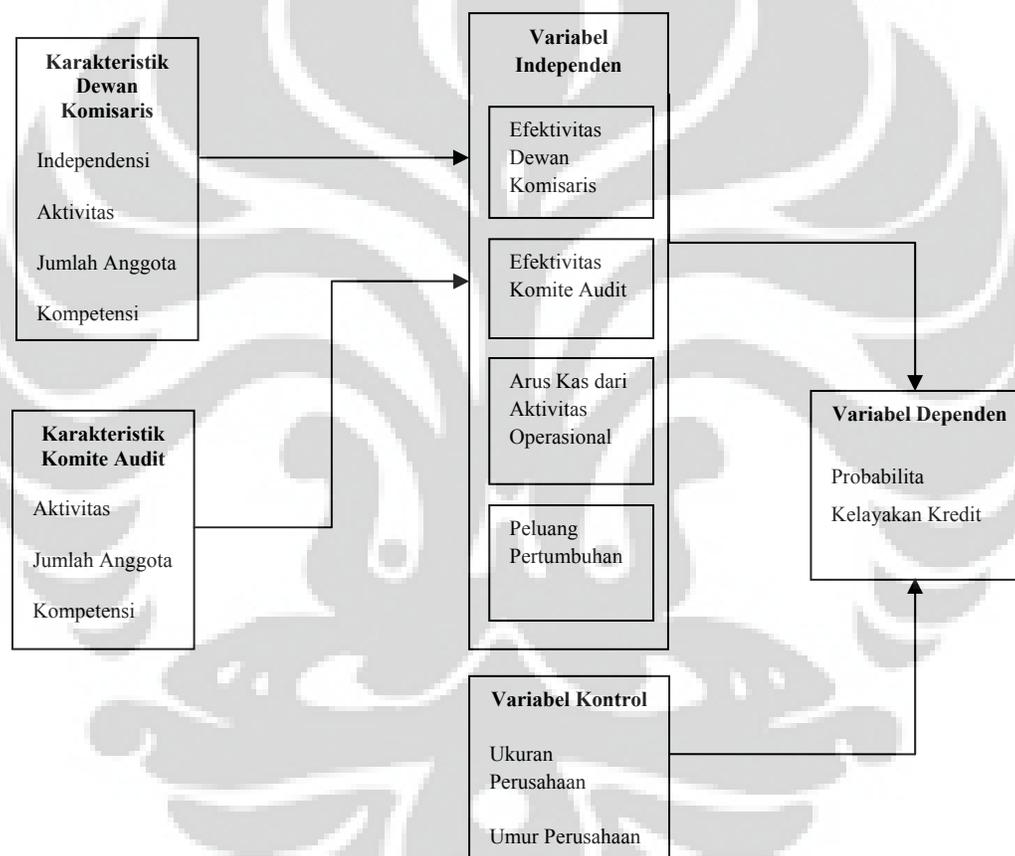
kreditur dalam hal pengambilan keputusan, seperti investasi atau memberikan pinjaman atau kredit. Dengan kualitas laporan keuangan yang baik, perusahaan akan dianggap layak mendapatkan kredit dari bank sehingga jika perusahaan mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank, maka bank sebagai kreditur akan bersedia memberikan kredit kepada perusahaan tersebut.

Salah satu kinerja keuangan perusahaan yang dapat dianalisis oleh perbankan selain kinerja keuangan, seperti rasio keuangan adalah arus kas dari aktivitas operasional. Perusahaan yang mengajukan kredit kepada bank harus memiliki kas yang mencukupi untuk membayar pinjaman berikut bunganya setiap bulan. Apabila perusahaan mampu menghasilkan kas yang tinggi, maka perusahaan dianggap mampu membayar kewajiban di masa datang. Akan tetapi, apabila perusahaan memiliki arus kas aktivitas operasional yang rendah bahkan minus, perusahaan dianggap kurang mampu menghasilkan kas bagi perusahaannya dan bank akan menerima risiko yang tinggi apabila memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut. Selain itu, perbankan juga dapat melakukan analisis terhadap peluang pertumbuhan perusahaan karena nilai perusahaan dapat dilihat dari peluang pertumbuhan perusahaan tersebut (Myers, 1977). Nilai perusahaan yang tinggi dapat diwakili oleh peluang pertumbuhan yang tinggi pada perusahaan. Selain itu, peluang pertumbuhan yang tinggi diharapkan akan menjadi peluang bagi perusahaan untuk berinvestasi dengan tingkat pengembalian yang tinggi pula.

Pada penelitian ini, efektivitas dewan komisaris akan diukur dengan empat karakteristik, yaitu independensi, aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi, sedangkan efektivitas komite audit akan diukur dengan tiga karakteristik, yaitu aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi. Karakteristik tersebut akan dinilai dengan melakukan *scoring* berdasarkan daftar pertanyaan yang dibuat Hermawan (2009) pada penelitiannya, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat mewakili karakteristik tersebut. Sementara arus kas dari aktivitas operasional akan dihitung mengikuti penelitian Cheng *et al.* (1997), dimana arus kas dari aktivitas operasional dibagi

dengan *market value of equity at the beginning of the year*. Peluang pertumbuhan akan diukur dengan *market value of equity*. Keempat variabel tersebut akan diukur pengaruhnya terhadap probabilita kelayakan kredit, variabel dependennya. Variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini adalah ukuran perusahaan (*size*) dan umur perusahaan (*age*). Pada gambar di bawah ini dapat dilihat rerangka konseptual dari penelitian ini.

Gambar 2.2 Rerangka Konseptual



2.10 Pengembangan Hipotesis

Corporate governance yang diterapkan oleh perusahaan dianggap dapat mempengaruhi probabilita kelayakan pemberian kredit dari perbankan. *Corporate governance* dapat membantu perusahaan mengelola laporan keuangan dengan baik. *Corporate governace* dapat meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan

(Shleifer dan Vishny, 1997). Menurut Ball *et al.* (2008), laporan keuangan tersebut akan mengurangi adanya asimetri informasi diantara kreditur dan menemukan bahwa laporan keuangan dapat menyediakan *signal* yang lebih informatif tentang kualitas kredit di masa depan. Dengan laporan keuangan yang baik, suatu bank akan bersedia memberikan kredit kepada perusahaan tersebut. Perusahaan dengan laporan keuangan yang berkualitas tersebut akan dianggap layak untuk mendapatkan kredit dari bank. Menurut Firth *et al.* (2009), suatu bank akan lebih percaya memberikan kredit kepada perusahaan yang memiliki keuangan yang sehat dan *corporate governance* yang baik. Efektivitas dewan komisaris dan komite audit yang merupakan atribut dari *corporate governance* dianggap dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Dewan komisaris bertanggung jawab dalam mengawasi proses pelaporan keuangan dalam perusahaan. Menurut Klein (2002a), *board of directors* selalu bertemu dengan staf akuntansi dan auditor eksternal dalam fungsinya sebagai pengawas pelaporan keuangan. Selain itu, keberadaan dewan komisaris dapat mengurangi *agency problem* antara manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham dan kreditur. Dengan keberadaan dewan komisaris, maka diharapkan kinerja manajemen dapat lebih baik dan laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih berkualitas dan diandalkan dalam proses pengambilan keputusan kreditur, dalam penelitian ini adalah bank, dimana keputusan tersebut berkaitan dengan apakah suatu perusahaan tersebut layak mendapatkan kredit dan bank tersebut bersedia memberikan kredit kepada perusahaan tersebut. Pada penelitian ini, keberadaan dewan komisaris akan diukur melalui efektivitas dewan komisaris. Mengikuti penelitian Hermawan (2009), efektivitas dewan komisaris dapat diukur melalui skor yang diukur mengukur efektivitas melalui empat karakteristik, yaitu independensi, aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi. Menurut Hermawan (2009), keempat karakteristik tersebut dapat digunakan untuk mengukur efektivitas dewan komisaris dalam suatu perusahaan.

Peran pengawasan *outside director* sangat besar di dalam *board* (Weisbach, 1988). Keberadaan *board of director* yang independen dapat mengurangi *agency problem* dengan kreditur (Chen *et al.*, 2006, Bhajraj dan Sengupta, 2003). Dengan *agency problem* yang berkurang dan kualitas laporan keuangan yang baik, suatu bank akan bersedia memberikan kredit kepada perusahaan tersebut. Sejalan dengan penelitian Anderson *et al.* (2004), yang menyatakan bahwa *board of director* yang independen berpengaruh negatif terhadap biaya hutang. Mereka menyatakan bahwa perusahaan dapat menerima tingkat bunga yang rendah ketika *board of director* independen dalam perusahaan semakin banyak. Selain itu, aktivitas dari dewan komisaris juga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya berdampak pada kemungkinan suatu perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit dari perbankan.

Tidak hanya independensi, aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi anggota dewan komisaris juga mempengaruhi efektivitas dewan komisaris tersebut. Menurut Anderson *et al.* (2003) dan Xie *et al.* (2003), aktivitas *board of director* yang diukur melalui jumlah rapat berhubungan dengan kualitas laporan keuangan. Ukuran *board* yang semakin besar dan menyediakan anggota *board of directors* yang memiliki pendidikan baik lebih banyak akan meningkatkan efektivitas dalam *monitoring* (Adams dan Mehran, 2002). Bank akan lebih percaya pada perusahaan yang memiliki dewan komisaris yang telah berpengalaman di posisi top suatu perusahaan atau di bisnis yang serupa dengan perusahaannya sekarang (Firth *et al.*, 2009). Dengan keberadaan dewan komisaris yang efektif, maka perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, yang dapat diandalkan. Dengan laporan keuangan yang baik, bank akan menilai bahwa perusahaan tersebut layak mendapatkan kredit dari bank. Berdasarkan teori dan tinjauan literatur yang telah dipaparkan, maka hipotesis yang terbentuk adalah:

H1a: Skor efektivitas dewan komisaris berpengaruh positif terhadap probabilitas kelayakan kredit.

Selain itu, keberadaan komite audit yang bertugas membantu dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya komite audit pada perusahaan, diharapkan kualitas dari laporan keuangan suatu perusahaan akan sangat baik sehingga laporan keuangan tersebut dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan investasi atau pemberian kredit. Laporan keuangan tersebut dapat digunakan oleh kreditur atau bank untuk mengambil keputusan memberikan kredit pada perusahaan tersebut atau tidak. Keberadaan komite audit yang efektif akan meningkatkan kepercayaan perbankan terhadap kualitas laporan keuangan yang ingin memberikan kredit kepada perusahaan tersebut. Serupa dengan dewan komisaris, pada penelitian ini komite audit juga diukur melalui efektivitasnya. Efektivitas komite audit diukur melalui skor tiga karakteristik, yaitu aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi (Hermawan, 2009).

Menurut Anderson *et al.* (2003 dan 2004), aktivitas komite audit yang diukur melalui jumlah rapat dan jumlah komite audit yang besar berhubungan dengan proses pengawasan terhadap pelaporan keuangan dan kualitas laporan keuangan. Menurut Xie *et al.* (2003), aktivitas komite audit dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan dengan adanya *financial expertise* pada anggota *board of directors* dan komite audit dapat mengurangi *discretionary accrual*. Menurut Agrawal dan Chadcha (2005), frekuensi *earnings restatement* lebih rendah pada perusahaan yang memiliki *financial expertise* pada anggota *board of directors* dan komite auditnya. Dengan kualitas laporan keuangan yang baik, perbankan akan lebih percaya untuk memberikan kredit kepada perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini membentuk suatu hipotesis, yaitu:

H2a: Skor efektivitas komite audit berpengaruh positif terhadap probabilitas kelayakan kredit.

Salah satu hal yang dapat diperhatikan oleh bank adalah arus kas perusahaan karena dapat digunakan sebagai prediksi apakah suatu perusahaan akan mampu membayar kewajibannya di masa depan. Perusahaan yang mengajukan kredit kepada

bank harus memiliki kas yang mencukupi untuk membayar pinjaman berikut bunganya setiap bulan. Menurut Cheng *et al.* (1997), arus kas yang berasal dari aktivitas operasional merupakan indikator yang lebih *reliable* sebagai pengukur kinerja perusahaan dibandingkan *reported earning*. Perhitungan arus kas dari aktivitas operasional tidak dipengaruhi oleh akun-akun akrual dan yang ditangguhkan serta dapat mengeliminasi sumber-sumber manipulasi akuntansi. Selain itu, arus kas yang berasal dari kegiatan operasional adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan setiap hari untuk membuat perusahaannya terus bertahan hidup, bersaing dengan perusahaan lain, dan mendapatkan keuntungan yang banyak.

Apabila arus kas yang berasal dari kegiatan operasional ini tidak mencukupi atau *minus*, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan kurang mampu mengelola kas dari kegiatan operasional, mungkin perusahaan memberikan piutang kepada pelanggan dengan limit yang tinggi. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki risiko yang tinggi, misalnya risiko piutang dihapuskan karena pelanggan tidak sanggup membayar. Hal ini akan berdampak besar bagi perusahaan, yaitu kerugian atau bahkan kebangkrutan yang juga akan menimbulkan kerugian bagi bank yang bersedia memberikan kredit. Dengan risiko ini, perbankan dapat menyimpulkan apakah perusahaan tersebut layak atau tidak mendapatkan kredit berdasarkan arus kas dari kegiatan operasionalnya. Semakin baik arus kas dari aktivitas operasional, maka perusahaan dinilai layak mendapatkan kredit dari bank, dan sebaliknya.

H3a: Arus kas dari aktivitas operasional berpengaruh positif terhadap probabilita kelayakan kredit.

Perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi biasanya melakukan investasi pada proyek yang memiliki *Net Present Value* (NPV) yang tinggi. Untuk investasi ini, biasanya perusahaan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, tidak jarang perusahaan yang mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Jensen (1986) menyatakan bahwa perusahaan dengan *investment opportunity* yang tinggi biasanya memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi (*high*

growth), aktif melakukan investasi, memiliki *free cash flow* yang rendah dan *asset in place* yang kecil. Hal ini menyebabkan kecenderungan perusahaan untuk mendanai proyeknya menggunakan hutang. Perusahaan tersebut memiliki peluang investasi yang besar. Dengan investasi tersebut, perusahaan akan mendapatkan pengembalian yang tinggi. Perusahaan yang mendapatkan pengembalian yang tinggi, akan mampu membayar pinjaman dan bunganya kepada bank. Perbankan akan bersedia untuk memberikan kredit kepada perusahaan tersebut karena pengembalian perusahaan yang tinggi tersebut. Nilai suatu perusahaan dapat dilihat dari peluang pertumbuhan dan *asset-in-place* pada perusahaan tersebut (Myers, 1977). Nilai perusahaan yang tinggi dapat diwakili oleh peluang pertumbuhan yang tinggi pada perusahaan. Berdasarkan teori dan tinjauan literatur tersebut, penelitian ini membentuk hipotesis, yaitu:

H4a: Peluang pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap probabilita kelayakan kredit.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Model Penelitian

Dalam penelitian ini, hubungan antara efektivitas dewan komisaris dan komite audit, arus kas dari aktivitas operasional, dan peluang pertumbuhan terhadap probabilita kelayakan kredit bank akan diuji menggunakan persamaan regresi berikut ini:

$$\text{PROBCREDIT}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{BOARDSCORE}_i + \beta_2 \text{AUDCOMMSCORE}_i + \beta_3 \text{CFFO}_i + \beta_4 \text{GROWTHOPP}_i + \beta_5 \text{SIZE}_i + \beta_6 \text{AGE}_i + \varepsilon_i$$

Keterangan

- PROBCREDIT_i : Probabilita pemberian kredit oleh bank pada perusahaan i , yang merupakan variabel dikotomi atau *dummy* dengan nilai 1 apabila perusahaan i dinyatakan layak diberikan kredit oleh bank dan 0 apabila lainnya.
- BOARDSCORE_i : Total skor efektivitas dewan komisaris pada perusahaan i .
- AUDCOMMSCORE_i : Total skor efektivitas komite audit pada perusahaan i .
- CFFO_i : Arus kas dari aktivitas operasional pada perusahaan i yang dibagi dengan nilai pasar ekuitas pada awal tahun.
- GROWTHOPP_i : Peluang pertumbuhan pada perusahaan i yang diukur melalui *market to book value of equity* pada akhir tahun.
- SIZE_i : Ukuran perusahaan berdasarkan logaritma natural total asset perusahaan i pada akhir tahun.
- AGE_i : Umur perusahaan i sejak IPO sampai periode penelitian.

3.2 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 7 variabel, dimana 1 variabel dependen, 4 variabel independen, dan 2 variabel kontrol. Variabel dependen

yang digunakan dalam penelitian ini adalah probabilita kelayakan kredit. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skor efektivitas dewan komisaris dan komite audit, arus kas dari aktivitas operasional, dan peluang pertumbuhan. Sementara itu, terdapat ukuran perusahaan dan umur perusahaan sebagai variabel kontrol.

3.2.1 Variabel Dependen

3.2.1.1 Probabilita Kelayakan Mendapatkan Kredit Bank

Variabel dependen pada penelitian ini adalah probabilita kelayakan kredit. Variabel dependen ini merupakan variabel dikotomi atau *dummy*, dimana perusahaan yang layak diberikan kredit oleh bank akan diberikan nilai 1 dan 0 bagi perusahaan yang dianggap tidak layak mendapatkan kredit. Penentuan suatu perusahaan dianggap layak atau tidak mendapatkan kredit dari bank dilihat dari majalah Infobank bulan April 2011. Majalah Infobank menganalisis perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang layak mendapatkan kredit berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Probabilita Kelayakan Mendapatkan Kredit Bank

Kriteria	Ketentuan atau Syarat
<i>Debt to Equity Ratio</i> (DER)	Di bawah 2,35 kali, yakni perbandingan dari 70% utang (kewajiban) dan 30% modal
Modal Perusahaan	Positif dua tahun berturut-turut
Laba Perusahaan	Positif dua tahun berturut-turut
<i>Return on Asset</i> (ROA)	Positif, terlebih jika di atas 20%
<i>Return on Equity</i> (ROE)	Positif

Sumber: Infobank April 2011

Majalah Infobank menganalisis perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang layak mendapatkan kredit berdasarkan perhitungan *debt to equity ratio* (DER), *return on asset* (ROA), dan *return on equity* (ROE) perusahaan

tersebut pada periode 2010. Menurut majalah Infobank, perusahaan yang layak mendapatkan kredit adalah perusahaan yang memiliki DER di bawah 2,35 kali, yakni perbandingan dari 70% utang (kewajiban) dan 30% modal. Makin kecil rasio ini, makin dilihat baik. Hal ini mencerminkan bahwa emiten memiliki kemampuan dalam mengelola pinjamannya, khususnya dalam pengembalian pinjaman. Modal dan laba dua tahun berturut-turut yang positif juga penting sebagai penentu kelayakan diberikan kredit bank. Selain itu, ROA dan ROE harus positif untuk melihat kemampuan perusahaan mencapai laba. ROA yang positif menjadikan perusahaan dapat dipercaya, terlebih jika di atas 20%. Selain itu, mungkin terdapat perusahaan yang memiliki DER di atas 2,35 kali tetapi masih dianggap layak mendapatkan kredit disebabkan beberapa alasan, antara lain sektor usaha yang bagus dan risiko kredit yang dinilai oleh bank masih tergolong rendah.

3.2.2 Variabel Independen

3.2.2.1 Variabel Utama

3.2.2.1.1 Skor Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit

Variabel independen dalam penelitian ini adalah skor efektivitas dewan komisaris dan komite audit. Skor efektivitas dewan komisaris dan komite audit ini diperoleh berdasarkan daftar pertanyaan (*checklist*) yang berasal dari penelitian Hermawan (2009). Daftar pertanyaan tersebut disusun berdasarkan karakteristik yang dianggap dapat meningkatkan efektivitas dewan komisaris dan komite audit, yaitu independensi, aktivitas, jumlah anggota (*size*), dan kompetensi. Tidak semua sampel mengungkapkan seluruh data yang berkaitan dengan daftar pertanyaan (*checklist*), tetapi seluruh sampel dihitung skornya. *Checklist* pada penelitian ini menghitung skor efektivitas dewan komisaris dan komite audit pada tahun 2010 yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan tahun 2010. Seluruh pertanyaan memiliki 2-3 penilaian, yaitu hanya *good* dan *poor*, atau *good*, *fair*, dan *poor*. Daftar pertanyaan (*checklist*) skor dewan komisaris dan komite audit serta metode penetapan nilai sesuai dengan penelitian Hermawan (2009) dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2. Skor dari dewan komisaris dan komite audit akan dibagi dengan skor maksimum dari dewan komisaris

dan komite audit, yaitu 51 dan 33. Untuk menguji keandalan dari pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam *checklist* skor dewan komisaris dan komite audit, dilakukan pengujian *Cronbach Alpha* atas hasil *checklist* yang telah diperoleh.

3.2.2.1.2 Arus Kas dari Aktivitas Operasional

Variabel independen lain yang digunakan pada penelitian ini adalah arus kas dari aktivitas operasional. Cheng *et al.* (1997), arus kas yang berasal dari aktivitas operasional merupakan indikator yang lebih *reliable* sebagai pengukur kinerja perusahaan dibandingkan *reported earning*. Perhitungan arus kas dari aktivitas operasional tidak dipengaruhi oleh akun-akun akrual dan yang ditangguhkan serta dapat mengeliminasi sumber-sumber manipulasi akuntansi. Pada penelitian ini, arus kas yang digunakan adalah arus kas dari aktivitas operasional tahun 2010. Pada penelitian ini arus kas dari aktivitas operasional yang akan dibagi dengan *market value of equity at the beginning of the year*. *Market value of equity at beginning of the year* menggunakan harga saham pada akhir tahun 2009. Harga saham akhir tahun 2009 digunakan sebagai pengukur harga saham awal tahun 2010.

$$CFFO = \frac{\text{Arus Kas dari Aktivitas Operasional Akhir Periode}}{\text{Shares Outstanding Akhir Periode} \times \text{Share Closing Price Awal Periode}}$$

3.2.2.1.3 Peluang Pertumbuhan

Sejalan dengan penelitian Myers (1997), nilai perusahaan yang tinggi dapat dilihat dari peluang pertumbuhan yang tinggi pula. Gul dan Tsui (1998), Gaver dan Gaver (1993), Skinner (1993) menggunakan *market value* untuk menangkap nilai dari perusahaan tersebut. Untuk mengukur peluang pertumbuhan perusahaan tersebut, penelitian ini menggunakan salah satu variabel yang berasal dari Gul dan Tsui (1998), yaitu *market to book value of equity*.

$$MBV = \frac{\text{Shares Outstanding Akhir Periode} \times \text{Share Closing Price Akhir Periode}}{\text{Total Equity Akhir Periode}}$$

3.2.2.2 Variabel Kontrol

3.2.2.2.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan tidak hanya menunjukkan seberapa besar kecilnya suatu perusahaan, tetapi juga kemampuan suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya sehingga dapat meningkatkan penjualan dan laba bagi perusahaannya. Penggunaan total aset pada penghitungan ukuran perusahaan karena total aset yang ada pada perusahaan merupakan suatu modal bagi perusahaan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan mendanai investasi atau proyek yang menguntungkan. Perusahaan yang besar juga cenderung memberikan informasi lebih lanjut karena adanya permintaan investor akan informasi, biaya rata-rata yang lebih rendah untuk dalam pengumpulan dan penyebaran informasi (Hossan *et al.*, 1995 dalam Anggarini, 2010). Pengukuran ukuran perusahaan dilakukan dengan logaritma natural dari total aset tahun 2010 mengikuti penelitian Firth *et al.* (2009). Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan diharapkan semakin mempunyai kemampuan dalam melunasi kewajiban di masa depan, sehingga perusahaan dapat menghindari permasalahan keuangan (Storey, 1994).

$SIZE = LN(\text{Total Aset})$ pada Akhir Periode

3.2.2.2.2 Umur Perusahaan

Umur perusahaan menunjukkan berapa lama perusahaan menjalankan perusahaannya, bersaing dengan perusahaan lain, bertahan hidup, dan dapat menghasilkan keuntungan dari kegiatan bisnisnya. Umur perusahaan diukur sejak *initial public offering* (IPO) yang dilakukan perusahaan hingga tahun 2010. Penelitian ini menggunakan tanggal IPO karena tanggal tersebut merupakan tanggal perusahaan berubah menjadi perusahaan *go public* yang berusaha mendapatkan pendanaan eksternal melalui penerbitan dan penjualan saham dan wajib menerbitkan laporan keuangan untuk investor yang ada di pasar modal. Perusahaan yang berumur lebih tua akan dinilai lebih baik oleh bank (Firth *et al.*, 2009). Semakin tua umur perusahaan maka diharapkan perusahaan tersebut lebih mampu mengelola perusahaannya dan membuat bank lebih percaya sehingga bersedia memberikan kredit.

3.3 Populasi dan Sampel

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran apakah efektivitas dewan komisaris dan komite audit, arus kas dari aktivitas operasional, dan peluang pertumbuhan memiliki pengaruh terhadap probabilita kelayakan pemberian kredit perbankan pada perusahaan-perusahaan yang tercatat pada BEI. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar atau *listing* di BEI tahun 2010. Penelitian ini menggunakan data *cross sectional*, yaitu mengamati banyak variabel dari banyak perusahaan dalam satu tahun. Sementara itu, sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 215 sampel perusahaan yang terdaftar di BEI. Pengambilan sampel menggunakan metode *nonprobability sampling*, yaitu *purposive sampling*, dimana pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang dapat dipenuhi sampel-sampel dalam penelitian ini. Kriteria-kriteria tersebut adalah:

- Perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia sebelum tahun 2010.
- Perusahaan yang bergerak di berbagai sektor kecuali sektor keuangan karena sektor keuangan memiliki regulasi dan pelaporan keuangan yang berbeda dengan sektor non-keuangan.
- Perusahaan yang menyediakan laporan tahunan dan laporan keuangan 2010 dengan periode pelaporan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yaitu:

1. Data mengenai dewan komisaris dan komite audit diperoleh dari laporan tahunan 2010 perusahaan yang tersedia di *website* perusahaan tersebut, *google*, *website* BEI, yaitu www.idx.co.id, dan Pusat Data Ekonomi dan Bisnis FEUI.
2. Data mengenai arus kas dari aktivitas operasional, total aset, total ekuitas, dan jumlah saham yang beredar diperoleh dari laporan keuangan perusahaan 2010 yang juga tersedia di *website* perusahaan tersebut, *google*, *website* BEI, yaitu www.idx.co.id, dan Pusat Data Ekonomi dan Bisnis FEUI.

3. Data harga saham untuk setiap tanggal 31 Desember 2009 dan 2010 yang juga digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui *website yahoo finance*, yaitu www.yahoofinance.com.

Penelitian ini menggunakan data laporan tahunan dan laporan keuangan 2010. Pemilihan periode 2010 ini agar data yang digunakan lebih merepresentasikan kondisi pasar saat ini. Metode pemilihan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana mengumpulkan data-data secara langsung yang menjadi variabel penelitian dari laporan tahunan perusahaan. Selanjutnya, data-data tersebut akan diolah dengan menggunakan *software* Microsoft Excel dan SPSS 18.0.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Uji Validitas Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit

Untuk menguji validitas dari skor dewan komisaris dan komite audit, dilakukan penilaian *Cronbach's coefficient alpha* seperti yang dilakukan Hermawan (2009) pada penelitiannya. *Cronbach's coefficient alpha* adalah suatu pengujian yang memadai untuk menilai konsistensi internal dari skor dewan komisaris dan komite audit. Menurut Sekaran dan Bougie (2010), jika variabel memiliki nilai *Cronbach's coefficient alpha* antara 0,5-0,7, dapat disimpulkan bahwa nilai *reliabilitas* skor efektivitas dewan komisaris dan komite audit dalam penelitian ini rendah. Apabila nilai *Cronbach's coefficient alpha* antara 0,7-0,8, skor efektivitas dewan komisaris dan komite audit dalam penelitian ini dapat cukup diandalkan (*reliable*) dan valid. Nilai *reliabilitas* dari skor efektivitas dewan komisaris dan komite audit dalam penelitian ini sangat tinggi apabila nilai *Cronbach's coefficient alpha* lebih dari 0,8.

3.5.2 Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi dari variabel-variabel yang ada pada penelitian ini. Selain itu, analisis statistik deskriptif dilakukan untuk melihat kewajaran,

persebaran, dan karakteristik dari data-data yang digunakan dalam penelitian ini (Sekaran dan Bougie, 2010).

3.5.3 Analisis Korelasi

Penelitian ini menggunakan analisis korelasi *Pearson*, yaitu analisis yang dilakukan untuk melihat asosiasi atau hubungan antara dua variabel. Apabila suatu variabel mempengaruhi variabel yang lain, maka kedua variabel tersebut dianggap memiliki hubungan. Jika tidak ada pengaruh antar variabel tersebut, maka variabel tersebut disebut independen. Jika koefisien korelasi $\neq 0$, maka terdapat ketergantungan antara kedua variabel. Jika koefisien korelasi = 1, disebut korelasi positif, yaitu adanya korelasi searah sempurna atau kedua variabel bergerak bersama-sama. Jika koefisien korelasi = -1, disebut korelasi negatif, yaitu adanya korelasi tidak searah yang sempurna atau kedua variabel bergerak berkebalikan. Jika koefisien korelasi *Pearson* bernilai 0,9 atau lebih, maka terdapat korelasi antara variabel-variabel tersebut (Sekaran dan Bougie, 2010). Korelasi atau hubungan tersebut menyebabkan apabila salah satu variabel berubah, maka variabel yang berkorelasi juga ikut berubah. Apabila koefisien korelasi *Pearson* mendekati nilai atau kurang dari 0,9, maka terdapat indikasi bahwa variabel-variabel tersebut berkorelasi atau berhubungan.

3.5.4 Analisis Regresi Logistik

Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik dengan menggunakan SPSS versi 18.0. Uji ini dilakukan ketika variabel dependen merupakan variabel dikotomi (Nachrowi, 2005). Variabel dikotomi biasanya terdiri dari dua nilai, yaitu angka 1 dan 0, dimana nilai tersebut mewakili munculnya suatu kejadian atau tidak. Contoh dari variabel dikotomi adalah kalah atau menang, layak atau tidak layak, dan lain-lain. Regresi logistik adalah suatu pendekatan dari model matematika yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara beberapa variabel independen dengan variabel dependen yang memiliki nilai dikotomus, yaitu 1 dan 0 (Gujarati, 2003). Teknik analisis ini tidak memerlukan uji normalitas dan uji asumsi klasik pada

variabel bebasnya (Ghozali, 2005). Model logistik lebih layak digunakan karena lebih menjamin suatu probabilitas terletak antara 0 dan 1. Apabila penelitian ini menggunakan variabel regresi sederhana atau *Ordinary Least Square* (OLS), sampel yang digunakan pada penelitian ini tidak terdistribusi dengan normal, memunculkan variansi yang sangat besar, dan *R-square* tidak dapat digunakan sebagai ukuran yang baik atau *Goodness of Fit*.

Model logistik digunakan untuk melihat hubungan kemungkinan perusahaan layak mendapatkan kredit dari perbankan dengan efektivitas dewan komisaris dan komite audit, arus kas dari aktivitas operasional, dan peluang pertumbuhan pada periode 2010. Variabel terikat yang digunakan merupakan variabel dikotomi, yaitu apakah perusahaan tersebut layak atau tidak mendapatkan kredit dari perbankan. Variabel bebas yang digunakan dalam model ini adalah skor dewan komisaris dan komite audit, arus kas dari aktivitas operasional, dan peluang pertumbuhan. Sementara itu, variabel kontrol dari penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan umur perusahaan. Untuk menguji apakah nilai sampel dari probabilitas kelayakan mendapatkan kredit dari bank dengan nilai prediksi model regresi dalam penelitian ini sudah tepat, dilakukan pengujian log *odd* (Nachrowi, 2005). Model log *odd* adalah:

$$\ln\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right) = \beta_0 + \beta_1 \text{BOARDSCORE}_i + \beta_2 \text{AUDCOMMSCORE}_i + \beta_3 \text{CFFO}_i + \beta_4 \text{GROWTHOPP}_i + \beta_5 \text{SIZE}_i + \beta_6 \text{AGE}_i$$

$$\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right) = e^{\beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 X_{4i} + \beta_5 X_{5i} + \beta_6 X_{6i}}$$

$$P_i = \frac{1}{1 + e^{-\beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 X_{4i} + \beta_5 X_{5i} + \beta_6 X_{6i}}}$$

Pada model ini, penelitian ini mencari nilai P. Apabila nilai P sama atau lebih dari 0,5, maka nilai prediksi dan nilai sampel probabilitas kelayakan mendapatkan

kredit yang dilakukan pada penelitian ini sama. Model regresi pada penelitian ini memprediksi nilai probabilita mendapatkan kredit sudah benar. Apabila nilai P di bawah 0,5, maka nilai prediksi probabilita mendapatkan kredit pada penelitian ini tidak sama dengan hasil regresi model pada penelitian ini, sehingga prediksi yang telah dilakukan di luar model regresi ini dianggap salah.

3.5.4.1 Pengujian *Goodness of Fit (Hosmer and Lemeshow Test)*

Uji *Goodness of fit* adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji ketepatan atau kecukupan data pada model regresi logistik. Uji *Goodness of fit* dapat dilihat dari *Hosmer and Lemeshow Test*, dimana nilai probabilita yang digunakan pada penelitian ini adalah sebesar 0,05 (Nachrowi, 2005). Dengan demikian, apabila diperoleh hasil uji yang tidak signifikan berarti tidak terdapat perbedaan antara data estimasi model regresi logistik dengan data sampel. Hipotesis untuk menilai kelayakan model adalah:

H_0 : Model regresi logistik fit dengan data.

H_1 : Model regresi logistik tidak fit dengan data.

Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test digunakan untuk menguji hipotesis nol (H_0), bahwa model dapat dikatakan fit dengan data atau model regresi menunjukkan kecukupan data. Menurut Nachrowi (2005), dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai dari *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test Statistik* sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol (H_0) ditolak yang berarti model tidak dapat dikatakan fit dengan data atau model regresi tidak menunjukkan kecukupan data model sehingga model tersebut tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai sampelnya. Jika *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test Statistik* lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol (H_0) diterima dan berarti model dapat dikatakan fit dengan data atau model regresi menunjukkan kecukupan data model. Model tersebut dikatakan mampu memprediksi nilai sampelnya.

3.5.4.2 Pengujian Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test*)

Dalam menilai *overall fit model*, dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain *Chi Square* (χ^2). Tes statistik *chi square* (χ^2) digunakan berdasarkan pada fungsi *likelihood* pada estimasi model regresi (Nachrowi, 2005). *Likelihood* (L) dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. L ditransformasikan menjadi $-2\log L$ untuk menguji hipotesis nol dan alternatif. Penggunaan nilai χ^2 untuk keseluruhan model terhadap data dilakukan dengan membandingkan nilai $-2 \log likelihood$ awal (hasil *block number* 0) dengan nilai $-2 \log likelihood$ hasil *block number* 1 (Nachrowi, 2005). Dengan kata lain, nilai *chi square* didapat dari nilai $-2\log L_1 - 2\log L_0$. Apabila terjadi penurunan, maka model tersebut menunjukkan model regresi yang baik (Nachrowi, 2005).

3.5.4.3 Pengujian Simultan (*Omnibus Test of Model Coefficient*)

Pengujian simultan dilakukan untuk melihat hasil signifikansi dari keseluruhan variabel independen pada penelitian ini terhadap variabel dependennya. Pengujian ini ingin melihat apakah variabel-variabel independen pada penelitian ini berpengaruh terhadap variabel dependennya. Jika nilai probabilita pada *Omnibus Test of Model Coefficient* sama atau lebih besar dari 0,05 maka variabel-variabel independen pada penelitian ini berpengaruh terhadap variabel dependen, dan sebaliknya (Nachrowi, 2005).

3.5.4.4 Koefisien Determinasi (*Model Summary*)

Model summary adalah suatu pengujian yang digunakan untuk melihat estimasi variasi dari variabel independen terhadap variabel dependennya atau perubahan yang terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh perubahan yang terjadi pada variabel-variabel independennya. *Model Summary* pada regresi logistik sama dengan pengujian *R square* (R^2) pada persamaan regresi linier, dimana nilai tersebut antara 0 hingga 1, dimana yang bernilai 1 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. *Model Summary* pada regresi logistik dapat dilihat dari nilai *Nagelkerke R square* (Nachrowi, 2005).

Nagelkerke R square merupakan modifikasi dari koefisien *Cox and Snell R square* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1 (Ghozali, 2005). Apabila nilai *Nagelkerke R square* bernilai 0,8, maka variabel-variabel independen pada penelitian ini menjelaskan 0,8 atau 80% variabel dependennya. Semakin tinggi nilai *Nagelkerke R square*, maka semakin kuat hubungan variabel dependen dengan variabel-variabel independennya.

3.5.4.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis berguna untuk melihat apakah variabel-variabel independen yang diteliti pada penelitian ini berpengaruh atau tidak secara signifikan terhadap variabel dependen pada penelitian ini. Pengujian hipotesis dapat dilihat dari uji *Wald*. Pada pengujian *Wald*, dapat dilihat nilai beta korelasi dari masing-masing variabel independen dan konstanta yang digunakan untuk membuat model regresi logistik, serta nilai signifikansi atau probabilitas dari masing-masing variabel. Jika nilai signifikansi pada uji *Wald* lebih kecil dari atau sama dengan 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel independen pada penelitian ini berpengaruh terhadap variabel dependen pada penelitian ini (Nachrowi, 2005). Begitu pula sebaliknya, apabila nilai signifikansi variabel independen tersebut lebih besar dari 0,05, disimpulkan bahwa variabel independen tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4.6 Pengujian Akurasi Model

Pengujian akurasi model dilakukan untuk menunjukkan seberapa baik hasil prediksi model dan sebagai ukuran dari akurasi model. Pengujian akurasi model dapat dilakukan dengan melihat *classification table*. *Classification table* menghitung nilai estimasi yang benar (*correct*) dan salah (*incorrect*). Pada kolom terdapat dua nilai prediksi dari variabel dependen dalam yaitu layak mendapatkan kredit (1) dan tidak layak mendapatkan kredit (0), sedangkan pada baris menunjukkan nilai sampel sesungguhnya dari variabel dependen (Nachrowi, 2005).

BAB 4

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan perusahaan-perusahaan non-keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 sebagai populasi penelitian ini. Hal ini dikarenakan regulasi dan pelaporan keuangan pada perusahaan keuangan dan non-keuangan berbeda. Jumlah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 421 perusahaan baik keuangan dan non-keuangan, sedangkan perusahaan non-keuangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia sebanyak 351 perusahaan. Penelitian ini hanya menggunakan 215 perusahaan sebagai sampel karena terdapat beberapa hambatan, seperti perusahaan yang *delisting* pada tahun 2010, tidak menerbitkan atau mempublikasikan laporan tahunan atau laporan keuangan 2010 baik pada *website* perusahaan itu sendiri, *website* BEI, maupun *google*, baru tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 sehingga harga saham akhir tahun 2009 tidak tersedia, dan harga saham pada akhir tahun 2009 dan 2010 dari beberapa perusahaan yang sudah *listing* sebelum tahun 2010 tidak tersedia pada *yahoo finance* dikarenakan tidak adanya perdagangan saham yang dilakukan oleh perusahaan tersebut atau disebut “saham tidur”. Hambatan dan batasan tersebut yang membuat beberapa perusahaan tidak dapat digunakan sebagai sampel pada penelitian ini.

Pada tabel 4.1 akan dijelaskan deskripsi sampel penelitian sehingga penelitian ini menggunakan 215 perusahaan non-keuangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia dikarenakan berbagai hambatan atau batasan yang terjadi selama pemilihan sampel penelitian.

Tabel 4.1 Deskripsi Sampel Penelitian

Deskripsi Sampel Penelitian	Jumlah
Perusahaan yang tercatat pada BEI tahun 2010	420
Perusahaan keuangan yang tercatat pada BEI tahun 2010	(70)
Perusahaan non-keuangan yang tercatat pada BEI tahun 2010	350
Laporan keuangan dan laporan tahunan 2010 yang tidak berhasil diperoleh	(104)
Perusahaan yang baru tercatat pada BEI pada pertengahan tahun 2010	(18)
Perusahaan yang harga saham akhir tahun 2009 dan 2010 tidak tersedia pada <i>yahoo finance</i>	(13)
Total sampel perusahaan non-keuangan pada penelitian ini	215

Pada tabel 4.2 akan dijelaskan rincian atau distribusi sampel yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan pada sektor industrinya, kecuali keuangan dan perbankan.

Tabel 4.2 Distribusi Sampel Perusahaan Berdasarkan Sektor Industri

No.	Sektor Industri	Jumlah	Persentase
1	Aneka Industri	20	9,30%
2	Industri Barang Konsumsi	12	5,58%
3	Industri Dasar dan Kimia	28	13,02%
4	Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi	24	11,16%
5	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	66	30,70%
6	Pertambangan	19	8,84%
7	Pertanian	10	4,65%
8	Properti, <i>Real Estate</i> , dan Konstruksi Bangunan	36	16,74%
	Jumlah Sampel	215	100%

Jika dilihat dari tabel 4.2, penelitian ini lebih banyak menggunakan sampel yang bergerak di sektor perdagangan, jasa, dan investasi, yaitu sebesar 30,70% dari keseluruhan sampel. Hal ini disebabkan perusahaan yang tercatat di BEI dominan bergerak di sektor tersebut. Penelitian ini juga lebih sedikit menggunakan sampel

yang bergerak di sektor pertanian karena terbatasnya perusahaan yang tercatat di BEI yang bergerak di sektor pertanian. Tidak terlalu banyak perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, hanya berjumlah 14 perusahaan. Hal tersebut yang menyebabkan penelitian ini hanya menggunakan 10 perusahaan atau 4,65% dari keseluruhan sampel. Pada sektor industri dasar dan kimia, terdapat 62 perusahaan yang terdapat di BEI, tetapi penelitian ini hanya berhasil mendapatkan 28 perusahaan saja. Sama halnya dengan perusahaan di sektor industri barang konsumsi, dari 34 perusahaan yang tercatat di BEI, hanya 12 perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan ketidakberhasilan dalam mendapatkan laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan-perusahaan tersebut. Banyak sekali laporan dari perusahaan tersebut yang tidak tersedia di *website* perusahaan, *website* BEI, maupun *google*.

Tabel 4.3 Distribusi Sampel Berdasarkan Probabilita Pemberian Kredit Bank

Deskripsi	Jumlah Sampel	Persentase
Perusahaan yang dianggap layak mendapatkan kredit bank	137	63,72%
Perusahaan yang dianggap kurang layak mendapatkan kredit bank	78	36,28%
Jumlah Sampel	215	100,00%

Sumber: Infobank April 2011

Pada tabel 4.3 dapat dilihat distribusi sampel berdasarkan probabilita pemberian kredit. Jika dilihat dari tabel di atas, penelitian ini lebih banyak menggunakan sampel yang dianggap Infobank layak mendapatkan kredit bank. Dari 203 perusahaan yang tercatat di BEI yang dianggap Infobank layak mendapatkan kredit, 137 perusahaan tersebut digunakan dalam penelitian ini. Sementara itu, sampel yang dianggap kurang layak mendapatkan kredit bank berjumlah 78 sampel atau 36,28% dari keseluruhan sampel.

4.2 Uji Validitas Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit

Cronbach's coefficient alpha adalah suatu pengujian yang memadai untuk menilai konsistensi internal dari skor dewan komisaris dan komite audit. Hasil dari *Cronbach's coefficient alpha* dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4 Reliability Statistics

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	No. of Items
Skor Dewan Komisaris	0,497	17
Skor Komite Audit	0,723	11

Dari hasil tabel di atas, dapat dilihat nilai *Cronbach's coefficient alpha* dari skor dewan komisaris dan komite audit. Nilai *Cronbach's coefficient alpha* dari skor dewan komisaris mendekati 0,5 sehingga *reliabilitas* dari skor dewan komisaris rendah (Sekaran dan Bougie, 2010). Sementara untuk skor komite audit, skor tersebut mendapatkan nilai *Cronbach's coefficient alpha* lebih dari 0,7, yaitu 0,723 melebihi nilai *Cronbach's coefficient alpha* dari skor dewan komisaris. Nilai tersebut diantara 0,7-0,8, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini skor komite audit *reliable* dan valid (Sekaran dan Bougie, 2010).

4.3 Analisis Variabel Model Penelitian

Tabel ini menjelaskan analisis deskriptif masing-masing variabel yang digunakan pada penelitian ini, baik variabel independen, dependen, maupun kontrol. Variabel dependen pada penelitian ini adalah probabilita kelayakan kredit dari perbankan (PROBCREDIT). Variabel independen pada penelitian ini adalah skor efektivitas dewan komisaris (BOARDSCORE), skor efektivitas komite audit (AUDCOMMScore), arus kas dari aktivitas operasional (CFFO), dan peluang pertumbuhan (GROWTHOPP), sedangkan variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini adalah ukuran perusahaan (SIZE) dan umur perusahaan (AGE). Analisis deskriptif ini menjelaskan nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi dari masing-masing variabel dependen, independen, dan kontrol dari

penelitian ini. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk melihat kewajaran dan karakteristik dari data-data yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, untuk melihat penyebaran data dari masing-masing variabel pada penelitian ini.

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif

Variables	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
PROBCREDIT	0	1	0,6400	0,4820
BOARDSCORE	21	44	34,5800	4,6400
AUDCOMMSCORE	11	31	21,6000	4,8610
CFFO (Rp)	-2.208.637 jt	34.335.836 jt	627.920 jt	2.680.429 jt
GROWTHOPP	-17,9444	20,3410	2,1194	3,7425
SIZE (Rp)	3.062 jt	112.857.000 jt	6.153.529 jt	13.577.105 jt
AGE (tahun)	1	31	12,3300	7,0510

Jumlah Sampel 215, dengan melakukan *winsorized* untuk menghilangkan *outlier* berdasarkan batas 3 standar deviasi dari nilai *mean*. *Winsorized* dilakukan pada variabel CFFO dan GROWTHOPP. PROCREDIT= 1 probabilita pemberian kredit oleh bank pada perusahaan i, yang merupakan variabel dikotomi atau *dummy* dengan nilai 1 apabila perusahaan i dinyatakan layak diberikan kredit oleh bank dan 0 apabila lainnya, BOARDSCORE= total skor efektivitas dewan komisaris pada perusahaan i, AUDCOMMSCORE= total skor efektivitas komite audit pada perusahaan i, CFFO= arus kas dari aktivitas operasional pada perusahaan i yang dibagi dengan nilai pasar ekuitas pada awal tahun, GROWTHOPP= peluang pertumbuhan pada perusahaan i yang diukur melalui *market to book value of equity* pada akhir tahun, SIZE= ukuran perusahaan berdasarkan logaritma natural total aset perusahaan i pada akhir tahun, AGE= umur perusahaan i sejak IPO sampai periode penelitian.

Pada tabel di atas, diketahui bahwa penelitian ini menggunakan 215 sampel. Pada probabilita kredit, variabel dependen pada penelitian ini, nilai minimum dari variabel ini adalah 0 dan nilai maksimum dari variabel ini adalah 1. Hal ini dikarenakan variabel dependen pada penelitian ini, probabilita kredit merupakan variabel dikotomi atau *dummy* yang hanya terdiri dari 2 nilai, 1 dan 0. Nilai *mean* dari probabilita kredit ini menunjukkan terdapat 64% dari seluruh perusahaan pada penelitian ini yang dianggap layak mendapatkan kredit dan sisanya dianggap kurang layak untuk mendapatkan kredit.

Analisis deskriptif untuk skor dewan komisaris dan komite audit akan dijelaskan pada tabel berikutnya. Jika dilihat dari nilai minimum CFFO, masih terdapat perusahaan yang memiliki arus kas dari aktivitas operasional bernilai minus. Masih ada beberapa perusahaan pada penelitian ini yang kurang mampu mengolah aktivitas operasionalnya dengan baik dan kurang mampu menghasilkan kas. Hal ini mungkin disebabkan banyak perusahaan yang melakukan penjualan tetapi memberikan piutang sehingga laba mereka positif tetapi arus kasnya negatif. Hal ini menunjukkan bahwa risiko perusahaan tersebut tinggi, seperti piutang tak tertagih. Risiko yang tinggi ini akan berdampak bagi kemampuan perusahaan menghasilkan kas dan membayar kewajibannya, baik bagi pemegang saham maupun kreditur. Rata-rata CFFO pada penelitian ini Rp 627.920 juta. Nilai tersebut masih di bawah rata-rata maksimum (nilai maksimum CFFO dibagi 2). Hal ini menunjukkan bahwa arus kas aktivitas operasional pada perusahaan tidak terlalu tinggi, bahkan cenderung rendah.

Selain itu, untuk variabel GROWTHOPP, terdapat perusahaan yang peluang pertumbuhannya minus dan rata-rata peluang pertumbuhan perusahaan hanya sekitar 2,11. Hal ini disebabkan karena beberapa perusahaan pada penelitian ini memiliki ekuitas negatif. Sesuai dengan penelitian dari Myers (1977), yang menyatakan bahwa nilai suatu perusahaan dapat dilihat dari peluang pertumbuhan perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan nilai perusahaan pada penelitian tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 2,11, dan jauh dari nilai maksimum GROWTHOPP.

Untuk ukuran perusahaan, rata-rata ukuran perusahaan pada penelitian ini tidak terlalu besar karena nilai rata-rata SIZE rendah. Nilai *mean* dari ukuran perusahaan adalah Rp 6.153.529 juta, tidak melebihi setengah dari nilai maksimum Rp 112.857.000 juta. Sementara untuk umur perusahaan (*age*), variabel ini memiliki *mean* 12,33 yang juga tidak melebihi setengah dari nilai maksimum 31. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pada penelitian ini dominan belum terlalu lama tercatat di BEI, bahkan ada perusahaan yang baru 1 tahun tercatat di BEI.

Pada tabel 4.6 akan dijelaskan jumlah pertanyaan untuk setiap kategori skor dewan komisaris, yaitu independensi, aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi, serta statistik deskriptif untuk setiap hasil skor masing-masing kategori pada skor dewan komisaris.

Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Skor Dewan Komisaris

Kategori	Jumlah Pertanyaan	Minimum	Maksimum	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Independensi	6	6	16	10,18	2,157
Aktivitas	6	6	18	14,02	2,493
Jumlah Anggota	1	1	3	1,88	,993
Kompetensi	4	4	12	8,50	1,691
Total Skor	17	21	44	34,58	4,640

Setiap pertanyaan pada setiap kategori dapat memperoleh nilai minimum 1 (*poor*) dan nilai maksimum 3 (*good*). Untuk kategori independensi, nilai minimum yang dapat diperoleh adalah 6 (6 pertanyaan dikalikan nilai 1) dan nilai maksimum yang dapat diperoleh adalah 18 (18 pertanyaan dikalikan nilai 3). Untuk kategori aktivitas, nilai minimum yang dapat diperoleh adalah 6 (6 pertanyaan dikalikan nilai 1) dan nilai maksimum yang dapat diperoleh adalah 18 (18 pertanyaan dikalikan nilai 3). Untuk kategori jumlah anggota, nilai minimum yang dapat diperoleh adalah 1 (1 pertanyaan dikalikan nilai 1) dan nilai maksimum yang dapat diperoleh adalah 3 (1 pertanyaan dikalikan nilai 3). Untuk kategori kompetensi, nilai minimum yang dapat diperoleh adalah 4 (4 pertanyaan dikalikan nilai 1) dan nilai maksimum yang dapat diperoleh adalah 12 (4 pertanyaan dikalikan nilai 3).

Dari tabel 4.6, disajikan statistik deskriptif untuk setiap kategori skor dewan komisaris. Dapat dilihat, terdapat 6 pertanyaan untuk kategori independensi, 6 pertanyaan untuk kategori aktivitas, 1 pertanyaan untuk kategori jumlah anggota, dan 4 pertanyaan untuk kategori kompetensi. Untuk kategori independensi, diperoleh nilai minimum 6 dan maksimum 16. Dari nilai minimum 6 tersebut, dapat terlihat bahwa masih ada perusahaan yang mendapatkan skor minimum 1 (*poor*) untuk masing-masing pertanyaan dalam kategori independensi sehingga hanya memperoleh skor 6 untuk kategori independensi. Nilai rendah ini menunjukkan bahwa masih ada perusahaan yang memiliki dewan komisaris yang rendah dalam hal independensi. Serupa dengan kategori independensi, pada kategori aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi masih terdapat skor total yang menunjukkan bahwa masih ada perusahaan yang menerima skor 1 (*poor*) untuk semua pertanyaan pada masing-masing kategori tersebut.

Jika dilihat dari nilai maksimum masing-masing kategori, tiga kategori selain independensi memperoleh nilai maksimum apabila semua pertanyaan pada setiap kategori mendapat nilai 3 (*good*), yaitu 18 untuk kategori aktivitas, 3 untuk kategori jumlah anggota, dan 12 untuk kategori kompetensi. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa perusahaan memiliki dewan komisaris yang melakukan aktivitas secara efektif, memiliki jumlah anggota yang efektif, dan kompeten sebagai seorang komisaris. Akan tetapi, belum ada perusahaan pada sampel penelitian ini yang sudah memiliki dewan komisaris yang sangat independen.

Apabila dilihat, total pertanyaan pada skor dewan komisaris adalah 17 sehingga nilai minimum dan maksimum dari semua pertanyaan tersebut adalah 17 (17 pertanyaan dikalikan dengan nilai 1) dan 51 (17 pertanyaan dikalikan dengan nilai 3). Jika dilihat nilai minimum yang diperoleh dari skor dewan komisaris penelitian ini, terdapat perusahaan yang memiliki skor 21, dimana nilai tersebut lebih tinggi dari skor 17. Sementara itu, belum ada perusahaan yang menerima nilai 3 (*good*) untuk semua pertanyaan pada skor dewan komisaris. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari seluruh sampel pada penelitian ini, ada perusahaan yang memiliki dewan komisaris yang kurang efektif karena memperoleh skor yang rendah, yaitu 21 dan ada yang memiliki dewan komisaris yang sudah cukup efektif, karena memperoleh skor yang cukup tinggi, yaitu 44.

Nilai *mean* dan standar deviasi untuk kategori independensi adalah 10,18. Untuk kategori ini, rata-rata yang diperoleh masih di bawah total nilai *fair*, yaitu 12 (6 pertanyaan dikalikan nilai 2). Sementara untuk kategori aktivitas, nilai *mean* yang diperoleh diperoleh di atas total nilai *fair* untuk kategori aktivitas, yaitu 12 (6 pertanyaan dikalikan nilai 2). Rata-rata tersebut cukup bagus karena beberapa perusahaan memiliki karakteristik yang cukup baik untuk kategori aktivitas. Untuk kategori yang ketiga, yaitu jumlah anggota, kategori ini memperoleh nilai *mean* 1,88. Nilai rata-rata tersebut tidak terlalu bagus karena di bawah total nilai *fair* untuk kategori jumlah anggota, yaitu 2. Hal ini mungkin disebabkan beberapa perusahaan

belum memiliki jumlah anggota yang efektif. Masih ada perusahaan yang hanya memiliki komisaris kurang dari lima orang anggota. Untuk kompetensi, nilai rata-rata tersebut di atas nilai 8, total nilai *fair* (4 pertanyaan dikalikan nilai 2) sehingga nilai untuk kategori kompetensi pada sampel perusahaan pada penelitian ini sudah cukup bagus. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris yang ada pada perusahaan sudah cukup kompeten dan layak menjabat sebagai komisaris dalam perusahaan tersebut, serta sudah memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang memadai. Pada total skor dewan komisaris, nilai rata-rata yang diperoleh sudah cukup bagus karena lebih dari 34 (17 pertanyaan dikalikan nilai 2), total nilai *fair* untuk skor dewan komisaris. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sampel atau perusahaan pada penelitian ini sebagian besar sudah memiliki dewan komisaris yang cukup efektif.

Tabel 4.7 akan menjelaskan statistik deskriptif dari 6 pertanyaan dari kategori independensi yang terdapat pada skor dewan komisaris.

Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Pertanyaan Kategori Independensi Dewan Komisaris

Pertanyaan*	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
1	1	3	2,07	,381
2	1	3	1,27	,685
3	1	3	1,49	,864
4	1	3	1,81	,835
5	1	3	1,52	,853
6	1	3	2,04	,880

*Daftar pertanyaan dapat dilihat pada lampiran 1

Selain itu, pada tabel 4.8 akan dijelaskan distribusi sampel berdasarkan nilai yang diperoleh pada setiap pertanyaan dari kategori independensi dewan komisaris.

Tabel 4.8 Distribusi Sampel Berdasarkan Nilai Kategori Independensi**Dewan Komisaris**

Pertanyaan*	<i>Good</i>	Persentase	<i>Fair</i>	Persentase	<i>Poor</i>	Persentase	Total	Persentase
1	23	10,70%	183	85,12%	9	4,19%	215	100%
2	29	13,49%	0	0,00%	186	86,51%	215	100%
3	53	24,65%	0	0,00%	162	75,35%	215	100%
4	58	26,98%	58	26,98%	99	46,05%	215	100%
5	51	23,72%	9	4,19%	155	72,09%	215	100%
6	87	40,47%	49	22,79%	79	36,74%	215	100%

*Daftar pertanyaan dapat dilihat pada lampiran 1

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan gambaran dari setiap pertanyaan pada kategori independensi dari dewan komisaris. Untuk pertanyaan pertama, dapat disimpulkan bahwa sampel sudah mematuhi ketentuan BEI untuk memiliki komisaris independen minimal 30% dari keseluruhan dewan komisaris. Hal ini dapat dilihat dari 85,12% dari sampel mendapatkan nilai *fair*, yaitu memiliki komisaris independen antara 30-50% dari keseluruhan dewan komisaris. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pada penelitian ini mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh BEI bahwa batas minimum jumlah komisaris independen 30% dari keseluruhan dewan komisaris. Persentase sampel yang mendapatkan nilai *fair* meningkat dari tahun 2006 dan 2007 pada penelitian yang dilakukan Hermawan (2009). Terdapat 10,70% dari sampel yang memiliki komisaris independen lebih dari 50% dari keseluruhan dewan komisaris sehingga mendapatkan nilai *good*. Akan tetapi, masih ada 4,19% dari sampel yang mendapatkan nilai *poor*, dimana proporsi komisaris independennya dalam dewan komisaris kurang dari 30%.

Pada pertanyaan kedua, dimana *chairman* pada dewan komisaris adalah komisaris independen, hanya 13,49% dari sampel yang komisaris utamanya merupakan komisaris independen, sedangkan 86,51% dari sampel memiliki komisaris utama yang bukan komisaris independen. Hal ini mungkin dikarenakan masih banyak sampel yang belum menyadari pentingnya independensi yang dimiliki oleh seorang komisaris utama dalam menjalankan tugasnya di perusahaan. Peran komisaris

independen sangat penting dalam posisi komisaris utama karena komisaris utama memiliki kewenangan dan berpengaruh lebih besar dalam pengambilan keputusan sehingga setiap keputusan yang diambil harus keputusan yang terbaik dan tidak meihak pada satu kepentingan. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya independensi dari komisaris utama dalam setiap menjalankan tugasnya di perusahaan terutama saat pengambilan keputusan.

Pada pertanyaan ketiga, terdapat 24,65% dari sampel yang menjelaskan definisi independensi pada laporan tahunannya. Akan tetapi, lebih banyak sampel yang tidak menjelaskan independensi pada laporan tahunannya. Dengan adanya definisi independensi pada laporan tahunan menunjukkan bahwa independensi merupakan hal yang penting yang harus ada dalam perusahaan, terutama untuk dewan komisaris. Terdapat 75.35% dari sampel tidak menjelaskan, ada kemungkinan bahwa independensi bukan hal yang penting bagi perusahaan tersebut sehingga tidak dijelaskan definisinya pada laporan tahunan perusahaan tersebut.

Banyak sekali sampel pada penelitian ini yang memiliki dewan komisaris yang juga bekerja pada perusahaan pemegang saham atau afiliasi. Hal tersebut dapat terlihat jelas, dimana terdapat 46,05% dari sampel yang memiliki 50% komisarisnya bekerja di perusahaan pemegang saham atau afiliasi atau tidak memberikan informasi dalam laporan tahunannya. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi anggota dewan komisaris yang bekerja di perusahaan pemegang saham atau afiliasi sangat besar dan dapat berakibat berkurangnya independensi dari anggota dewan komisaris tersebut. Efektivitas peran *monitoring* dewan komisaris dapat berkurang apabila perusahaan pemegang saham menunjuk orang yang bekerja pada perusahaan tersebut atau afiliasi untuk menjadi komisaris pada perusahaan yang dimilikinya.

Selain itu, masih banyak sampel yang belum memiliki komite nominasi dan remunerasi, dimana komite tersebut membantu dewan komisaris dalam pemilihan anggota, penggajian, dan tugas-tugas dewan komisaris lainnya. Hal tersebut terlihat

dari total sampel yang mendapat nilai *poor* pada pertanyaan kelima, yaitu sebesar 72,09% dari sampel. Hal ini mungkin disebabkan belum ada peraturan yang mewajibkan suatu perusahaan harus memiliki komite tersebut sehingga masih banyak perusahaan yang tidak memiliki komite tersebut. Ada 9 sampel atau 4,19% dari keseluruhan sampel yang memiliki salah satu dari komite nominasi dan remunerasi, dimana lebih banyak sampel yang memiliki komite remunerasi dibandingkan nominasi. Pada penelitian ini, dominan sampel memiliki rata-rata *tenure* atau lamanya menjabat sebagai dewan komisaris kurang dari 5 tahun. Pada umumnya, masa jabatan anggota dewan komisaris adalah 3-5 tahun. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 1998 bahwa masa jabatan adalah 5 (lima) tahun, khususnya untuk perusahaan perseroan.

Berikut ini adalah statistik deskriptif pertanyaan kategori aktivitas dewan komisaris yang akan menjelaskan bagaimana statistik dari enam pertanyaan pada kategori aktivitas dewan komisaris.

Tabel 4.9 Statistik Deskriptif Pertanyaan Kategori Aktivitas Dewan Komisaris

Pertanyaan*	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
7	1	3	2,81	,582
8	1	3	1,88	,828
9	1	3	2,07	,955
10	1	3	2,40	,921
11	1	3	2,55	,835
12	1	3	2,31	,952

*Daftar pertanyaan dapat dilihat pada lampiran 1

Tabel 4.10 menjelaskan distribusi sampel berdasarkan nilai yang diperoleh pada setiap pertanyaan dari kategori aktivitas dewan komisaris.

Tabel 4.10 Distribusi Sampel Berdasarkan Nilai Kategori Aktivitas Dewan Komisaris

Pertanyaan*	Good	Persentase	Fair	Persentase	Poor	Persentase	Total	Persentase
7	195	90,70%	0	0,00%	20	9,30%	215	100%
8	62	28,84%	65	30,23%	88	40,93%	215	100%
9	105	48,84%	19	8,84%	91	42,33%	215	100%
10	150	69,77%	0	0,00%	65	30,23%	215	100%
11	167	77,67%	0	0,00%	48	22,33%	215	100%
12	141	65,58%	0	0,00%	74	34,42%	215	100%

*Daftar pertanyaan dapat dilihat pada lampiran 1

Pertanyaan ketujuh mengenai penjelasan tanggung jawab dewan komisaris dalam laporan tahunannya, terdapat 9,30% dari sampel yang tidak menjelaskan tanggung jawab dewan komisaris pada laporan tahunan, sementara ada 90,70% dari sampel yang menjelaskan tanggung jawab dewan komisaris pada laporan tahunan secara lengkap dan jelas. Apabila perusahaan menjabarkan tanggung jawab dewan komisaris pada laporan tahunannya, menunjukkan bahwa ada kemungkinan terbesar dewan komisaris tersebut sudah menjalankan tanggung jawab yang telah dijelaskan pada laporan tahunan. Apabila perusahaan tidak menjelaskan tanggung jawab dewan komisaris menunjukkan bahwa dewan komisaris belum terlalu efektif dalam menjalankan tanggung jawabnya sehingga perusahaan tersebut enggan menjelaskan dalam laporan tahunan.

Sementara untuk jumlah rapat yang diselenggarakan oleh dewan komisaris, yaitu pertanyaan kedelapan, terdapat 40,93% dari sampel yang menyelenggarakan rapat dewan komisaris lebih dari 6 kali. Lebih banyak perusahaan yang telah menyelenggarakan rapat lebih dari 6 kali. Hal ini bagus karena menunjukkan bahwa semakin banyak rapat yang dilakukan oleh perusahaan, semakin efektif dewan komisaris menjalankan tugasnya dalam *monitoring* kinerja manajemen dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Untuk rapat dewan komisaris tersebut, kehadiran para anggota dewan komisaris sangat penting. Pada pertanyaan kesembilan, dapat terlihat bahwa sudah 48,84% dari sampel yang rapat dewan komisaris pada tahun 2010 dihadiri lebih dari 80% anggota dewan komisaris. Akan tetapi, persentase sampel yang mendapatkan nilai *good* dengan *poor* tidak memiliki perbedaan yang signifikan karena banyak juga sampel yang kurang dari 70% anggota dewan komisarisnya menghadiri rapat yang dilakukan sepanjang tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak dewan komisaris yang melakukan tugas pengawasan dalam perusahaan sebagai formalitas saja. Mereka tidak melakukan tugasnya dengan efektif.

Untuk pertanyaan kesepuluh, terdapat 150 sampel atau 69,77% dari sampel yang dimana dewan komisarisnya sudah melakukan tanggung jawabnya dalam mengevaluasi laporan keuangan perusahaan tahun 2010. 30,23% dari keseluruhan sampel tidak memberikan informasi apakah dewan komisarisnya sudah menjalankan tanggung jawab untuk mengevaluasi laporan keuangan perusahaan tahun 2010. Evaluasi laporan keuangan merupakan salah satu tugas penting dari seorang komisaris. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki dewan komisaris yang sudah menjalankan tugasnya mengevaluasi laporan keuangan.

Sama halnya dengan pertanyaan kesepuluh, pertanyaan kesebelas berkaitan dengan tanggung jawab dewan komisaris dalam menilai kinerja tahunan dari dewan direksi perusahaan. Jika dilihat dari tabel, 77,67% dari sampel sudah melakukan penilaian terhadap kinerja tahunan dewan direksi perusahaan, dan sisanya tidak memberikan informasi yang jelas apakah dewan komisaris yang ada pada perusahaannya sudah menjalankan tanggung jawab untuk menilai kinerja dewan direksi selama satu periode, yaitu satu tahun. Dewan komisaris bertugas menilai apakah dewan direksi sudah bekerja dengan baik selama setahun dan tidak melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri secara sepihak. Sebagian besar lebih perusahaan sudah menjalankan tugasnya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris sudah menjalankan aktivitasnya untuk mengawasi kinerja dewan

direksi dan melindungi kepentingan pemegang saham dari adanya kecurangan atau tindakan yang dilakukan oleh manajemen dan merugikan pemegang saham.

Terdapat 65,58% dari sampel pada penelitian ini yang sudah menilai atau memberikan informasi bahwa dewan komisarisnya telah menilai prospek bisnis perusahaan yang telah disiapkan oleh dewan direksi. Akan tetapi, terdapat 34,42% dari sampel yang tidak memberikan informasi mengenai penilaian yang dilakukan dewan komisaris terhadap prospek bisnis yang telah disiapkan oleh dewan direksi perusahaan. Dewan komisaris pada penelitian ini lebih dari 50% sudah menilai bisnis prospek yang disiapkan dewan direksi karena setiap rencana jangka panjang yang akan dilakukan oleh perusahaan harus dipertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Oleh sebab itu, dewan komisaris melakukan tugas tersebut.

Tabel 4.11 dan 4.12 menjelaskan mengenai statistik deskriptif pertanyaan dan distribusi sampel berdasarkan kategori jumlah anggota dari dewan komisaris.

Tabel 4.11 Statistik Deskriptif Pertanyaan Kategori Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Pertanyaan*	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
13	`	3	1,88	,993

*Daftar pertanyaan dapat dilihat pada lampiran 1

Tabel 4.12 Distribusi Sampel Berdasarkan Nilai Kategori Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Pertanyaan*	Good	Persentase	Fair	Persentase	Poor	Persentase	Total	Persentase
13	94	43,72%	1	0,47%	120	55,81%	215	100%

*Daftar pertanyaan dapat dilihat pada lampiran 1

Pada kategori jumlah anggota, terdapat satu pertanyaan mengenai jumlah anggota dewan komisaris pada perusahaan. Terdapat 55,81% dari sampel memiliki anggota dewan komisaris kurang dari 5 anggota dan 43,72% dari sampel yang

memiliki 5-10 anggota dewan komisaris pada perusahaanya. Sebagian besar sampel pada penelitian ini memiliki 3 anggota dewan komisaris. Hal ini disebabkan tidak ada ketentuan dari BEI untuk jumlah minimum dari anggota dewan komisaris. Hal ini kemudian membuat perusahaan dominan memiliki anggota hanya 3-5 orang karena perusahaan yang memiliki 5 orang anggota dewan komisaris dipandang lebih informatif oleh pelaku pasar sehingga laporan keuangannya memiliki kandungan informasi yang lebih tinggi (Vafeas, 2000). Jumlah 5 orang anggota mungkin dianggap perusahaan tersebut sebagai jumlah yang ideal, tidak terlalu banyak atau sedikit sehingga dapat menghindari *free rider* atau tugas yang tidak dijalankan dengan efektif karena kurangnya anggota. Sementara itu, hanya 1 sampel atau 0,47% yang memiliki 11-15 anggota dewan komisaris.

Tabel 4.13 akan menjelaskan statistik deskriptif pertanyaan kategori kompetensi dewan komisaris yang merupakan kategori terakhir dari efektivitas dewan komisaris.

Tabel 4.13 Statistik Deskriptif Pertanyaan Kategori Kompetensi Dewan Komisaris

Pertanyaan*	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
14	1	3	1,58	,692
15	1	3	2,88	,404
16	1	3	1,76	,974
17	1	3	2,28	,951

*Daftar pertanyaan dapat dilihat pada lampiran 1

Pada tabel 4.14 akan dijelaskan distribusi sampel berdasarkan nilai kategori jumlah anggota dewan komisaris.

Tabel 4.14 Distribusi Sampel Berdasarkan Nilai Kategori Kompetensi Dewan Komisaris

Pertanyaan*	<i>Good</i>	Persentase	<i>Fair</i>	Persentase	<i>Poor</i>	Persentase	Total	Persentase
14	25	11,63%	74	34,42%	116	53,95%	215	100%
15	195	90,70%	14	6,51%	6	2,79%	215	100%
16	82	38,14%	0	0,00%	133	61,86%	215	100%
17	136	63,26%	4	1,86%	75	34,88%	215	100%

*Daftar pertanyaan dapat dilihat pada lampiran 1

Untuk pertanyaan keempat belas, sebagian besar sampel mendapatkan nilai *poor*, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa sampel hanya memiliki kurang dari 30% anggota dewan komisaris yang memiliki pengetahuan memadai mengenai akuntansi dan keuangan. Terdapat 53,95% dari sampel yang mendapatkan nilai *poor*. Perusahaan pada penelitian ini lebih fokus pada sektor bisnis, sehingga sebagian besar dewan komisarisnya memiliki pengetahuan yang sesuai dengan sektor bisnis yang dijalankan perusahaan. Sebagian besar perusahaan hanya memiliki satu atau dua orang anggota yang memiliki pengetahuan mengenai akuntansi dan keuangan. Sementara itu, terdapat 34,42% dari sampel yang mendapatkan nilai *fair*, dimana hal tersebut berarti terdapat 30-50% anggota dewan komisaris memiliki pengetahuan mengenai akuntansi dan keuangan. Nilai *good* hanya diperoleh 11,63% dari sampel. Hasil tersebut lebih sedikit dibandingkan jumlah sampel nilai *poor* and *fair*. Nilai *good* menjelaskan bahwa lebih dari 50% anggota dewan komisaris memiliki pengetahuan mengenai akuntansi dan keuangan.

Hasil sampel pertanyaan kelima belas sangat bagus karena 90,70% dari sampel mendapatkan nilai *good*, yang artinya sampel memiliki lebih dari 50% anggota dewan komisaris yang sudah berpengalaman tentang bisnis, misalnya pernah menjadi anggota dewan komisaris baik di perusahaan sendiri atau yang lain, atau CEO di perusahaan lain. Hampir seluruh perusahaan pada penelitian ini memiliki dewan komisaris yang telah berpengalaman karena biasanya dewan komisaris pada perusahaan tersebut juga merupakan anggota dewan komisaris atau dewan direksi

pada perusahaan pemegang saham atau afiliasi. Selain itu, dewan komisaris pada perusahaan rata-rata sudah memiliki pengalaman sebagai anggota dewan komisaris atau dewan direksi pada perusahaan lain sebelumnya atau hanya berganti jabatan di perusahaan yang sama, misalnya lima tahun lalu merupakan komisaris independen pada perusahaan dan sekarang menjadi komisaris utama pada perusahaan yang sama.

Berbanding terbalik dengan pertanyaan kelima belas, pertanyaan selanjutnya mengenai pengetahuan dewan komisaris akan bisnis perusahaan menghasilkan 61,68% dari sampel mendapatkan nilai *poor*, dimana perusahaan hanya memiliki kurang dari 30% anggota dewan yang memiliki pengetahuan akan bisnis perusahaan atau tidak memberikan informasi. Hal ini disebabkan tidak banyak anggota dewan komisaris yang pernah bekerja sebelumnya di perusahaan yang bergerak di sektor yang sama dengan perusahaan tempatnya bekerja sekarang. Selain itu, tidak ada sampel yang memiliki 30-50% anggota dewan yang memiliki pengetahuan tersebut. Terdapat 38,14% dari sampel yang memiliki lebih 50% anggotanya memiliki pengetahuan akan bisnis perusahaan.

Terdapat 63,36% dari sampel pada penelitian ini memiliki dewan komisaris yang rata-rata umurnya di atas 40 tahun sehingga mendapatkan nilai *good*. Dengan semakin tua umur, dianggap dewan komisaris memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan memadai sehingga lebih kompeten sebagai seorang anggota dewan komisaris. Untuk nilai *fair*, terdapat 1,86% dari sampel yang memiliki dewan komisaris dengan rata-rata umur 30-40 tahun. Jumlah sampel yang mendapatkan nilai *poor* juga cukup banyak, dimana hal tersebut berarti 34,88% dari sampel memiliki dewan komisaris dengan rata-rata umur di bawah 30 tahun.

Selain dari skor dewan komisaris, penelitian ini juga menggunakan skor komite audit. Tabel 4.15 akan menjelaskan statistik deskriptif dari ketiga kategori skor komite audit, yaitu aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi. Selain itu, akan dijelaskan pula statistik deskriptif skor komite audit. Tabel 4.15 juga akan

menjelaskan jumlah pertanyaan dari setiap kategori dan total pertanyaan dari skor komite audit.

Tabel 4.15 Statistik Deskriptif Skor Komite Audit

Kategori	Jumlah Pertanyaan	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Aktivitas	8	8	23	15,88	4,346
Jumlah Anggota	1	1	3	2,08	,385
Kompetensi	2	2	6	3,64	1,380
Total Skor	11	11	31	21,60	4,861

Setiap pertanyaan pada setiap kategori dapat memperoleh nilai minimum 1 (*poor*) dan nilai maksimum 3 (*good*). Untuk kategori aktivitas, nilai minimum yang dapat diperoleh adalah 8 (8 pertanyaan dikalikan nilai 1) dan nilai maksimum yang dapat diperoleh adalah 24 (8 pertanyaan dikalikan nilai 3). Untuk kategori jumlah anggota, nilai minimum yang dapat diperoleh adalah 1 (1 pertanyaan dikalikan nilai 1) dan nilai maksimum yang dapat diperoleh adalah 3 (1 pertanyaan dikalikan nilai 3). Untuk kategori kompetensi, nilai minimum yang dapat diperoleh adalah 2 (2 pertanyaan dikalikan nilai 1) dan nilai maksimum yang dapat diperoleh adalah 6 (2 pertanyaan dikalikan nilai 3).

Pada tabel statistik deskriptif skor komite audit, terdapat 3 kategori, yaitu aktivitas dengan 8 pertanyaan, jumlah anggota yang memiliki 1 pertanyaan, dan kompetensi dengan 2 pertanyaan, sehingga total pertanyaan untuk skor komite audit adalah 11 pertanyaan. Nilai minimum masing-masing kategori adalah 8 untuk kategori aktivitas, 1 untuk kategori jumlah anggota, dan 2 untuk kategori kompetensi. Jika dilihat, nilai minimum masing-masing kategori tersebut memang nilai terendah untuk setiap kategori. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap kategori, terdapat perusahaan atau sampel yang mendapatkan nilai 1 (*poor*) untuk semua pertanyaan pada masing-masing kategori. Pada setiap kategori, dapat disimpulkan masih ada perusahaan yang memiliki komite audit yang belum melakukan aktivitasnya secara efektif, memiliki jumlah anggota yang efektif, yaitu minimum 3 orang, atau kompeten sebagai seorang komite audit.

Pada nilai maksimum, dapat dilihat bahwa kategori aktivitas memperoleh nilai 23, untuk kategori jumlah anggota memperoleh nilai 3, dan nilai 6 untuk kategori kompetensi. Untuk kategori jumlah anggota dan kompetensi, terdapat

sampel yang menerima nilai maksimum, yaitu 3 (1 pertanyaan dikalikan nilai 3) untuk jumlah anggota dan 6 (2 pertanyaan dikalikan nilai 3) untuk kompetensi. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat sampel yang sudah memiliki komite audit yang efektif dalam kategori jumlah anggotanya dan kompetensinya. Sementara untuk kategori aktivitas, nilai maksimumnya berbeda satu poin dengan nilai maksimum yang dapat diperoleh, yaitu 24.

Untuk total skor komite audit, total pertanyaan pada skor komite audit adalah 11 sehingga nilai minimum dan maksimum dari semua pertanyaan tersebut adalah 11 (11 pertanyaan dikalikan dengan nilai 1) dan 33 (11 pertanyaan dikalikan dengan nilai 3). Pada total skor komite audit, diperoleh nilai minimum dan maksimum sebesar 11 dan 31. Jika dilihat nilai minimum yang diperoleh dari skor komite audit penelitian ini, terdapat perusahaan yang memiliki skor paling minimum, yaitu 11. Hal ini menunjukkan bahwa sampel atau perusahaan pada penelitian ini ada yang memiliki komite audit yang kurang efektif. Akan tetapi, ada sampel atau perusahaan pada penelitian ini ada yang mencapai nilai maksimum dari total skor komite audit, yaitu 33. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut memiliki komite audit yang efektif berdasarkan kategori secara keseluruhan, yaitu aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi.

Nilai *mean* untuk kategori aktivitas pada komite audit adalah 15,88, dimana rata-rata yang diperoleh masih di bawah total nilai *fair*, yaitu 16 (8 pertanyaan dikalikan nilai 2). Untuk kategori yang kedua, yaitu jumlah anggota, kategori ini cukup bagus karena nilai rata-rata yang diperoleh di atas total nilai *fair* untuk kategori aktivitas, yaitu 2 (1 pertanyaan dikalikan nilai 2). Sementara untuk kategori kompetensi, nilai *mean* yang diperoleh adalah 3,64. Total nilai *fair* untuk kategori ini adalah 4 (2 pertanyaan dikalikan nilai 2), sehingga dapat disimpulkan nilai rata-rata tersebut sudah cukup bagus. Hal ini mungkin disebabkan beberapa perusahaan sudah memiliki jumlah anggota yang efektif, yaitu minimal 3 orang dalam komite audit. Untuk keseluruhan total skor komite audit, diperoleh nilai *mean* dan standar deviasi

sebesar 21,60 dan 4,861. Nilai rata-rata yang diperoleh sudah cukup bagus karena lebih dari total nilai *fair* untuk skor komite audit, yaitu 22 (11 pertanyaan dikalikan nilai 2). Hal ini menunjukkan bahwa komite audit yang ada pada perusahaan di Indonesia sudah cukup efektif dalam menjalankan tugasnya dalam perusahaan.

Selain statistik deskriptif dari masing-masing kategori, pada tabel-tabel berikutnya akan dijelaskan statistik deskriptif dan distribusi sampel dari masing-masing pertanyaan pada setiap kategori skor komite audit. Tabel 4.16 akan menjelaskan statistik deskriptif dari 8 pertanyaan dari kategori aktivitas yang terdapat pada skor komite audit.

Tabel 4.16 Statistik Deskriptif Pertanyaan Kategori Aktivitas Komite Audit

Pertanyaan*	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
1	1	3	2,02	1,002
2	1	3	1,71	,958
3	1	3	2,56	,829
4	1	3	2,16	,989
5	1	3	2,19	,984
6	1	3	1,89	,805
7	1	3	1,99	,976
8	1	2	1,35	,479

*Daftar pertanyaan dapat dilihat pada lampiran 1

Setelah statistik deskriptif dari setiap pertanyaan pada kategori aktivitas komite audit, akan dijelaskan distribusi sampel berdasarkan nilai kategori aktivitas komite audit pada tabel 4.17.

Tabel 4.17 Distribusi Sampel Berdasarkan Nilai Kategori Aktivitas

Komite Audit

Pertanyaan*	<i>Good</i>	Persentase	<i>Fair</i>	Persentase	<i>Poor</i>	Persentase	Total	Persentase
1	110	51,16%	0	0,00%	105	48,84%	215	100%
2	76	35,35%	0	0,00%	139	64,65%	215	100%
3	168	78,14%	0	0,00%	47	21,86%	215	100%
4	125	58,14%	0	0,00%	90	41,86%	215	100%
5	128	59,53%	0	0,00%	87	40,47%	215	100%
6	59	27,44%	74	34,42%	82	38,14%	215	100%
7	101	46,98%	11	5,12%	103	47,91%	215	100%
8	0	0,00%	76	35,35%	139	64,65%	215	100%

*Daftar pertanyaan dapat dilihat pada lampiran 1

Pertanyaan pertama sampai dengan kelima pada kategori komite audit berkaitan dengan kelima tanggung jawab komite audit yang sudah dilaksanakan komite audit, yaitu mengevaluasi pengendalian internal, mengusulkan auditor, *review* laporan keuangan, evaluasi kepatuhan legal, dan menyiapkan laporan komite audit yang lengkap sebagai bentuk pengungkapan dari komite audit. Sebagian perusahaan pada penelitian ini tidak membuat laporan komite audit. Beberapa perusahaan hanya memberikan informasi terbatas mengenai pelaksanaan tanggung jawabnya tersebut sehingga penelitian ini kurang mendapatkan informasi apakah komite audit pada perusahaan sudah menjalankan setiap tanggung jawabnya atau belum. Nilai *poor* yang cukup banyak pada setiap pertanyaan sebagian besar disebabkan karena perusahaan tidak memberikan informasi. Akan tetapi, jika dilihat dari hasil penilaian, komite audit pada perusahaan lebih dominan melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena evaluasi laporan keuangan merupakan tugas utama seorang komite audit. Sementara itu, dari hasil penelitian tanggung jawab dalam mengusulkan auditor yang lebih jarang dilakukan oleh komite audit. Lebih banyak sampel yang tidak melakukannya atau tidak memberikan informasi, yaitu sebanyak 64,65% dari keseluruhan sampel. Hanya 35,35% dari sampel yang telah melakukan tanggung jawab kedua, yaitu mengusulkan auditor.

Sementara untuk jumlah rapat yang diselenggarakan oleh komite audit, yaitu pertanyaan keenam, terdapat 27,44% dari sampel yang menyelenggarakan rapat komite audit lebih dari 6 kali. Sampel yang menyelenggarakan rapat sebanyak 4-6 kali pada penelitian ini sebesar 34,42% dari keseluruhan sampel. Akan tetapi, masih ada 38,14% dari sampel yang menyelenggarakan rapat komite audit kurang dari 4 kali atau bahkan tidak memberikan informasi pada laporan tahunannya sehingga mendapatkan nilai *poor*. Banyak perusahaan yang mendapat nilai *poor* disebabkan karena kurangnya informasi mengenai komite audit dalam laporan tahunan.

Untuk rapat komite audit tersebut, kehadiran para anggota komite audit sangat penting. Pada pertanyaan ketujuh, dapat terlihat bahwa sudah 27,44% dari sampel dimana rapat komite audit pada tahun 2010 dihadiri lebih dari 80% anggota komite audit. Akan tetapi, persentase sampel yang mendapatkan nilai *good* dengan *poor* tidak memiliki perbedaan yang signifikan karena banyak juga sampel yang kurang dari 70% anggota komite auditnya menghadiri rapat yang dilakukan sepanjang tahun 2010. Banyak perusahaan yang mendapat nilai *poor* karena tidak memberikan informasi. Informasi mengenai komite audit sangat terbatas pada laporan tahunan perusahaan sehingga banyak perusahaan yang mendapat nilai rendah padahal mungkin bisa mendapat nilai *good*.

Sama halnya dengan pertanyaan pertama hingga kelima, pertanyaan kedelapan berkaitan dengan tanggung jawab komite audit dalam mengevaluasi ruang lingkup (*scope*), akurasi, efektivitas biaya, independensi dan objektivitas auditor eksternal. Jika dilihat dari tabel, 34,35% dari sampel sudah melakukan evaluasi sebagian aspek dari auditor eksternal tersebut, biasanya komite audit hanya memberikan informasi mengenai evaluasi independensi dan objektivitas auditor eksternal sehingga hanya mendapatkan nilai *fair*, dan sisanya sebesar 64,64% dari sampel tidak memberikan informasi yang jelas apakah komite audit yang ada pada perusahaannya sudah menjalankan tanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek dari auditor eksternal tersebut. Hasil tersebut sangat besar

dibandingkan dengan nilai *fair* dan *good* karena tidak ada sampel yang telah mengevaluasi seluruh aspek tersebut secara lengkap sehingga tidak mendapatkan nilai *good*.

Tabel 4.18 dan 4.19 akan menjelaskan mengenai statistik deskriptif pertanyaan kategori jumlah anggota komite audit dan bagaimana distribusi sampel berdasarkan kategori ketiga dari komite audit tersebut.

Tabel 4.18 Statistik Deskriptif Pertanyaan Kategori Jumlah Anggota Komite Audit

Pertanyaan*	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
9	1	3	2,08	,385

*Daftar pertanyaan dapat dilihat pada lampiran 1

Tabel 4.19 Distribusi Sampel Berdasarkan Nilai Kategori Jumlah Anggota Komite Audit

Pertanyaan*	Good	Persentase	Fair	Persentase	Poor	Persentase	Total	Persentase
9	25	11,63%	182	84,65%	8	3,72%	215	100%

*Daftar pertanyaan dapat dilihat pada lampiran 1

Pada kategori jumlah anggota, terdapat satu pertanyaan mengenai jumlah anggota komite audit pada perusahaan. Terdapat 3,72% dari sampel tidak memberikan informasi mengenai jumlah anggota komite audit. Sesuai dengan peraturan Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk ketua komite audit sehingga tidak ada sampel yang memiliki anggota komite audit kurang dari 3 orang. Nilai *poor* diberikan kepada sampel yang tidak memberikan informasi mengenai jumlah komite audit. Sebagian besar sampel pada penelitian ini memiliki 3 anggota komite audit, yaitu sebanyak 84,65% dari

keseluruhan sampel. Sementara itu, ada 11,63% dari sampel yang memiliki lebih dari 3 anggota komite audit.

Tabel 4.20 akan menjelaskan statistik deskriptif pertanyaan kategori kompetensi komite audit yang merupakan kategori terakhir dari efektivitas komite audit.

Tabel 4.20 Statistik Deskriptif Pertanyaan Kategori Kompetensi Komite Audit

Pertanyaan*	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
10	1	3	1,93	,823
11	1	3	1,71	,943

*Daftar pertanyaan dapat dilihat pada lampiran 1

Pada tabel 4.21 akan dijelaskan distribusi sampel berdasarkan nilai kategori kompetensi komite audit.

Tabel 4.21 Distribusi Sampel Berdasarkan Nilai Kompetensi Komite Audit

Pertanyaan*	Good	Persentase	Fair	Persentase	Poor	Persentase	Total	Persentase
10	65	30,23%	69	32,09%	81	37,67%	215	100%
11	73	33,95%	7	3,26%	135	62,79%	215	100%

*Daftar pertanyaan dapat dilihat pada lampiran 1

Untuk pertanyaan kesepuluh, perbedaan jumlah sampel yang mendapatkan nilai *good*, *fair*, dan *poor* tidak terlalu banyak. 37,67% dari sampel mendapatkan nilai *poor*, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa sampel tidak memiliki komite audit yang memiliki pengetahuan memadai mengenai akuntansi atau sampel tidak memberikan informasi mengenai hal tersebut. Banyak perusahaan yang tidak memberikan informasi yang lengkap mengenai anggotanya, hanya memberikan informasi jumlah anggota dan nama dari setiap anggota sehingga sampel yang mendapatkan nilai *poor* juga tidak sedikit. Sementara itu, terdapat 32,09% dari sampel yang mendapatkan nilai *fair*, dimana hal tersebut berarti terdapat 1 anggota

komite audit memiliki pengetahuan mengenai akuntansi. Nilai *good* diperoleh 30,32% dari sampel. Hasil tersebut lebih sedikit dibandingkan jumlah sampel nilai *poor* and *fair*. Nilai *good* menjelaskan bahwa lebih dari 2 anggota komite audit memiliki pengetahuan mengenai akuntansi. Perusahaan pada penelitian biasanya hanya memiliki satu anggota yang berpengetahuan mengenai akuntansi sehingga lebih sedikit sampel yang mendapat nilai *good*.

Untuk pertanyaan terakhir, terdapat 33,95% sampel pada penelitian ini memiliki komite audit yang rata-rata umurnya di atas 40 tahun sehingga mendapatkan nilai *good*. Dengan semakin tua umur, dianggap komite audit memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan memadai sehingga lebih kompeten sebagai seorang anggota komite audit. Sampel yang mendapatkan nilai *poor* jauh lebih banyak dibandingkan nilai *good* dan *fair*. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi mengenai umur anggota komite audit sehingga banyak perusahaan yang mendapatkan nilai *poor*.

4.4 Analisis Korelasi Pearson

Analisis *Pearson* dilakukan pada penelitian ini untuk melihat apakah terdapat asosiasi atau hubungan antara dua variabel pada penelitian ini. Jika koefisien korelasi *Pearson* bernilai 0,9 atau lebih, maka terdapat korelasi atau hubungan yang sangat kuat antara variabel-variabel tersebut (Sekaran dan Bougie, 2010). Korelasi atau hubungan tersebut menyebabkan apabila salah satu variabel berubah, maka variabel lain yang memiliki hubungan dengan variabel tersebut juga akan ikut berubah. Untuk melihat apakah variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini memiliki hubungan atau korelasi antara satu sama dengan yang lain, dapat dilihat pada tabel 4.22 di bawah ini.

Tabel 4.22 *Pearson Correlation Matrix*

Variabel	PROB CREDIT	BOARD SCORE	AUDCOMM SCORE	CFFO	GROWTH OPP	SIZE	AGE
PROB CREDIT	1						
BOARD SCORE	,322** (,000)	1					
AUDCOMM SCORE	,290** (,000)	,520** (,000)	1				
CFFO	,123 (,073)	-,053 (,436)	-,016 (,815)	1			
GROWTH OPP	,234** (,001)	,168* (,014)	,098 (,150)	-,026 (,707)	1		
SIZE	,295** (,000)	,399** (,000)	,355** (,000)	-,022 (,751)	,360** (,000)	1	
AGE	-,028 (,680)	,007 (,923)	,145* (,034)	-,025 (,712)	,042 (,540)	,065 (,343)	1

** Signifikan pada level $\alpha = 1\%$ (2-tailed).

* Signifikan pada level $\alpha = 5\%$ (2-tailed).

Angka di dalam kurung menunjukkan *p-value*

Jika dilihat dari tabel 4.5 di atas, BOARDSCORE berkorelasi positif terhadap PROBCREDIT pada signifikansi 1%. Hal ini menunjukkan semakin tinggi skor efektivitas dewan komisaris pada suatu perusahaan, maka semakin layak perusahaan tersebut mendapatkan kredit dari bank. Selain itu, AUDCOMMSCORE juga berkorelasi positif terhadap PROBCREDIT pada signifikansi 1%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa apabila skor efektivitas komite audit meningkat atau berubah, maka perusahaan tersebut semakin layak mendapatkan kredit dari bank. Untuk kedua variabel independen yang lain, yaitu CFFO dan GROWTHOPP, CFFO tidak berkorelasi terhadap PROBCREDIT. Lain halnya dengan GROWTHOPP, variabel ini berkorelasi positif terhadap PROBCREDIT pada tingkat signifikansi 1%. Serupa dengan variabel independen lainnya, dimana apabila peluang pertumbuhan meningkat, maka perusahaan tersebut akan dianggap semakin layak menerima kredit dari bank. Untuk variabel kontrol pada penelitian ini, hanya SIZE yang berkorelasi positif signifikan terhadap PROBCREDIT pada tingkat signifikansi 1%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan tersebut

akan dianggap semakin bagus dan layak mendapatkan kredit. Sementara untuk AGE, Sementara untuk AGE, variabel kontrol tersebut tidak berkorelasi terhadap PROBCRDIT yang menunjukkan bahwa berapapun umur perusahaan, tidak akan mempengaruhi persepsi atau kemungkinan suatu perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit dari bank.

Sementara itu, BOARDSCORE berkorelasi positif secara signifikan terhadap AUDCOMMSCORE. Korelasi tersebut signifikan pada 1%. Hal ini menunjukkan bahwa apabila total skor dewan komisaris berubah, maka akan terjadi perubahan pula pada total skor komite audit. Selain dengan AUDCOMMSCORE, BOARDSCORE juga berkorelasi positif secara signifikan dengan GROWTHOPP pada tingkat 5%. Hal ini menunjukkan bahwa apabila total skor dewan komisaris berubah, maka peluang pertumbuhan akan berubah. Misalnya, total skor dewan komisaris meningkat, maka peluang pertumbuhan pada suatu perusahaan juga ikut meningkat. Pada tabel korelasi *Pearson*, terlihat bahwa AUDCOMMSCORE berkorelasi positif terhadap SIZE. Korelasi tersebut signifikan pada tingkat signifikansi 1%. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ukuran perusahaan berubah, maka akan ikut merubah skor komite audit pada perusahaan tersebut. Sama halnya dengan SIZE, AUDCOMMSCORE juga berkorelasi positif secara signifikan dengan AGE pada tingkat signifikansi 5%, dimana semakin tua umur perusahaan, maka skor komite audit pada perusahaan tersebut akan meningkat pula.

Untuk CFFO, variabel ini tidak memiliki korelasi dengan variabel dependen, independen, dan kontrol pada penelitian ini, baik dengan tingkat signifikansi 1% atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai dari CFFO berubah, maka tidak mempengaruhi variabel independen maupun kontrol lainnya. Untuk variabel independen terakhir, yaitu GROWTHOPP, variabel ini berkorelasi positif dan signifikan terhadap SIZE pada tingkat signifikansi 1%, dimana semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi peluang pertumbuhan perusahaan tersebut.

4.5 Analisis Regresi Logistik

4.5.1 Pengujian *Goodness of Fit* (*Hosmer and Lemeshow Test*)

Pengujian *Hosmer and Lemeshow's Goodness Test* digunakan untuk menguji hipotesis nol (H_0) bahwa model dapat dikatakan fit dengan data atau model regresi menunjukkan kecukupan data (Nachwowi, 2005). Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai dari *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test Statistik* lebih dari 0,05 maka hipotesis nol (H_0) diterima, dan sebaliknya. Berikut ini adalah hasil pengujian *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Test*, yaitu:

Tabel 4.23 *Hosmer and Lemeshow Test*

<i>Chi-square</i>	<i>Df</i>	<i>Sig.</i>
3,535	8	0,896

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai dari pengujian *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Test* nilai *chi square* adalah 3,535 dengan signifikansi sebesar 0,896. Dengan tingkat signifikansi lebih besar dari tingkat α sebesar 0,05 maka H_0 diterima dan model dapat dikatakan fit dengan data atau model regresi menunjukkan kecukupan data. Dengan signifikansi tersebut, dapat dikatakan bahwa model mampu memprediksi nilai sampelnya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data sampelnya (Ghozali, 2005).

4.5.2 Pengujian Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test*)

Menurut Ghozali (2005) uji *chi square* untuk keseluruhan model terhadap data dilakukan dengan membandingkan nilai antara *-2 log likelihood* pada hasil *block number* 0 dengan nilai *-2 log likelihood* pada hasil *block number* 1. Apabila terjadi penurunan, maka model tersebut menunjukkan model regresi yang baik. Penurunan *-2 log likelihood* dapat dilihat pada tabel 4.24 dan 4.25 sebagai berikut:

Tabel 4.24 Likelihood Overall Fit Block Number 0

<i>Iteration</i>		<i>-2 Log likelihood</i>
<i>Step 0</i>	1	281,663
	2	281,653
	3	281,653

Tabel 4.25 Likelihood Overall Fit Block Number 1

<i>Iteration</i>		<i>-2 Log likelihood</i>
<i>Step 1</i>	1	239,414
	2	236,817
	3	236,753
	4	236,753
	5	236,753

Pengujian pada *block number 0* atau pengujian dengan memasukkan seluruh prediktor diperoleh nilai *-2 log likelihood* sebesar 281,653, sedangkan pada *block number 1* diperoleh nilai *-2 log likelihood* sebesar 236,753 Hal ini menunjukkan ada penurunan nilai *-2 log likelihood* yang cukup besar yang memungkinkan akan adanya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Penurunan nilai *-2 log likelihood* tersebut disajikan dalam nilai *chi square* dalam *omnibus test of model coefficient*.

4.5.3 Pengujian Simultan (*Omnibus Test of Model Coefficient*)

Pengujian simultan dilakukan untuk melihat hasil signifikansi dari keseluruhan variabel independen pada penelitian ini terhadap variabel dependennya (Nachrowi, 2005). Pengujian ini ingin melihat apakah variabel-variabel independen pada penelitian ini berpengaruh terhadap variabel dependennya. Hasil dari signifikansi keseluruhan variabel independen pada penelitian ini terhadap variabel dependennya dapat dilihat pada tabel *Omnibus Test of Model Coefficient* berikut ini:

Tabel 4.26 Omnibus Test of Model Coefficient

	<i>Chi-square</i>	Df	Sig.
Step	44,900	6	0,000
Block	44,900	6	0,000
Model	44,900	6	0,000

Pengujian *Omnibus test of model coefficient* dapat dilihat dari nilai *chi square* (penurunan nilai *-2 log likelihood*) sebesar 44,900 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari tingkat α sebesar 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari keenam variabel, yaitu skor dewan komisaris, skor komite audit, arus kas dari aktivitas operasional, peluang pertumbuhan, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan secara bersama-sama dapat menjelaskan probabilita kelayakan kredit dari perbankan.

4.5.4 Koefisien Determinasi (*Model Summary*)

Model Summary merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat seberapa perubahan yang terjadi pada probabilita kelayakan pemberian kredit bank dapat dijelaskan oleh perubahan yang terjadi pada variabel-variabel independennya, yaitu yaitu skor dewan komisaris, skor komite audit, arus kas dari aktivitas operasional, peluang pertumbuhan, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan (Nachrowi, 2005). Berikut ini adalah hasil pengujian *Nagelkerke's R Square*, yaitu:

Tabel 4.27 Model Summary

<i>-2 Log likelihood</i>	<i>Cox & Snell R Square</i>	<i>Nagelkerke R Square</i>
236,753	0,188	0,258

Nilai *Nagelkerke's R Square* sebesar 0,258. Nilai ini menunjukkan bahwa variabilitas dari probabilita kelayakan pemberian kredit bank dapat dijelaskan oleh perubahan yang terjadi pada variabel-variabel independennya, yaitu yaitu skor dewan komisaris, skor komite audit, arus kas dari aktivitas operasional, peluang

pertumbuhan, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan sebesar 25,8% dan 74,2% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

4.5.5 Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian ini menggunakan regresi logistik untuk menguji pengaruh skor dewan komisaris, skor komite audit, arus kas aktivitas operasional, dan peluang pertumbuhan, serta variabel kontrol berupa ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap kemungkinan perusahaan mendapatkan kredit dari bank. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan regresi logistik disajikan pada tabel 4.28 sebagai berikut:

Tabel 4.28 Hasil Pengujian Hipotesis

$$\text{PROBCREDIT}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{BOARDScore}_i + \beta_2 \text{AUDCOMMScore}_i + \beta_3 \text{CFFO}_i + \beta_4 \text{GROWTHOPP}_i + \beta_5 \text{SIZE}_i + \beta_6 \text{AGE}_i + \varepsilon_i$$

<i>Variables</i>	<i>Exp Sign</i>	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Constant		-9,240	2,881	10,288	1	0,000**	0,000
BOARDScore	+	5,112	2,178	5,511	1	0,009**	166,052
AUDCOMMScore	+	2,172	1,269	2,928	1	0,044**	8,777
CFFO	+	0,848	0,399	4,508	1	0,017**	2,334
GROWTHOPP	+	0,132	0,064	4,281	1	0,019**	1,141
SIZE	+	0,173	0,106	2,671	1	0,051*	1,189
AGE	+	-0,023	0,023	0,956	1	0,164	0,978

** Signifikan pada level $\alpha = 5\%$ (1-tailed).

* Signifikan pada level $\alpha = 10\%$ (1-tailed).

Jumlah Sampel 215, dengan melakukan *winsorized* untuk menghilangkan *outlier* berdasarkan batas 3 standar deviasi dari nilai *mean*. *Winsorized* dilakukan kepada variabel CFFO dan GROWTHOPP.

PROBCREDIT= 1 probabilita pemberian kredit oleh bank pada perusahaan i, yang merupakan variabel dikotomi atau *dummy* dengan nilai 1 apabila perusahaan i dinyatakan layak diberikan kredit oleh bank dan 0 apabila lainnya, BOARDScore= total skor efektivitas dewan komisaris pada perusahaan i, AUDCOMMScore= total skor efektivitas komite audit pada perusahaan i, CFFO= arus kas dari aktivitas operasional pada perusahaan i yang dibagi dengan nilai pasar ekuitas pada awal tahun, GROWTHOPP= peluang pertumbuhan pada perusahaan i yang diukur melalui *market to book value of equity* pada akhir tahun, SIZE= ukuran perusahaan berdasarkan logaritma natural total aset perusahaan i pada akhir tahun, AGE= umur perusahaan i sejak IPO sampai periode penelitian.

Dari tabel di atas, diperoleh model regresi untuk penelitian ini, yaitu:

$$\text{Ln}\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right) = -9,240 + 5,112\text{BOARDSCORE}_i + 2,172\text{AUDCOMMSCORE}_i + 0,848\text{CFFO}_i + 0,131\text{GROWTHOPP}_i + 0,173\text{SIZE}_i - 0,023\text{AGE}_i$$

Model regresi ini digunakan untuk melihat apakah prediksi kemungkinan suatu perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit dari bank dengan hasil sampel bernilai sama atau tidak. Sebagai contoh, perusahaan Astra International (ASII). Menurut Nachrowi (2005), nilai dari masing-masing variabel harus dimasukkan pada log *odd* untuk mengecek apakah hasil prediksi model regresi ini sama atau sesuai dengan hasil observasi pada majalah Infobank, yaitu:

$$\text{Ln}\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right) = -9,2400 + (5,1120 * 0,6667) + (2,1720 * 0,7273) + (0,8480 * 0,0217) + (0,1310 * 4,47856) + (0,1710 * 32,3571) - (0,0220 * 20)$$

$$\text{Ln}\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right) = 1,5061$$

$$\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right) = e^{1,5061}$$

$$\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right) = 10,2189$$

$$P = 0,8184$$

Menurut Infobank, ASII dianggap layak mendapatkan kredit. Nilai probabilitas menurut model regresi untuk ASII diketahui 0,8184. Hal ini menunjukkan bahwa menurut prediksi model regresi, probabilitas ASII dianggap layak mendapatkan kredit sebesar 81,84%. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan 0,5 sehingga disimpulkan bahwa menurut nilai prediksi dari model regresi untuk perusahaan ASII sesuai dengan sampel penelitian ini (Nachrowi, 2005). Model regresi ini juga memprediksikan bahwa ASII layak mendapatkan kredit. Apabila nilai probabilitas ini kurang dari 0,5, maka hasil observasi Infobank berbeda dengan prediksi yang

dilakukan model regresi ini. Nilai probabilita kurang dari 0,5 menunjukkan prediksi model regresi bertolak belakang dengan hasil observasi. Model regresi ini salah memprediksi variabel dependen dari masing-masing perusahaan. Perhitungan ini dilakukan pada semua sampel perusahaan pada penelitian ini untuk membuktikan apakah model regresi ini dapat memprediksi variabel dependen secara tepat atau tidak. Selanjutnya, dilakukan penghitungan untuk hasil prediksi yang salah, berapa jumlah total atau persentase dari hasil prediksi yang salah yang dilakukan oleh model regresi ini.

4.5.5.1 Pengaruh Skor Dewan Komisaris terhadap Probabilita Kelayakan Pemberian Kredit Bank

Pada tabel di atas, dapat dilihat signifikansi dari masing-masing variabel independen dan variabel kontrol terhadap variabel dependen, yaitu probabilita kelayakan kredit dari bank. Pada variabel independen pertama, yaitu skor dewan komisaris (BOARDSCORE), signifikansi dari variabel tersebut adalah 0,009 dimana nilai tersebut di bawah *p-value* 0,05. Nilai beta korelasi dari skor dewan komisaris (BOARDSCORE) adalah 5,112. Hal ini menunjukkan bahwa skor dewan komisaris (BOARDSCORE) berpengaruh positif secara signifikan terhadap probabilita suatu perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit dari bank (PROBCREDIT). Bank akan lebih percaya memberikan kredit kepada perusahaan yang sehat secara finansial dan memiliki *corporate governance* yang baik (Firth *et al.*, 2009). Kualitas *corporate governance* suatu perusahaan menjadi fokus suatu bank dalam membuat keputusan apakah akan memberikan kredit atau tidak karena kualitas *corporate governance* dapat membantu mengurangi risiko kredit dengan memitigasi *agency problem* antara pemegang saham dan manajer dan juga dengan meningkatkan transparansi dan kualitas informasi keuangan (Shleifer and Vishny, 1997). Dengan keberadaan dewan komisaris yang efektif, maka kinerja manajemen akan terawasi dengan baik sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen juga berkualitas dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, baik bagi investor maupun kreditur. Bank yang melakukan analisis pada kinerja keuangan perusahaan ketika akan

memutuskan apakah perusahaan tersebut layak atau tidak mendapatkan kredit akan bersedia memberikan karena perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik, berkualitas, dan dapat diandalkan. Sejalan dengan Ashbaugh-Skaife *et al.* (2006), bahwa perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang kuat akan meningkatkan *investment-grade credit rating* perusahaan.

Efektivitas dari dewan komisaris, yang diukur melalui independensi, aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi berpengaruh positif terhadap probabilita suatu perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit dari bank. *Board of director* merupakan fungsi dari mekanisme *corporate governance* yang dapat meningkatkan *corporate monitoring* (Prevost, 2002). Tidak hanya dapat meningkatkan kualitas kinerja perusahaan yang dianalisis oleh bank ketika pengambilan keputusan memberikan kredit atau tidak, tetapi keberadaan dewan komisaris dalam perusahaan yang efektif, seperti dewan komisaris yang independen, memiliki aktivitas yang berfungsi meningkatkan kinerja perusahaan, jumlah anggota yang efektif, dan kompeten dapat meningkatkan kepercayaan suatu bank kepada perusahaan tersebut sehingga akan bersedia untuk memberikan kredit. Dengan demikian, hipotesis pertama pada penelitian ini diterima.

Board yang independen dan aktif berpengaruh terhadap biaya utang yang rendah pada perusahaan (Anderson *et al.*, 2004). Menurut Wagner (2011), independensi dan kompetensi merupakan aspek dari efektivitas *board* karena *board* yang independen dan kompeten memiliki informasi yang dapat diandalkan mengenai perusahaannya. Menurut Firth *et al.* (2009), bank akan lebih percaya pada perusahaan yang memiliki dewan komisaris yang telah berpengalaman di posisi top suatu perusahaan atau di bisnis yang serupa dengan perusahaannya sekarang. Ukuran *board* yang semakin besar dan menyediakan anggota *board of directors* yang memiliki pendidikan baik lebih banyak akan meningkatkan efektivitas dalam *monitoring* (Adams dan Mehran, 2002). *Board* yang independen juga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan mengurangi *agency problem* (Lefort, 2008). Dengan nilai perusahaan

yang meningkat dan *agency problem* yang berkurang, maka bank akan lebih percaya untuk memberikan kredit kepada perusahaan tersebut.

4.5.5.2 Pengaruh Skor Komite Audit terhadap Probabilita Kelayakan Pemberian Kredit Bank

Begitu pula dengan skor komite audit (AUDCOMMSCORE), dimana nilai signifikansinya di bawah 0,05. Nilai signifikansi dan nilai beta korelasi dari skor komite audit (AUDCOMMSCORE) adalah 0,044 dan 2,172. Hal ini menunjukkan bahwa skor komite audit (AUDCOMMSCORE) juga berpengaruh positif secara signifikan terhadap probabilita kelayakan mendapatkan kredit dari bank (PROBCREDIT). Hal ini juga menunjukkan bahwa hipotesis kedua pada penelitian ini tidak ditolak. Serupa dengan dewan komisaris, komite audit juga merupakan mekanisme *corporate governance* yang penting dalam peningkatan kualitas laporan keuangan yang nantinya digunakan bank untuk memberikan keputusan apakah perusahaan tersebut layak untuk mendapatkan kredit. Apabila suatu perusahaan memiliki komite audit yang berkualitas dan dapat menjalankan tugasnya secara efektif, maka bank akan lebih percaya dan *image* perusahaan akan lebih baik sehingga bank bersedia memberikan kredit kepada perusahaan tersebut.

Skor komite audit pada penelitian ini diukur melalui tiga karakteristik, yaitu aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi dan skor ini berpengaruh signifikan terhadap probabilita kemungkinan dianggap layak mendapatkan kredit. Hal ini membuktikan bahwa ketiga karakteristik dari efektivitas komite audit berpengaruh positif secara signifikan dengan probabilita kelayakan kredit bank. Sesuai dengan penelitian Anderson *et al.* (2003 dan 2004), aktivitas komite audit yang diukur melalui jumlah rapat dan jumlah komite audit yang besar berhubungan dengan proses pengawasan terhadap pelaporan keuangan dan kualitas laporan keuangan. Aktivitas komite audit tersebut dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan dengan adanya *financial expertise* pada anggota *board of directors* dan komite audit dapat mengurangi *discretionary accrual* (Xie *et al.*, 2003). Dengan demikian, penelitian ini

membuktikan bahwa efektivitas komite audit dapat meningkatkan kepercayaan suatu bank kepada perusahaan sehingga perusahaan tersebut dianggap layak mendapatkan kredit dan bank tersebut akan bersedia memberikan kredit kepada perusahaan tersebut apabila perusahaan tersebut mengajukan. Hal ini disebabkan karena bank percaya keberadaan komite audit tersebut dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan sehingga perusahaan akan mampu membayarkan kreditnya di masa depan.

4.5.5.3 Pengaruh Arus Kas dari Aktivitas Operasional terhadap Probabilita Kelayakan Pemberian Kredit Bank

Untuk variabel independen ketiga, yaitu arus kas dari aktivitas operasional (CFFO), variabel ini berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pada penelitian ini. Nilai signifikansi dari CFFO adalah 0,017. Nilai tersebut signifikan terhadap *p-value* 0,05. Nilai beta dari CFFO 0,848. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh positif secara signifikan terhadap probabilita kelayakan perusahaan mendapatkan kredit dari bank. Arus kas dari aktivitas operasional dapat dijadikan bank untuk mengukur apakah suatu perusahaan layak mendapatkan kredit. Hal ini disebabkan karena arus kas dari aktivitas operasional dapat dijadikan sebagai prediksi apakah perusahaan tersebut memiliki kas yang banyak dan dapat menghasilkan kas di masa depan dari kegiatan operasionalnya sehingga dapat membayarkan pinjaman atau kreditnya di masa depan.

Arus kas merupakan indikator yang paling baik dibandingkan laba bersih, *debt to total assets ratios*, *liquid assets to total assets ratios*, *liquid assets to current debt ratios*, dan *turnover ratios* dalam memprediksi suatu perusahaan akan bangkut atau tidak (White *et al.*, 1993). Arus kas yang berasal dari aktivitas operasional juga merupakan indikator yang lebih *reliable* sebagai pengukur kinerja perusahaan dibandingkan *reported earning* (Cheng *et al.*, 1997). Dengan arus kas dari aktivitas operasional yang baik menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik sehingga layak mendapatkan kredit dari bank.

4.5.5.4 Pengaruh Peluang Pertumbuhan terhadap Probabilita Kelayakan Pemberian Kredit Bank

Sementara itu, variabel independen terakhir pada penelitian ini GROWTHOPP. Variabel ini juga berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel dependen pada penelitian ini, yaitu probabilita suatu perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit dari bank. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi dan nilai beta sebesar 0,019 dan 0,132. Nilai 0,019 tersebut signifikan terhadap *p-value* 0,05. Jadi, hipotesis keempat pada penelitian ini, yaitu peluang pertumbuhan berpengaruh positif terhadap probabilita suatu perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit dari bank diterima.

Hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi biasanya melakukan investasi pada proyek yang memiliki NPV yang tinggi (Jensen, 1986). Perusahaan biasanya mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Dengan investasi tersebut, perusahaan akan mendapatkan pengembalian yang tinggi. Perusahaan yang mendapatkan pengembalian yang tinggi, akan mampu membayar pinjaman dan bunganya kepada bank. Perbankan akan bersedia untuk memberikan kredit kepada perusahaan tersebut karena pengembalian perusahaan yang tinggi tersebut. Nilai suatu perusahaan dapat dilihat dari peluang pertumbuhan perusahaan tersebut (Myers, 1977).

4.5.5.5 Pengaruh Ukuran dan Umur Perusahaan terhadap Probabilita Kelayakan Pemberian Kredit Bank

Variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini adalah ukuran perusahaan (SIZE) dan umur perusahaan (AGE). Untuk SIZE, variabel ini berpengaruh positif dan *marginally significant* terhadap probabilita kelayakan kredit. Pengaruh positif tersebut dapat dilihat dari beta korelasi dari SIZE sebesar 0,173. Pengaruh signifikan secara marginal dapat dilihat dari angka signifikansi sebesar 0,051 dimana nilai

tersebut di bawah dari *p-value* 0,1. Hal ini sejalan dengan penelitian Firth *et al.* (2009), bahwa *size* perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap akses ke *bank finance*. Menurut penelitian Firth *et al.* (2009) tersebut, 33% perusahaan yang berukuran besar mendapatkan akses terhadap *bank finance* dan hanya 10,8% perusahaan yang berukuran kecil yang mendapatkan akses terhadap *bank finance*. Selain itu, pada penelitian tersebut, ukuran perusahaan juga berpengaruh positif secara signifikan terhadap ukuran pinjaman *bank finance* yang diterima perusahaan.

Hasil ini menunjukkan bahwa bank akan lebih percaya terhadap perusahaan yang lebih besar dalam memberi keputusan memberikan kredit. Semakin besar perusahaan, perusahaan tersebut dianggap memiliki pendapatan dan keuntungan yang lebih besar dan lebih mampu mengelola pendapatan, pengeluaran dan kegiatan bisnisnya secara efisien dibandingkan perusahaan kecil. Selain itu, perusahaan yang berukuran besar juga cenderung memberikan informasi lebih lanjut karena adanya permintaan investor akan informasi, biaya rata-rata yang lebih rendah untuk dalam pengumpulan dan penyebaran informasi (Hossan *et al.*, 1995 dalam Anggarini, 2010). Menurut Storey (2004), semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan diharapkan semakin mempunyai kemampuan dalam melunasi kewajiban di masa depan, sehingga perusahaan dapat menghindari permasalahan keuangan.

Variabel kontrol yang lain juga berpengaruh tidak signifikan, yaitu AGE. Variabel AGE pada penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas kelayakan mendapatkan kredit dari bank tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan. Hal ini serupa dengan penelitian Firth *et al.* (2009), bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap akses ke *bank finance*. Pengaruh yang tidak signifikan ini menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak mempengaruhi keputusan suatu bank untuk bersedia memberikan kredit atau tidak. Bank tidak terlalu mementingkan kapan suatu perusahaan menjadi perusahaan publik. Umur perusahaan sejak IPO tidak menjamin suatu perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit dan memiliki kemampuan untuk membayar kredit di masa depan.

4.5.6 Pengujian Akurasi Model

Pengujian akurasi model dilakukan untuk menunjukkan seberapa baik hasil prediksi model dan sebagai ukuran dari akurasi model, yang dilihat dari *classification table*. *Classification table* menghitung nilai estimasi yang benar (*correct*) dan salah (*incorrect*). Pada kolom terdapat dua nilai prediksi dari variabel dependen, yaitu layak mendapatkan kredit (1) dan tidak layak mendapatkan kredit (0). Pada baris menunjukkan menunjukkan nilai sampel sesungguhnya dari variabel dependen. Matriks klasifikasi akan menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan suatu perusahaan layak mendapatkan kredit atau tidak (Nachrowi, 2005).

Tabel 4.29 Classification Table

Kelayakan Pemberian Kredit Bank Menurut Infobank	Kelayakan Pemberian Kredit Bank Berdasarkan Model Penelitian		Total
	Layak	Tidak Layak	
Layak	122	15	137
Tidak Layak	39	39	78
Total	54	161	215

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 122 perusahaan yang tepat diprediksi layak oleh model regresi logistik dan 39 perusahaan yang tepat diprediksi tidak layak oleh model regresi logistik. Penelitian ini menguji keakuratan dari model regresi logistik dalam memprediksi probabilitas kelayakan kredit seperti kasus pada White *et al.* (1993) untuk memprediksi apakah perusahaan akan mengalami kebangkrutan atau tidak di masa depan. Prediksi yang dilakukan oleh kreditur untuk melihat apakah suatu kemampuan suatu perusahaan di masa depan akan sangat menguntungkan kreditur. Ketika suatu perusahaan dinyatakan bangkrut, kreditur sering kehilangan pembayaran pokok pinjaman dan bunga dari perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, bank sebagai kreditur harus melakukan suatu prediksi apakah perusahaan layak atau tidak mendapatkan kredit.

Tabel 4. 30 Percentage of Accuracy

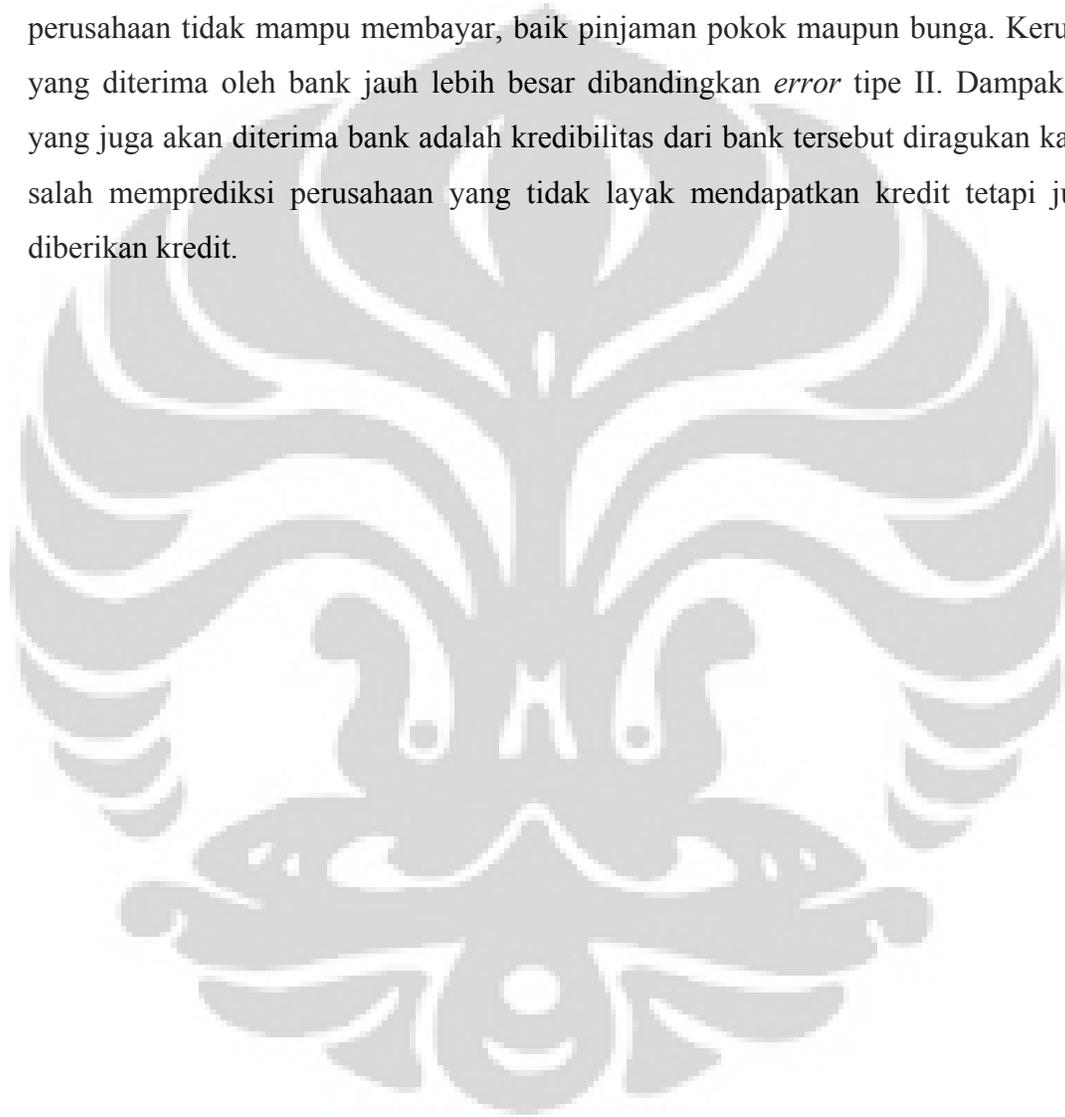
Kriteria	Jumlah Sampel	Percentage
Layak	122	56,74%
Tidak Layak	39	18,14%
Total	161	74,88%

Pengujian keakuratan model menunjukkan terdapat 74,88% dari total sampel yang diprediksi secara tepat oleh model regresi logistik, sisanya 25,12% dari total sampel tidak diprediksi secara tepat oleh model regresi logistik. Evaluasi keakuratan dari model prediksi tidak akan cukup. Bank juga harus memperhatikan biaya atau keuntungan yang akan diterima dari prediksi yang salah maupun yang benar. Menurut Sekaran dan Bougie (2010), terdapat dua tipe *error* dalam pengujian hipotesis, dimana *error* tipe I terjadi ketika menolak hipotesis nol yang sebenarnya benar atau seharusnya diterima, sedangkan *error* tipe II terjadi ketika menerima atau gagal hipotesis nol yang seharusnya ditolak.

Serupa dengan kasus pada White *et al.* (1993), dimana *error* tipe I terjadi salah mengklasifikasikan perusahaan dengan memprediksi tidak bangkrut padahal kenyataannya perusahaan tersebut akan bangkrut. Serupa dengan hasil dari tabel klasifikasi, sedangkan *error* tipe II terjadi ketika salah mengklasifikasi dengan memprediksi suatu perusahaan akan bangkrut padahal tidak bangkrut. Pada penelitian ini, *error* tipe I terjadi saat model regresi memprediksi perusahaan layak mendapatkan kredit padahal menurut observasi dari Infobank dianggap tidak layak mendapatkan kredit dan *error* tipe II ketika model regresi memprediksi perusahaan tidak layak mendapatkan kredit padahal menurut observasi dari Infobank layak mendapatkan kredit. Pada penelitian ini, terjadi *error* tipe I pada 39 perusahaan dan *error* tipe II pada 15 perusahaan.

Menurut Altman *et al.* (1977) dalam White *et al.* (1993), biaya yang harus diterima bank akibat *error* tipe I lebih besar, bahkan 35 kali lebih besar biaya yang harus diterima bank dibandingkan biaya akibat *error* tipe II. *Error* tipe II yang

terjadi dapat berdampak pada bank yang akan kehilangan debitur dan pendapatan yang seharusnya bisa diterima jika memberikan kredit pada perusahaan tersebut. *Error* tipe I lebih berdampak fatal bagi bank karena memberikan kredit kepada perusahaan yang sebenarnya tidak layak mendapatkan kredit. Hal ini akan berakibat pada kerugian atau risiko yang akan diterima bank, seperti kredit macet atau perusahaan tidak mampu membayar, baik pinjaman pokok maupun bunga. Kerugian yang diterima oleh bank jauh lebih besar dibandingkan *error* tipe II. Dampak lain yang juga akan diterima bank adalah kredibilitas dari bank tersebut diragukan karena salah memprediksi perusahaan yang tidak layak mendapatkan kredit tetapi justru diberikan kredit.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh efektivitas dewan komisaris dan komite audit, arus kas dari aktivitas operasional, dan peluang pertumbuhan terhadap probabilitas kelayakan suatu perusahaan mendapatkan kredit dari perbankan. Sesuai pembahasan hasil yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas dewan komisaris yang diproksikan oleh empat kategori atau karakteristik dewan komisaris, yaitu independensi, aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas kelayakan suatu perusahaan mendapatkan kredit dari perbankan. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa efektivitas dewan komisaris dapat membuat suatu perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit bank. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris yang efektif akan meningkatkan fungsi *monitoring* terhadap kinerja manajemen sehingga manajemen dapat menghasilkan laporan keuangan yang *reliable* dan berkualitas. Dengan laporan keuangan tersebut, bank akan menganalisis laporan tersebut dan dapat memberikan keputusan bahwa suatu perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit dari bank.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas komite audit yang diproksikan oleh tiga kategori atau karakteristik komite audit, yaitu aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas kelayakan suatu perusahaan mendapatkan kredit dari perbankan. Serupa dengan dewan komisaris, keberadaan komite audit dalam perusahaan juga penting, terutama dalam menelaah laporan keuangan perusahaan sehingga perusahaan memiliki laporan keuangan yang berkualitas dan *reliable*. Dengan laporan keuangan tersebut, perusahaan tersebut akan dianggap layak mendapatkan kredit bank.

3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa arus kas dari aktivitas operasional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas suatu perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit dari perbankan. Bank dapat menganalisis kinerja keuangan perusahaan melalui arus kas dari aktivitas operasional perusahaan selain dari kinerja keuangan, seperti rasio-rasio keuangan untuk memastikan apakah perusahaan layak atau tidak mendapatkan kredit. Dari arus kas aktivitas operasional, bank dapat menganalisis kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas terutama dari kegiatan operasionalnya sehari-hari. Semakin tinggi arus kas aktivitas operasional perusahaan, menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas tinggi dan akan mampu membayar kewajibannya di masa yang akan datang. Sebaliknya, semakin rendah arus kas aktivitas operasional perusahaan bahkan minus menunjukkan bahwa perusahaan kurang mampu menghasilkan kas dan berisiko untuk memberikan kredit kepada perusahaan tersebut.
4. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa peluang pertumbuhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas suatu perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit dari perbankan. Dengan peluang pertumbuhan yang tinggi, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki peluang investasi yang tinggi pula. Perusahaan akan mampu menghasilkan pengembalian (*return*) yang tinggi apabila melakukan investasi pada proyek yang memiliki NPV tinggi. Dengan tingkat pengembalian yang tinggi, perusahaan dianggap mampu untuk membayar kewajibannya nanti di masa akan datang sehingga dianggap layak mendapatkan kredit dari bank.
5. Model regresi logistik pada penelitian ini dapat memprediksi probabilitas kredit secara tepat sebesar 74,48% dari keseluruhan sampel. Terdapat 39 perusahaan yang mengalami *error* tipe I dimana perusahaan yang tidak layak menurut Infobank diprediksi layak oleh model penelitian dan 15 perusahaan yang mengalami *error* tipe II dimana perusahaan yang layak mendapat kredit diprediksi tidak layak oleh model penelitian. Hal tersebut akan merugikan bank yang akan memberikan kredit. *Error* tipe II menyebabkan bank kehilangan

debitur atau pendapatan, sementara *error* tipe I berdampak lebih fatal dimana bank akan kehilangan uang yang telah dipinjamkan kepada perusahaan dan kehilangan pendapatan karena perusahaan tidak mampu membayar pokok pinjaman dan bunga di masa depan.

Penelitian ini juga menggunakan dua variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan dan umur perusahaan. Dari hasil regresi model penelitian, hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap probabilita kelayakan kredit. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka bank akan lebih percaya untuk memberikan kredit. Selain itu, ukuran perusahaan pada penelitian ini diukur melalui total aset perusahaan dimana menurut Storey (2004), semakin besar total aset dianggap perusahaan semakin mampu untuk melunasi kewajiban di masa mendatang. Untuk umur perusahaan, tidak ada pengaruh yang signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa bank tidak mempedulikan umur perusahaan. Semakin tua umur perusahaan tidak menjamin kemampuan perusahaan untuk membayar kredit di masa depan.

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat membantu akademisi berikutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini. Adapun keterbatasan dalam penelitian dan saran untuk ini penelitian selanjutnya adalah:

1. Sampel data pada penelitian ini bersifat *cross sectional* dimana penelitian dilakukan dalam 1 tahun observasi saja dikarenakan observasi probabilita kelayakan kredit dilakukan majalah Infobank pada tahun 2011. Selain itu, masih ada beberapa perusahaan yang laporan yang tidak berhasil didapatkan sehingga hal tersebut membatasi jumlah perusahaan yang dapat dijadikan sampel pada penelitian ini. Dengan keterbatasan data perusahaan tersebut, maka jumlah sampel yang dapat digunakan pada penelitian ini adalah hanya 215 perusahaan non-keuangan dari 421 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya dapat menambah sampel dengan menambah jumlah tahun observasi.

2. Banyak sampel pada penelitian ini tidak menyediakan informasi yang lengkap, terutama mengenai komite audit sehingga hal tersebut menyebabkan banyak sampel yang mendapatkan skor rendah pada saat mengukur efektifitas komite audit padahal ada kemungkinan mereka memiliki komite audit yang efektif dan dapat menerima skor yang tinggi. Asumsi pada penelitian ini apabila tidak ada informasi maka diberikan nilai *poor* sehingga mengakibatkan beberapa perusahaan mendapat skor rendah pada komite auditnya. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk mengukur efektivitas dewan komisaris dan komite audit tidak hanya melihat dan menganalisis dari laporan tahunan perusahaan saja, tetapi bisa menambah pengukuran dengan menyebarkan kuesioner atau melakukan wawancara secara langsung.
3. Penelitian ini hanya menghasilkan nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 25,8%, yaitu hanya 25,8% variabel independen dapat menjelaskan probabilita kelayakan kredit. Nilai tersebut tidak terlalu tinggi penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lain, seperti kepemilikan saham *board* atau *lagged ROS* atau variabel kontrol, seperti *business group* (Firth *et al.*, 2009).
4. Penelitian ini menggunakan hasil perhitungan total skor dewan komisaris dan komite audit untuk mengukur efektivitas dewan komisaris dan komite audit sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hermawan (2009), dimana skor tersebut diukur melalui karakteristik-karakteristik, yaitu independensi, aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi. Sistem penelitian ini mengadopsi *checklist* yang dikembangkan oleh IICD. Walaupun *checklist* dapat dipercaya karena diuji melalui *Cronbach's Alpha*, akan tetapi *scoring* tersebut cenderung subjektif dan selalu ada kesempatan untuk dilakukan penyesuaian lebih lanjut di masa yang akan datang sehingga penelitian selanjutnya dapat melakukan penilaian atau *judgement* efektivitas dewan komisaris dan komite audit secara konsisten.
5. Terdapat perusahaan yang tidak melakukan perdagangan saham atau "saham tidur" sehingga tidak tersedia harga saham pada tanggal 30 Desember 2009 dan

2010. Akibatnya, apabila harga saham tidak tersedia, harganya mengikuti harga saham tanggal sebelumnya yang paling dekat, minimal pada bulan yang sama. Pada penelitian selanjutnya, dapat dilakukan pengeluaran sampel tersebut karena kurang baik dijadikan sampel untuk mengukur probabilita kelayakan kredit.

6. Terdapat perusahaan pada penelitian ini yang memiliki ekuitas negatif sehingga perusahaan tersebut kurang baik untuk dijadikan *proxy* untuk mengukur probabilita kelayakan kredit. Saran untuk penelitian selanjutnya untuk mengeluarkan perusahaan yang memiliki ekuitas negatif tersebut.

5.3 Saran

Hasil penelitian ini memberikan saran bagi beberapa pihak yang diharapkan dapat dilakukan agar hasil penelitian ini berguna bagi beberapa pihak.

5.3.1 Bagi Perusahaan

Penelitian ini memberikan saran bagi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yaitu perusahaan-perusahaan tersebut lebih mengungkapkan informasi-informasi penting mengenai dewan komisaris dan komite audit karena beberapa perusahaan tidak menyediakan laporan mengenai dewan komisaris dan komite audit dengan lengkap, terutama mengenai komite audit. Hal tersebut sangat membatasi penelitian ini sehingga banyak perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik tetapi menerima skor efektivitas komite audit yang rendah.

Selain itu, perusahaan-perusahaan mendapatkan informasi bahwa efektivitas dewan komisaris dan komite audit, arus kas dari aktivitas operasional, dan peluang pertumbuhan berpengaruh positif terhadap layak atau kurang layaknya perusahaan tersebut mendapatkan kredit, di luar dari analisis kinerja keuangan. Oleh sebab itu, saran bagi perusahaan adalah agar lebih meningkatkan lagi penerapan *good corporate governance* dalam perusahaannya, mengangkat anggota dewan komisaris dan komite audit yang berkualitas dan profesional. Selain itu, perusahaan juga lebih meningkatkan lagi independensi dari dewan komisaris, dengan memilih anggota

dewan komisaris yang independen dan berkualitas, aktif dalam perusahaan, memiliki jumlah anggota yang efisien, dan kompeten di bidangnya dan posisinya sebagai anggota dewan komisaris. Begitu pula dengan komite audit, perusahaan disarankan untuk memilih anggota komite audit yang aktif, memiliki jumlah anggota yang efisien, serta kompeten dalam menjalankan tugasnya di perusahaan.

5.3.2 Bagi Perbankan

Adapun saran bagi perbankan yang ada di Indonesia adalah ketika terdapat perusahaan yang mengajukan kredit kepada bank, bank sebaiknya tidak hanya menganalisis kinerja keuangan mereka saja, tetapi juga bagaimana keberadaan dewan komisaris dan komite audit pada perusahaan tersebut. Perbankan dapat menganalisis perusahaan melalui efektivitas dewan komisaris dan komite audit dalam perusahaan, yang diukur melalui independensi, aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi karena keberadaan dewan komisaris dan komite audit, terutama yang bekerja secara efektif dapat meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Bank juga dapat menganalisis arus kas dari aktivitas operasional perusahaan tersebut karena apabila perusahaan memiliki arus kas yang rendah bahkan minus, hal tersebut dapat dijadikan gambaran bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang rendah dalam menghasilkan kas sehingga akan sangat berisiko bagi perbankan yang akan memberikan kredit bagi perusahaan tersebut. Selain itu, perbankan juga dapat menganalisis peluang pertumbuhan karena nilai suatu perusahaan dapat dilihat dari peluang pertumbuhan dan *asset-in-place* pada perusahaan tersebut (Myers, 1977).

5.3.3 Bagi Bapepam-LK

Saran bagi Bapepam-LK adalah Bapepam-LK dapat menambah, menyesuaikan, atau memperketat peraturan mengenai *good corporate governance*, terutama mengenai komite audit dalam perusahaan karena banyak perusahaan yang kurang memberikan informasi mengenai komite audit dalam laporan tahunan perusahaannya. Selain itu, Bapepam-LK lebih memperketat lagi aturan mengenai

good corporate governance, terutama keberadaan dewan komisaris dan komite audit dalam perusahaan agar tercapai lingkungan bisnis yang sehat dan kinerja yang baik di dalam perusahaan tersebut.

5.3.4 Bagi Bank Sentral

Saran bagi Bank Sentral adalah memberikan kebijakan bagi perbankan di Indonesia ketika mempertimbangkan pemberian kredit kepada suatu perusahaan untuk tidak hanya melakukan analisis terhadap kinerja keuangan perusahaan saja, seperti rasio keuangan, tetapi juga melakukan analisis terhadap *corporate governance* perusahaan melalui keberadaan dewan komisaris dan komite audit. Selain itu, dapat juga dilakukan analisis terhadap arus kas dari aktivitas operasional, dan peluang pertumbuhan perusahaan. Bank Sentral dapat membantu perbankan dalam menambah kebijakan atau peraturan mengenai analisis terhadap perusahaan ketika ada pengajuan kredit dari perusahaan-perusahaan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Adams, R., and Mehran, H. (2002). Board structure and banking firm performance. *Working Paper*, Federal Reserve Bank of New York.
- Agrawal, A., and Chadha, S. (2005). Corporate governance and accounting scandals. *Journal of Law and Economics* 48, 371–406.
- Anderson, Kirsten L., Deli, Daniel N., and Gillian, Stuart L. (2003). Board of directors, audit committee, and the information content of earnings. *Working Paper Series*, University of Delaware.
- Anderson, Ronald C., Mansi, Sattar A., and Reeb, David M. (2004). Board characteristics, accounting report integrity, and the cost of debt. *Journal of Accounting and Economics* 37, 315-342.
- Anggarini. (2010). Pengaruh karakteristik komite audit terhadap financial distress. *Skripsi Universitas Diponegoro*.
- Ashbaugh-Skaife, H., Collins, D., and LaFond, R. (2006). The effects of corporate governance on firms' credit ratings. *Journal of Accounting and Economics* 42, 203–243.
- Ball, R.T., Bushman, R.M., and Vasvari, F.P. (2008). The debt-contracting value of accounting information and loan syndicate structure. *Journal of Accounting Research* 46, 247–287.
- Bank Indonesia. *Sistem Informasi Prosedur Memperoleh Kredit (SIPMK)*. Desember 12, 2011. <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/00A32509-E25E-4E28-A29499EEC0B12554/15876/KreditSIPMK1.pdf>
- Baskin, J. (1989). Dividend policy and the volatility of common stock. *Journal of Portfolio Management*, 15(3), 19-25.
- Beasley, Mark S. (1996). An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement fraud. *The Accounting Review*, vol 71 no. 4, p. 443-465.
- Bhojraj, Sanjeev and Sengupta, Partha. (2003). Effect of corporate governance on bond ratings and yields: the role of institutional investors and outside directors. *Journal of Business* 76 (Juli), 455-475.

- Blom, Jasper and Schauten, Marc B. J. (2006). Corporate governance and the cost of debt. Erasmus University Rotterdam.
- Brickley, J., Coles, J., and Terry, R. (1994). Outside directors and the adoption of poison pills. *Journal of Financial Economics* 35, 371-390.
- Brigham, Eugene F., and Daves, Philip R. (2003). *Intermediate financial management* (8th edition). USA: Thompson South Western.
- Byrd, J., and Hickman, K. (1992). Do outside directors monitor managers? evidence from tender offer bids. *Journal of Financial Economics* 32, 195-222.
- Cheng, C.S. Agnes, Liu, Chao-Shin, and Schaefer, Thomas F. (1997). The value relevance of SFAS No. 95 cash flow from operations as assessed by security market effects. *Accounting Horizons*, Vol. 11 No. 3, 1-15.
- Chen, Yu-Mei and Jian, Jiu-Young (2006). The impact of information disclosure and transparency system (IDTRs) and corporate governance structure on cost of debt. National Yunlin University of Science and Technology.
- Cohen, J., Wright, A., and Khrisnamoorthy, G. (2004). The corporate governance mosaic and financial reporting quality. *Journal of Accounting Literature*, 87-152.
- Eng, L.L., and Mak, Y.T. (2003). Corporate governance and voluntary disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 22, 325-345.
- Fama, E.F. (1980). Agency problems and the theory of the firm. *Journal of Political Economy* 88, 288-307.
- Fama, E. and M., Jensen. (1983). Separation of ownership and control. *Journal of Law and Economics* 26, 301-326.
- Firth, Michael., Lin, Chen and L., Wong Sonia M. (2009). Inside the black box: bank credit allocation in China's private sector. *Journal of Banking and Finance* 33, 1144-1155.
- Forum Corporate Governance Indonesia. (2001). *Tata kelola perusahaan (corporate governance): peranan dewan komisaris dan komite audit dalam pelaksanaan corporate governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Jilid II. Diambil dari http://www.cic-fcgi.org/news/files/FCGI_Booklet_II.pdf.
- Gaver, J., Gaver, K. (1993). Additional evidence on the association between the investment opportunity set and corporate financing, dividend, and compensation policies. *Journal of Accounting and Economics* 16, 125-160.

- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Grossman, S., and Hart, O.D. (1986). The costs and benefits of ownership: A theory of vertical and lateral integration. *Journal of Political Economy* 44, 691–719.
- Gujarati, D.N. (2003). *Basic Econometrics* (fourth ed). Singapore: McGraw-Hill.
- Gul, F. A., Tsui, J.S. (1998). A test of free cash flow and debt monitoring hypothesis: evidence from audit pricing. *Journal of Accounting and Economics* 24, 219-237.
- Jensen, Michael C. (1996). Agency cost of free cash flow, corporate finance, and takeovers. *The American Economic Review* vol 76 (May), 323-329.
- Jensen, M., Meckling, W. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305–360.
- Hermawan, Ancella A. (2009). Pengaruh efektifitas dewan komisaris dan komite audit, kepemilikan oleh keluarga, dan peran monitoring bank terhadap kandungan informasi laba. *Disertasi Universitas Indonesia*.
- Hutajulu, Margaret F. (2011). Pengaruh efektivitas dewan komisaris pada keputusan investasi barang modal terhadap nilai perusahaan. *Tesis Universitas Indonesia*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 02*. (Revisi 2009): Laporan arus kas. Salemba Empat, Jakarta
- Infobank. (2011, April). *Kredit ke emiten: emiten properti dan real estate mendominasi*. Jakarta, 77-83.
- Klein, A. (1998). Firm performance and board committee structures. *Journal of Law and Economics* 41, 275–303.
- Klein, A., (2002a). Audit committee, board of director characteristics, and earnings management. *Journal Accounting and Economics* 33, 375–400.
- Klein, A. (2002b). Economic determinants of audit committee independence. *Accounting Review* 77, 435–452.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. <http://www.knkg-indonesia.com>
- Kusumastuti, S., Supatmi, dan Sastra P. (2007). Pengaruh Board Diversity Terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif Corporate Governance. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 9, 88-98.

- Lefort, Fernando, and Urzúa, Francisco. (2008). Board independence, firm performance and ownership concentration: evidence from Chile. *Journal of Business Research* 61 (2008) 615–622.
- Maher, Maria and Andersson, Thomas. (2000). Corporate governance: effects on firm performance and economic growth. Organisation for Economic Co-operation Development, Oxford University Press.
- Monks, R., Minow, N. (1995). *Corporate governance*. Blackwell Publishing, New York, NY.
- Myers, S. (1977). Determinants of corporate borrowing. *Journal of Financial Economics* 5, 147–175.
- Nachowi, Djajal Nachrowi dan Usman, Hardius. (2005). *Penggunaan teknik ekonometri: pendekatan populer dan praktis dilengkapi teknik analisis dan pengolahan data dengan menggunakan paket program SPSS*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- New York Stock Exchange and National Association of Securities Dealers. (1999). *Report and recommendations of the blue ribbon committee on improving the effectiveness of corporate audit committees*. Diambil dari <http://www.kpmg.com/aci/docs/blueribbon.pdf>.
- Organization for Economic Cooperation and Development (2004). *OECD Principles of Corporate Governance*. <http://www.oecd.org>.
- Indonesian Institute of Corporate Governance. *Pengertian dan Konsep Corporate Governance*. September 2011. <http://www.iicg.org>
- Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-339/BEJ/07-2001 tanggal 20 Juli 2001) tentang “Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa”
- Peraturan Pencatatan Efek No. I-A (Lampiran II Kep-30/BEJ/07-2004) tentang “Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa”.
- Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004) tentang “Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit”.
- Petra, S. (2007). The effects of corporate governance on the informativeness of earnings. *Economics and Governance* 8, 129–152.

- Pincus, K., Rusbarsky, M., and Wong, J. (1989). Voluntary formation of corporate audit committees among NASDAQ firms. *Journal of Accounting and Public Policy* 8, 239-265.
- Piot, Charles and Missonier-Piera, Franck (2007). Corporate Governance, Audit Quality, and the Cost of Debt Financing of French Listed Companies. *Associate Professor, GSCM - Montpellier Business School, France*
- Psillaki, Maria, Tsolas, Ioannis E., and Margaritis, Dimitris. (2010). Evaluation of credit risk based on firm performance. *European Journal of Operational Research* 201 (2010) 873–881.
- Sekaran, Uma and Bougie, Roger. (2010). *Research method for business: a skill building approach (fifth ed)*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Shleifer, A., and Vishny, R. (1997). A survey of corporate governance. *Journal of Finance* 52, 737-783.
- Skinner, D. (1993). The investment opportunity set and accounting procedure choice. *Journal of Accounting and Economics* 16, 407–445.
- Storey, D. (1994). *Understanding the small business sector*. London: Routledge.
- Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 perihal “Keanggotaan Komite Audit”.
- Turnbull, S. (1997). Corporate governance: it’s scope, concerns, and theories. *Corporate Governance: An International Review* 5, 180-205.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang “Perbankan”.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan”
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas”
- Uzun, H., Szewczyk, Samuel H., and Varma, Raj. (2004). Board composition and corporate fraud. *Financial Analysts Journal*, 33-43.
- Vafeas, N. (1999). Board meeting frequency and firm performance. *Journal Finance Economics* 53, 113–142.

Wagner, Alexander F. (2011). Board independence and competence. *Journal Finance Intermediation* 20 (2011) 71–93.

Weisbach, M. S. (1988). Outside directors and CEO turnover. *Journal of Financial Economics*, 20(1), 431-460.

White, Gerald I., Sondhi, Ashwinpaul C., Fried Dov. (1993). *The Analysis and Use of Financial Statement* (special edition for CFA Candidates). United States of America: John Wiley & Sons, Inc.

www.bi.go.id Download tanggal 12 Desember 2011

www.idx.co.id Diakses mulai Tanggal 1 Agustus 2011

www.yahoofinance.com Diakses mulai Tanggal 1 November 2011

Xie, B., Davidson III, W.N., and DaDalt, P.J. (2003). Earnings management and corporate governance: the roles of the board and the audit committee. *Journal of Corporate Finance* 9, 295–316.

Yu, Fan. (2004). Accounting transparency and the term structure of credit spreads. *Journal of Financial Economics* 75, 53-84

Lampiran 1
Kuesioner Penilaian Efektivitas Dewan Komisaris yang Dikembangkan oleh
Hermawan (2009)

No.	Description	<i>Good</i>	<i>Fair</i>	<i>Poor</i>
A. Board Independence				
1	<p>Among board of commissioners, how many are independent commissioners?</p> <p>If more than 50% of the board is independent, the company will be given a '<i>good</i>' score. Firms with 30% to 50% of the board made up of independent commissioners will earn a '<i>fair</i>' score. If less than 30% of the board is independent, or no information, the company will earn a '<i>poor</i>' score.</p> <p>Sumber: IICD (2005)</p>			
2	<p>Is the chairman an independent commissioner?</p> <p>If the chairman is an independent commissioner, the firm will earn a '<i>good</i>' score and '<i>poor</i>' score otherwise or if no information.</p> <p>Sumber: IICD (2005)</p>			
3	<p>Does the company state in its annual report the definition of independence?</p> <p>Firms with a clear definition of independence in the annual report will earn a '<i>good</i>' score. A '<i>poor</i>' score will be given the company does not define independence or if no information.</p> <p>Sumber: IICD (2005)</p>			
4	<p>Among board of commissioners, how many are employees of shareholders or affiliated companies owned by shareholders?</p> <p>If there is more than 50% of the board, or no information, the company will be given a '<i>poor</i>' score. If there is 30% to 50% of the board, the firm will earn a '<i>fair</i>' score. If less than 30% of the board, the company will earn a '<i>good</i>' score.</p> <p>Sumber: Lampiran Kep-339/BEJ/07-2001</p>			

No.	Description	<i>Good</i>	<i>Fair</i>	<i>Poor</i>
5	<p>Does the company have a nominating committee and remuneration committee?</p> <p>Firms that have both committees will earn a ‘<i>good</i>’ score. Firms that have at least one of two committees will earn a ‘<i>fair</i>’ score. A ‘<i>poor</i>’ score will given to the company that does not have any of these committees or if no information.</p> <p>Sumber: Komite Nasional Kebijakan <i>Governance</i> (2006)</p>			
6	<p>What is the average years of the board of commissioner’s tenure?</p> <p>If the average tenure of the board is less than 5 years, the company will receive a ‘<i>good</i>’ score. Ig the average tenure of board is between 5 and 10 years, the score is ‘<i>fair</i>’, and if the average tenure is more than 10 years, the score will be ‘<i>poor</i>’.</p> <p>Sumber: Anderson <i>et al.</i> (2004)</p>			

B. Board Activities

7	<p>Does the company clearly describe the board responsibilites?</p> <p>If board responsibilites are clearly stated and disclosed, the firm will receive a ‘<i>good</i>’ score. Company that has not defined board responsibilities, or no information will earn a ‘<i>poor</i>’ score</p> <p>Sumber: IICD (2005)</p>			
8	<p>How many meetings are held during the year?</p> <p>If the board meets more than six times, the firm earns a ‘<i>good</i>’ score. If 4-6 meeting, the firm is scored as ‘<i>fair</i>’, while less than four times or no information is scored as ‘<i>poor</i>’.</p> <p>Sumber: IICD (2005)</p>			

No.	Description	<i>Good</i>	<i>Fair</i>	<i>Poor</i>
9	<p>What is attendance performance of the board members during the year?</p> <p>If the overall board attendance for the year is greater than 80%, the firm earns a '<i>good</i>' score. If attendance is 70-80% receives a '<i>fair</i>' score, and less than 70% or no information receives a '<i>poor</i>' score.</p> <p>Sumber: IICD (2005)</p>			
10	<p>Does the company have a separate board of commissioner's report describing their responsibilities in reviewing firm's financial statement?</p> <p>Firms will receive a '<i>good</i>' score if they produce a board of com's report as part of the annual report. A score of '<i>poor</i>' will be awarded if there is no report from board or no information.</p> <p>Sumber: IICD (2005)</p>			
11	<p>Does the BOC conduct annual performance assessment of the BOD?</p> <p>If the board evaluates the performance of the top executive officer, the company received a '<i>good</i>' score and '<i>poor</i>' score otherwise or no information.</p> <p>Sumber: IICD (2005)</p>			
12	<p>Does the board conduct assessment of business prospects prepared by the BOD?</p> <p>If the board assess the business prospects, the company received a '<i>good</i>' score and '<i>poor</i>' score otherwise or no information.</p> <p>Sumber: Kep-134/BL/2006</p>			

C. Board Size

13	<p>What is the size of the board of commissioner?</p> <p>A '<i>good</i>' score will be given to firm with 5-10 board members. Firm with board size of 11-15 members received a '<i>fair</i>' score. Boards with size of 16 or more or less than 5 members, or no information will receive a '<i>poor</i>' score.</p> <p>Sumber: IICD (2005)</p>			
----	---	--	--	--

No.	Description	<i>Good</i>	<i>Fair</i>	<i>Poor</i>
D. Board Expertise and Competence				
14	<p>Does the board member have a sophisticated knowledge about accounting and finance?</p> <p>If there is more than 50% of the board has the knowledge, the company will be given a ‘<i>good</i>’ score. If there is 30% to 50% of the board, the firm will earn a ‘<i>fair</i>’ score. If less than 30% of the board, or no information, the company will earn a ‘<i>poor</i>’ score.</p> <p>Sumber: Xie <i>et al.</i> (2003)</p>			
15	<p>Does the board member have sufficient experience about business (i.e. has the experience as a member of the board of commissioners in any company including this company or as a CEO in other company)?</p> <p>If there is more than 50% of the board has the experience, the company will be given a ‘<i>good</i>’ score. If there is 30% to 50% of the board, the firm will earn a ‘<i>fair</i>’ score. If less than 30% of the board, or no information, the company will earn a ‘<i>poor</i>’ score.</p> <p>Sumber: Chen <i>et al.</i> (2006)</p>			
16	<p>Does the board member have a sophisticated knowledge about the company’s business?</p> <p>If there is more than 50% of the board has the knowledge, the company will be given a ‘<i>good</i>’ score. If there is 30% to 50% of the board, the firm will earn a ‘<i>fair</i>’ score. If less than 30% of the board, or no information, the company will earn a ‘<i>poor</i>’ score.</p> <p>Sumber: Xie <i>et al.</i> (2003)</p>			

No.	Description	Good	Fair	Poor
17	<p>What is the average age of the board?</p> <p>If the average age of the board is more than 40 years old, the company will receive a 'good' score. If the average of the board is between 30 to 40 years old, the score is 'fair', and if the average age is below 30 years old, the score will be 'poor'.</p> <p>Sumber: Anderson <i>et al.</i> (2004)</p>			
	Total Nilai			

Kriteria Penetapan Nilai untuk Masing-masing Pertanyaan pada *Scoring Efektivitas Dewan Komisaris Berdasarkan Penelitian Hermawan (2009)*

A. Independensi Dewan Komisaris

1. Jumlah proporsi dewan komisaris. Matolesy *et al.* (1997) dalam Kusumastuti *et al.* (2007) berpendapat bahwa dewan yang didominasi oleh direksi dari perusahaan (*inside directors*) cenderung akan memiliki tata kelola yang lemah (*weak governance*), hal ini dikarenakan sebagai orang dalam, mereka wajib untuk memonitor dirinya sendiri (*self-monitor*). Sedangkan dewan yang didominasi oleh *outsider* akan menghasilkan tata kelola yang lebih kuat karena mereka bertindak sebagai pihak yang independen. Direksi PT Bursa Efek Jakarta dengan suratnya Nomor: Ke-399/BEJ/07-2001 tanggal 21 Juli 2001 menetapkan bahwa komisaris independen harus berjumlah minimal 30% dari jumlah keseluruhan anggota komisaris. Kriteria penilaian:

Good : apabila jumlah proporsi komisaris independen di atas 50%.

Fair : apabila jumlah proporsi komisaris independen di antara 30%-50%. Pertimbangan ini sesuai dengan jumlah batasan yang telah ditetapkan oleh BEI.

Poor : apabila jumlah proporsi komisaris independen di bawah 30%.

2. Komisaris utama merupakan komisaris independen. Komisaris utama memiliki wewenang dalam menetapkan keputusan akhir dalam rapat dewan

komisaris dan memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan komisaris lainnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan independensi dalam setiap keputusan yang diambil oleh komisaris utama. Kriteria penilaian:

Good : apabila komisaris utama merupakan komisaris yang independen.

Poor : apabila komisaris utama bukan merupakan komisaris yang independen.

3. Definisi independensi untuk komisaris independen dijelaskan dalam laporan tahunan perusahaan. Definisi independensi harus jelas sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh BEI dan Bapepam-LK. Kriteria penilaian:

Good : apabila terdapat definisi independensi yang jelas bagi komisaris independen sesuai dengan definisi yang telah ditetapkan oleh BEI dan Bapepam-LK.

Poor: apabila tidak terdapat definisi independensi yang jelas bagi komisaris independen sesuai dengan definisi yang telah ditetapkan oleh BEI dan Bapepam-LK.

4. Jumlah proporsi anggota dewan komisaris yang bekerja pada perusahaan pemegang saham atau afiliasi. Klein (1996) dalam Vafeas (1999) menemukan bahwa afiliasi *directors* akan memainkan peranan yang berbeda di kewajibannya, karena mereka lebih fokus terhadap komite yang akan melaksanakan keputusan untuk melakukan investasi dan pendanaan daripada komite pengawasan. Efektivitas peran *monitoring* dewan komisaris dapat berkurang apabila perusahaan pemegang saham menunjuk orang yang bekerja pada perusahaan tersebut atau afiliasi untuk menjadi komisaris pada perusahaan yang dimilikinya. Selain itu, independensi dari komisaris akan berkurang karena bekerja juga pada perusahaan pemegang saham atau afiliasi. Kriteria penilaian:

Good : apabila jumlah proporsi anggota dewan komisaris yang bekerja pada perusahaan pemegang saham atau afiliasi tidak lebih dari 30%. Jumlah batasan ini berdasarkan peraturan BEI, dimana BEI mensyaratkan proporsi komisaris independen minimal 30%, sehingga apabila jumlah anggota dewan komisaris yang bekerja pada perusahaan pemegang saham atau afiliasi tidak

lebih dari 30%, maka jumlah tersebut tidak melebihi proporsi komisaris independen.

Fair : apabila jumlah proporsi anggota dewan komisaris yang bekerja pada perusahaan pemegang saham atau afiliasi antara 30%-50%. Jumlah ini sudah menunjukkan proporsi yang tidak terlalu baik.

Poor : jumlah proporsi anggota dewan komisaris yang bekerja pada perusahaan pemegang saham atau afiliasi diatas 50% atau perusahaan tidak memberikan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi anggota dewan komisaris yang bekerja di perusahaan pemegang saham atau afiliasi sangat besar dan dapat berakibat berkurangnya independensi dari anggota dewan komisaris tersebut.

5. Terdapat komite nominasi dan komite remunerasi dalam elemen *corporate governance* perusahaan. Komite nominasi adalah komite yang dibentuk untuk membantu perusahaan dalam penunjukkan anggota dewan komisaris dan dewan direksi yang lebih independen, berkualitas dan profesional, sedangkan komite remunerasi adalah komite yang dibentuk untuk membantu perusahaan dalam penetapan remunerasi yang akan diberikan kepada dewan komisaris dan dewan direksi pada perusahaan. Kriteria penilaian:

Good : apabila perusahaan memiliki kedua komite tersebut, yaitu komite nominasi dan komite remunerasi.

Fair : apabila perusahaan hanya memiliki salah satu dari kedua komite tersebut, yaitu komite nominasi atau komite remunerasi.

Poor : apabila perusahaan tidak memiliki salah satupun dari kedua komite tersebut, baik komite nominasi maupun komite remunerasi.

6. Lamanya dewan komisaris menjabat dalam posisinya tersebut dalam perusahaan yang bersangkutan. Semakin lama seorang komisaris berada di posisinya dalam perusahaan, maka independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya akan semakin berkurang. Pada umumnya, masa jabatan anggota dewan komisaris adalah 305 tahun. Peraturan pemerintah Republik

Indonesia No. 12 tahun 1998 bahwa masa jabatan adalah 5 (lima) tahun, khususnya untuk perusahaan perseroan. Kriteria penilaian:

Good : apabila rata-rata lama menjabat dari anggota dewan komisaris adalah hingga 5 (lima) tahun.

Fair : apabila rata-rata lama menjabat dari anggota dewan komisaris adalah diatas 5 (lima) tahun hingga 10 (sepuluh) tahun.

Poor : apabila rata-rata lama menjabat dari anggota dewan komisaris adalah diatas 10 (sepuluh) tahun atau perusahaan tidak memberikan informasi.

B. Aktivitas Dewan Komisaris

7. Terdapat pernyataan yang jelas mengenai tanggung jawab dewan komisaris pada laporan tahunan perusahaan. Apabila pada laporan tahunan tersebut dijelaskan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, maka dewan komisaris seharusnya akan lebih dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang dijelaskan pada laporan tahunan perusahaan. Kriteria penilaian:

Good : apabila terdapat pernyataan yang jelas bagi mengenai tanggung jawab dewan komisaris.

Poor : apabila tidak terdapat pernyataan yang jelas bagi mengenai tanggung jawab dewan komisaris.

8. Jumlah rapat dewan komisaris yang dilakukan dalam satu tahun. Persentase tertinggi jumlah rapat dewan komisaris adalah 6 (enam) kali dalam setahun dan tertinggi kedua adalah 4 (empat) kali dalam setahun. Kriteria penilaian:

Good : apabila jumlah rapat yang diadakan oleh dewan komisaris lebih dari 6 (enam) kali dalam setahun.

Fair : apabila jumlah rapat yang diadakan oleh dewan komisaris sebanyak 4 (empat) hingga 6 (enam) kali dalam setahun.

Poor : apabila jumlah rapat yang diadakan oleh dewan komisaris kurang dari 4 (empat) kali dalam setahun atau perusahaan tidak memberikan informasi.

9. Tingkat kehadiran dari anggota dewan komisaris dalam rapat yang diadakan dewan komisaris selama setahun. Tingkat kehadiran ini menggambarkan

keaktifan dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya di perusahaan. Batasan tingkat kehadiran yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan kriteria IICD dan juga diterapkan oleh Hermawan (2009).

Kriteria penilaian:

Good : apabila rata-rata tingkat kehadiran anggota dewan komisaris pada rapat yang diadakan oleh dewan komisaris lebih dari 80%.

Fair : apabila rata-rata tingkat kehadiran anggota dewan komisaris pada rapat yang diadakan oleh dewan komisaris 70%-80%.

Poor : apabila rata-rata tingkat kehadiran anggota dewan komisaris pada rapat yang diadakan oleh dewan komisaris kurang dari 70% atau perusahaan tidak memberikan informasi.

10. Dewan komisaris melakukan evaluasi tahunan atas laporan keuangan perusahaan. Dewan komisaris dapat mengawasi dan mengetahui kinerja manajemen dalam perusahaan dengan mengevaluasi laporan keuangan perusahaan. Kriteria penilaian:

Good : apabila dewan komisaris memberikan pernyataan pada laporan tahunan tentang evaluasinya terhadap laporan keuangan perusahaan.

Poor : apabila dewan komisaris tidak memberikan pernyataan pada laporan tahunan tentang evaluasinya terhadap laporan keuangan perusahaan.

11. Dewan komisaris melakukan evaluasi tahunan atas kinerja manajemen. Dewan komisaris dapat mengawasi dan mengetahui kinerja manajemen dalam perusahaan agar manajemen dapat memberikan kinerja yang terbaik dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat diandalkan. Kriteria penilaian:

Good : apabila dewan komisaris memberikan pernyataan pada laporan tahunan tentang evaluasinya terhadap kinerja manajemen perusahaan.

Poor : apabila dewan komisaris tidak memberikan pernyataan pada laporan tahunan tentang evaluasinya terhadap kinerja manajemen perusahaan.

12. Dewan komisaris melakukan penilaian atas prospek bisnis perusahaan yang telah disiapkan oleh manajemen. Hal ini dilakukan oleh dewan komisaris

untuk memastikan bahwa manajemen membuat rencana strategik yang tepat dan berguna bagi kelangsungan hidup perusahaan di masa depan dan kinerja jangka panjang perusahaan. Kriteria penilaian:

Good : apabila dewan komisaris memberikan pernyataan pada laporan tahunan tentang evaluasinya terhadap prospek bisnis yang telah disiapkan oleh manajemen.

Poor : apabila dewan komisaris tidak memberikan pernyataan pada laporan tahunan tentang evaluasinya terhadap prospek bisnis yang telah disiapkan oleh manajemen.

C. Jumlah Anggota (*Size*) Dewan Komisaris

13. Jumlah anggota dari dewan komisaris. Perusahaan yang terdiri dari lima anggota *board of director* dipandang lebih informatif oleh pelaku pasar, sehingga laporan keuangannya memiliki kandungan informasi yang lebih tinggi (Vafeas, 2000). Menurut Lorsch (1996) dalam Hutajulu (2011), jumlah yang terbatas bagi *board*, yaitu 10 orang dan 8 atau 9 orang adalah proporsi yang lebih baik. Kriteria penilaian:

Good : apabila jumlah anggota dewan komisaris terdiri dari 5-10 orang.

Fair : apabila jumlah anggota dewan komisaris terdiri dari 11-15 orang.

Poor: apabila jumlah anggota dewan komisaris lebih dari 16 orang dan kurang dari 5 orang.

D. Kompetensi Dewan Komisaris

14. Jumlah proporsi anggota dewan komisaris yang memiliki pengetahuan di bidang akuntansi dan keuangan. Dengan dimilikinya pengetahuan di bidang akuntansi dan keuangan tersebut, diharapkan dewan komisaris dapat menjalankan tugasnya dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dengan sangat baik dan efektif. Kriteria penilaian:

Good : apabila proporsi dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan atau pengetahuan di bidang akuntansi dan keuangan lebih dari 50%.

Fair : apabila proporsi dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan atau pengetahuan di bidang akuntansi dan keuangan antara 30%-50%.

Poor : apabila proporsi dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan atau pengetahuan di bidang akuntansi dan keuangan kurang dari 30% atau perusahaan tidak memberikan informasi.

15. Jumlah proporsi anggota dewan komisaris yang memiliki pengalaman yang memadai mengenai bisnis, seperti memiliki pengalaman sebagai komisaris termasuk perusahaan yang bersangkutan atau sebagai CEO di perusahaan lain. Dewan komisaris dapat menjalankan tugasnya dengan efektif karena memiliki pengalaman yang memadai dalam dunia bisnis. Kriteria penilaian:

Good : apabila proporsi dewan komisaris yang memiliki pengalaman yang memadai mengenai bisnis, seperti memiliki pengalaman sebagai komisaris termasuk perusahaan yang bersangkutan atau sebagai CEO di perusahaan lain lebih dari 50%.

Fair : apabila proporsi dewan komisaris yang memiliki pengalaman yang memadai mengenai bisnis, seperti memiliki pengalaman sebagai komisaris termasuk perusahaan yang bersangkutan atau sebagai CEO di perusahaan lain antara 30%-50%.

Poor : apabila proporsi dewan komisaris memiliki pengalaman yang memadai mengenai bisnis, seperti memiliki pengalaman sebagai komisaris termasuk perusahaan yang bersangkutan atau sebagai CEO di perusahaan lain kurang dari 30% atau perusahaan tidak memberikan informasi.

16. Jumlah proporsi anggota dewan komisaris yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai bisnis perusahaan. Dengan dimilikinya pengetahuan tersebut, diharapkan dewan komisaris dapat mengetahui risiko maupun prospek bisnis perusahaan dan mengetahui menangani perusahaan dengan efektif. Kriteria penilaian:

Good : apabila proporsi dewan komisaris yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai bisnis perusahaan lebih dari 50%.

Fair : apabila proporsi dewan komisaris yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai bisnis perusahaan antara 30%-50%.

Poor : apabila proporsi dewan komisaris yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai bisnis perusahaan kurang dari 30% atau perusahaan tidak memberikan informasi.

17. Rata-rata umur anggota dewan komisaris. Hal ini berhubungan dengan pengalaman dan kemampuan setiap anggota dewan komisaris. Semakin tua seorang anggota dewan komisaris, diharapkan anggota tersebut memiliki pengalaman dan kemampuan yang lebih baik dalam menangani perusahaan.

Kriteria penilaian:

Good : apabila rata-rata umur anggota dewan komisaris diatas 40 tahun.

Fair : apabila rata-rata umur anggota dewan komisaris antara 30-40 tahun.

Poor : apabila rata-rata umur anggota dewan komisaris dibawah 30 tahun.

Lampiran 2
Kuesioner Penilaian Efektivitas Komite Audit yang Dikembangkan oleh
Hermawan (2009)

No.	Description	<i>Good</i>	<i>Fair</i>	<i>Poor</i>
A. Audit Committee Activities				
1-5	<p>Asses the responsibilities fulfills by the audit committee during the year, include the following items:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluating internal control 2. Propose auditor 3. Financial report review 4. Evaluating legal compliance 5. Prepare a complete audit committee report for disclosure. <p>In each category, if the responsibility is fulfilled, firms will receive a '<i>good</i>' score. If the responsibility is not fulfilled, or no information, the company will receive a '<i>poor</i>' score Sumber: IICD (2005)</p>			
6	<p>How many meetings are held during the year?</p> <p>If the audic committee meets more than six times, the firm earns a '<i>good</i>' score. If 4-6 meeting, the firm is scored as '<i>fair</i>', while less than four times or no information is scored as '<i>poor</i>'.</p> <p>Sumber: IICD (2005)</p>			
7	<p>What is attendance performance of the audit committee members during the year?</p> <p>If the overall audit committee attendance for the year is greater than 80%, the firm earns a '<i>good</i>' score. If attendance is 70-80% receives a '<i>fair</i>' score, and less than 70% or no information receives a '<i>poor</i>' score.</p> <p>Sumber: IICD (2005)</p>			

No.	Description	Good	Fair	Poor
8	<p>Does the audit committee evaluate the scope, accuracy, cost effectiveness, independency, and objectivity of external auditor?</p> <p>If the audit committee evaluate all of the items, the firm has a 'good' score. If only some part of the items was evaluated, the score will be 'fair'. And if none of the items was evaluated, the score will be 'poor'.</p> <p>Sumber: Lampiran Kep-399/BEJ/07-2001</p>			

B. Audit Committee Size

9	<p>What is the size of the audit committee?</p> <p>If there is 3 person in the audit committee, the score will be 'fair' and if there is more than 3 person in audit committee, the score will be 'good'. If there is no information, the score will be 'poor'.</p> <p>Sumber: Lampiran Kep-399/BEJ/07-2001</p>			
---	---	--	--	--

C. Audit Committee Expertise and Competence

10	<p>Does the audit committee have an accounting background?</p> <p>If the company has more than 1 person with accounting background, the firm will earn a 'good' score. If the company has only 1 person with accounting background, the firm will earn a 'fair' score, and if none has accounting background or no information, the score will be 'poor'.</p> <p>Sumber: Dhaliwal <i>et al.</i> (2007)</p>			
11	<p>What is the average age of the audit committee?</p> <p>If the average age of the audit committee is more than 40 years old, the company will receive a 'good' score. If the average of the board is between 30 to 40 years old, the score is 'fair', and if the average age is below 30 years old, the score will be 'poor'.</p> <p>Sumber: Anderson <i>et al.</i> (2004)</p>			
	Total Nilai			

Kriteria Penetapan Nilai untuk Masing-masing Pertanyaan pada *Scoring Efektivitas Komite Audit Berdasarkan Penelitian Hermawan (2009)*

A. Aktivitas Komite Audit

Pelaksanaan tanggung jawab komite audit. Tanggung jawab komite audit tersebut merupakan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh BEI dan Bapepam-LK, yaitu:

1. Evaluasi komite audit atas pengendalian internal perusahaan
2. Pengajuan usulan auditor eksternal dalam proses penunjukan auditor eksternal
3. Penelaahan atas laporan keuangan perusahaan
4. Evaluasi atas kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
5. Menyiapkan laporan komite audit yang lengkap untuk pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan

Kriteria penelitian untuk setiap poin tanggung jawab komite audit:

Good : apabila terdapat informasi bahwa komite audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut.

Poor : apabila tidak terdapat informasi bahwa komite audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut.

6. Jumlah rapat komite audit yang dilakukan dalam satu tahun. Dengan semakin banyak rapat yang dilakukan oleh komite audit untuk keperluan pembahasan hal-hal yang terkait dengan tugas komite audit, maka komite audit dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, terutama dalam menelaah laporan keuangan. Kriteria penilaian:

Good : apabila jumlah rapat yang diadakan oleh komite audit lebih dari 6 (enam) kali dalam setahun.

Fair : apabila jumlah rapat yang diadakan oleh komite audit sebanyak 4 (empat) hingga 6 (enam) kali dalam setahun.

Poor : apabila jumlah rapat yang diadakan oleh komite audit kurang dari 4 (empat) kali dalam setahun atau perusahaan tidak memberikan informasi.

7. Tingkat kehadiran dari anggota komite audit dalam rapat yang diadakan komite audit selama setahun. Tingkat kehadiran ini menggambarkan keaktifan komite audit dalam menjalankan tanggung jawabnya di perusahaan. Kriteria penilaian:

Good : apabila rata-rata tingkat kehadiran anggota komite audit pada rapat yang diadakan oleh komite audit lebih dari 80%.

Fair : apabila rata-rata tingkat kehadiran anggota komite audit pada rapat yang diadakan oleh komite audit 70%-80%.

Poor : apabila rata-rata tingkat kehadiran anggota komite audit pada rapat yang diadakan oleh komite audit kurang dari 70% atau perusahaan tidak memberikan informasi.

8. Komite audit mengevaluasi *scope*, akurasi, efektivitas biaya, independensi dan objektivitas auditor eksternal. Salah satu fungsi komite audit adalah memastikan bahwa auditor eksternal telah melakukan proses audit secara memadai. Kriteria penilaian:

Good : apabila komite audit telah melakukan evaluasi terhadap seluruh faktor dari auditor eksternal.

Fair : apabila komite audit hanya melakukan evaluasi terhadap sebagian faktor dari auditor eksternal.

Poor : apabila komite audit tidak melakukan evaluasi terhadap seluruh faktor dari auditor eksternal atau perusahaan tidak memberikan informasi pada laporan tahunannya.

B. Jumlah Anggota Komite Audit

9. Jumlah anggota dari komite audit. Menurut ketentuan BEI dan Bapepam-LK, jumlah anggota komite audit minimal 3 orang. Semakin banyak jumlah anggota komite audit, maka semakin efektif tugas yang dapat dijalankan oleh komite audit. Kriteria penilaian:

Good : apabila jumlah anggota komite audit lebih dari 3 orang.

Fair : apabila jumlah anggota komite audit adalah 3 orang.

Poor : apabila jumlah anggota komite audit kurang dari 3 orang.

C. Kompetensi Komite Audit

10. Jumlah proporsi anggota komite audit yang memiliki latar belakang pengetahuan di bidang akuntansi. Dengan dimilikinya pengetahuan di bidang akuntansi tersebut, diharapkan komite audit dapat menjalankan tugasnya dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dengan sangat baik dan efektif. Kriteria penilaian:

Good : apabila anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan atau pengetahuan di bidang akuntansi lebih dari 1 orang.

Fair : apabila anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan atau pengetahuan di bidang akuntansi sebanyak 1 orang.

Poor : apabila tidak ada anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan atau pengetahuan di bidang akuntansi atau perusahaan tidak memberikan informasi.

11. Rata-rata umur anggota komite audit. Hal ini berhubungan dengan pengalaman dan kemampuan setiap anggota komite audit. Semakin tua seorang anggota komite audit, diharapkan anggota tersebut memiliki pengalaman dan kemampuan yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya. Kriteria penilaian:

Good : apabila rata-rata umur anggota komite audit diatas 40 tahun.

Fair : apabila rata-rata umur anggota komite audit antara 30-40 tahun.

Poor : apabila rata-rata umur anggota komite audit dibawah 30 tahun.

Lampiran 3
Daftar Sampel Penelitian

NO	CODE	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR INDUSTRI
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk	Pertanian
2	ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
3	ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk	Properti dan Real Estate
4	ADMG	Polychem Indonesia Tbk	Aneka Industri
5	ADRO	Adaro Energy Tbk	Pertambangan
6	AIMS	Akbar Indo Makmur Stimec Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
7	AKKU	Aneka Kemasindo Utama Tbk	Industri Dasar dan Kimia
8	AKRA	AKR Corporindo Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
9	ALKA	Alakasa Industrindo Tbk	Industri Dasar dan Kimia
10	ALMI	Alumindo Light Metal Industry Tbk	Industri Dasar dan Kimia
11	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk	Industri Dasar dan Kimia
12	AMRT	Sumber Alfaria Trijaya Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
13	ANTA	Anta Express Tour&Travel Service Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
14	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk	Pertambangan
15	APOL	Arpeni Pratama Ocean Line Tbk	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
16	ARNA	Arwana Citramulia Tbk	Industri Dasar dan Kimia
17	ARTI	Ratu Prabu Energi Tbk	Pertambangan
18	ASGR	Astra Graphia Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
19	ASIA	Asia Natural Resources Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
20	ASII	Astra International Tbk	Aneka Industri
21	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk	Properti dan Real Estate
22	ATPK	ATPK Resources Tbk	Pertambangan
23	AUTO	Astra Otoparts Tbk	Aneka Industri
24	BAPA	Bekasi Asri Pemula Tbk	Properti dan Real Estate
25	BAYU	Bayu Buana Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
26	BHIT	Bhakti Investama Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
27	BIMA	Primarindo Asia Infrastruktur Tbk	Aneka Industri
28	BIPP	Bhuwanatala Indah Permai Tbk	Properti dan Real Estate
29	BISI	Bisi International Tbk	Pertanian
30	BKDP	Bukit Darmo Property Tbk	Properti dan Real Estate
31	BKSL	Sentul City Tbk	Properti dan Real Estate
32	BLTA	Berlian Laju Tanker Tbk	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
33	BMSR	Bintang Mitra Semestaraya Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
34	BMTR	Global Mediacom Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi

NO	CODE	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR INDUSTRI
35	BNBR	Bakrie & Brothers Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
36	BRAM	Indo Kordsa Tbk	Aneka Industri
37	BRPT	Barito Pacific Tbk	Industri Dasar dan Kimia
38	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk	Properti dan Real Estate
39	BTEL	Bakrie Telecom Tbk	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
40	BUDI	Budi Acid Jaya Tbk	Industri Dasar dan Kimia
41	BUMI	Bumi Resources Tbk	Pertambangan
42	BWPT	BW Plantation Tbk	Pertanian
43	BYAN	Bayan Resources Tbk	Pertambangan
44	CKRA	Citra Kebun Raya Agri Tbk	Properti dan Real Estate
45	CMNP	Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
46	CMPP	Centris Multi Persada Pratama Tbk	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
47	CNTX	Centex Tbk	Aneka Industri
48	COWL	Cowell Development Tbk	Properti dan Real Estate
49	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	Industri Dasar dan Kimia
50	CSAP	Catur Sentosa Adiprana Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
51	CTRA	Ciputra Development Tbk	Properti dan Real Estate
52	CTRP	Ciputra Property Tbk	Properti dan Real Estate
53	CTRS	Ciputra Surya Tbk	Properti dan Real Estate
54	DEWA	Darma Henwa Tbk	Pertambangan
55	DGIK	Duta Graha Indah Tbk	Properti dan Real Estate
56	DILD	Intiland Development Tbk	Properti dan Real Estate
57	DOID	Delta Dunia Makmur Tbk	Pertambangan
58	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
59	DUTI	Duta Pertiwi Tbk	Properti dan Real Estate
60	ELSA	Elnusa Tbk	Pertambangan
61	ELTY	Bakrieland Development Tbk	Properti dan Real Estate
62	ENRG	Energi Mega Persada Tbk	Pertambangan
63	EPMT	Enseval Putra Megatrading Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
64	EXCL	XL Axiata Tbk	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
65	FAST	Fast Food Indonesia Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
66	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk	Industri Dasar dan Kimia
67	FISH	FKS Multi Agro Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
68	FORU	Fortune Indonesia Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
69	FPNI	Titan Kimia Nusantara Tbk	Industri Dasar dan Kimia

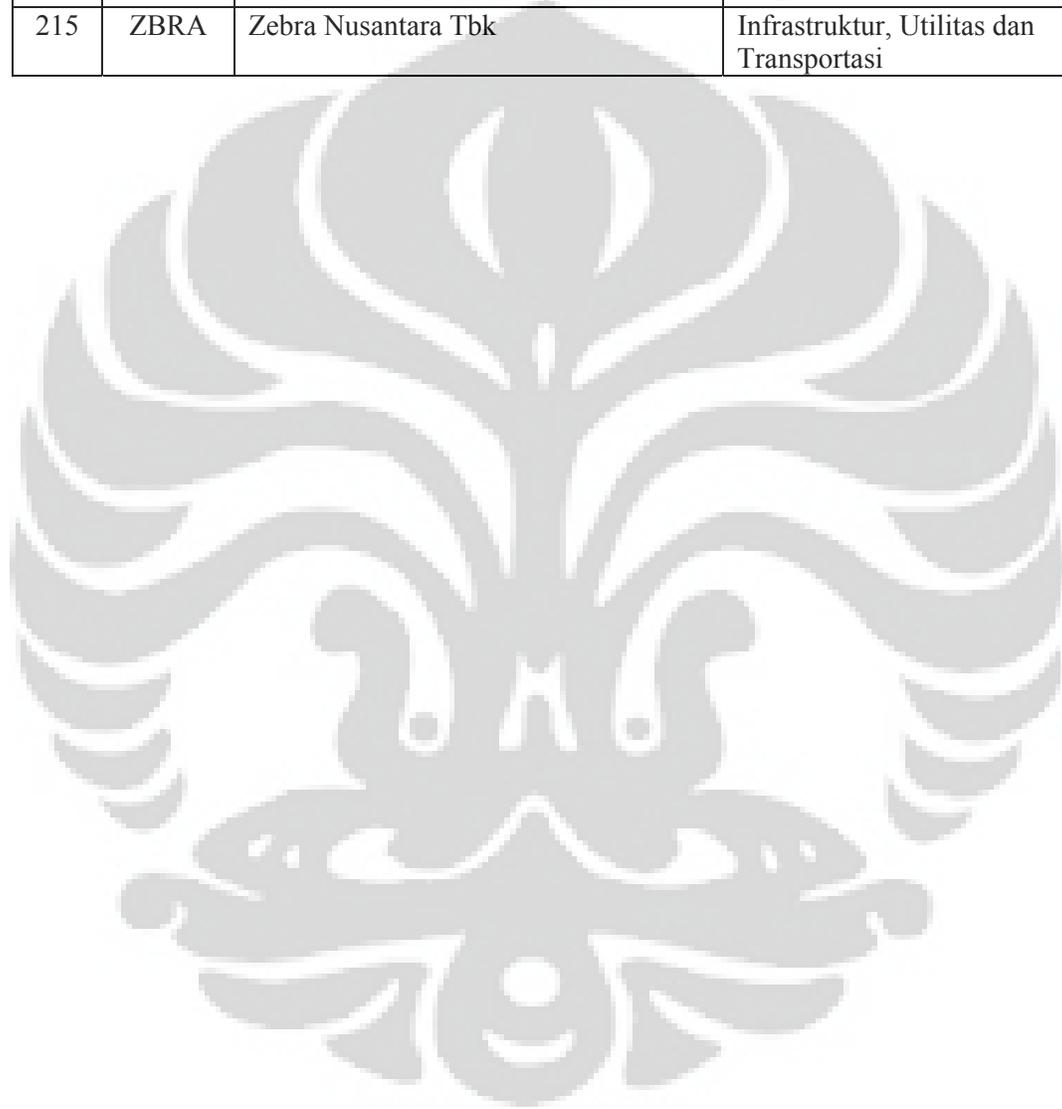
NO	CODE	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR INDUSTRI
70	FREN	Mobile-8 Telecom Tbk (harga)	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
71	GDST	Gunawan Dianjaya Steel Tbk	Industri Dasar dan Kimia
72	GGRM	Gudang Garam Tbk	Industri Barang Konsumsi
73	GJTL	Gajah Tunggal Tbk	Aneka Industri
74	GMTD	Gowa Makassar Tourism Development Tbk	Properti dan Real Estate
75	GPRA	Perdana Gapuraprima Tbk	Properti dan Real Estate
76	GTBO	Garda Tujuh Buana Tbk	Pertambangan
77	GZCO	Gozco Plantations Tbk	Pertanian
78	HERO	Hero Supermarket Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
79	HEXA	Hexindo Adiperkasa Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
80	HITS	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
81	HMSP	HM Sampoerna Tbk	Industri Barang Konsumsi
82	HOME	Hotel Mandarine Regency Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
83	IDKM	Indosiar Karya Media Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
84	IKAI	Intikeramik Alamasri Industri Tbk	Industri Dasar dan Kimia
85	IKBI	Sumi Indo Kabel Tbk	Aneka Industri
86	IMAS	Indomobil Sukses Internasional Tbk	Aneka Industri
87	INAI	Indal Aluminium Industry Tbk	Industri Dasar dan Kimia
88	INCI	Intanwijaya Internasional Tbk	Industri Dasar dan Kimia
89	INCO	International Nickel Indonesia Tbk	Pertambangan
90	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	Industri Barang Konsumsi
91	INDS	Indospring Tbk	Aneka Industri
92	INDX	Indoexchange Tbk	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
93	INDY	Indika Energy Tbk	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
94	INPP	Indonesian Paradise Property Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
95	INRU	Toba Pulp Lestari Tbk	Industri Dasar dan Kimia
96	INTA	Intraco Penta Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
97	INTP	Indocement Tunggul Prakasa Tbk	Industri Dasar dan Kimia
98	INVS	Inovisi Infracom Tbk	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
99	ISAT	Indosat Tbk	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
100	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk	Pertambangan
101	ITTG	Leo Investments Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
102	JECC	Jembo Cable Company Tbk	Aneka Industri
103	JIHD	Jakarta Int'l Hotel & Dev. Tbk	Properti dan Real Estate

NO	CODE	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR INDUSTRI
104	JKON	Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	Properti dan Real Estate
105	JRPT	Jaya Real Property Tbk	Properti dan Real Estate
106	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
107	JSPT	Jakarta Setiabudi Internasional Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
108	KAEF	Kimia Farma Tbk	Industri Barang Konsumsi
109	KBLV	First Media Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
110	KBRI	Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk	Industri Dasar dan Kimia
111	KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk	Properti dan Real Estate
112	KLBF	Kalbe Farma Tbk	Industri Barang Konsumsi
113	KOIN	Kokoh Inti Arebama Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
114	KPIG	Global Land Development Tbk	Properti dan Real Estate
115	LAMI	Lamicitra Nusantara Tbk	Properti dan Real Estate
116	LCGP	Laguna Cipta Griya Tbk	Properti dan Real Estate
117	LMAS	Limas Centric Indonesia Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
118	LPCK	Lippo Cikarang Tbk	Properti dan Real Estate
119	LPKR	Lippo Karawaci Tbk	Properti dan Real Estate
120	LPLI	Star Pacific Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
121	LSIP	PP London Sumatera Tbk	Pertanian
122	LTLS	Lautan Luas Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
123	MAIN	Malindo Feedmill Tbk	Industri Dasar dan Kimia
124	MAMI	Mas Murni Indonesia Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
125	MAPI	Mitra Adiperkasa Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
126	MBAI	Multibreeder Adirama Ind. Tbk	Pertanian
127	MDLN	Modernland Realty Ltd. Tbk	Properti dan Real Estate
128	MDRN	Modern Internasional Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
129	MEDC	Medco Energi International Tbk	Pertambangan
130	MERK	Merck Tbk	Industri Barang Konsumsi
131	MICE	Multi Indocitra Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
132	MITI	Mitra Investindo Tbk	Pertambangan
133	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk	Industri Barang Konsumsi
134	MLIA	Mulia Industrindo Tbk	Industri Dasar dan Kimia
135	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
136	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
137	MRAT	Mustika Ratu Tbk	Industri Barang Konsumsi
138	MTDL	Metrodata Electronics Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
139	MTSM	Metro Realty Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
140	MYOH	Myoh Technology Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi

NO	CODE	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR INDUSTRI
141	MYTX	Apac Citra Centertex Tbk	Aneka Industri
142	NIKL	Pelat Timah Nusantara Tbk	Industri Dasar dan Kimia
143	PANR	Panorama Sentrawisata Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
144	PBRX	Pan Brothers Tex Tbk	Aneka Industri
145	PDES	Destinasi Tirta Nusantara Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
146	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
147	PGLI	Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
148	PLAS	Polaris Investama Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
149	PLIN	Plaza Indonesia Realty Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
150	PNSE	Pudjiadi & Sons Estate Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
151	POLY	Asia Pacific Fibers Tbk	Aneka Industri
152	POOL	Pool Advista Indonesia Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
153	PRAS	Prima Alloy Steel Tbk	Aneka Industri
154	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	Pertambangan
155	PTRO	Petrosea Tbk	Pertambangan
156	PTSN	Sat Nusapersada Tbk	Aneka Industri
157	PTSP	Pioneerindo Gourmet International Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
158	PUDP	Pudjiadi Prestige Limited Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
159	PWON	Pakuwon Jati Tbk	Properti dan Real Estate
160	PWSI	Panca Wiratama Sakti Tbk	Properti dan Real Estate
161	RAJA	Rukun Raharja Tbk	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
162	RALS	Ramayana Lestari Sentosa Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
163	RIGS	Rig Tenders Tbk	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
164	RMBA	Bentoel International Investama Tbk	Industri Barang Konsumsi
165	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk	Pertambangan
166	SAFE	Steady Safe Tbk	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
167	SAIP	Surabaya Agung Industry Pulp Tbk	Industri Dasar dan Kimia
168	SCBD	Danayasa Arthatama Tbk	Properti dan Real Estate
169	SCMA	Surya Citra Media Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
170	SDPC	Millennium Pharmacon Int.'l Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
171	SGRO	Sampoerna Agro Tbk	Pertanian
172	SHID	Hotel Sahid Jaya Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
173	SIPD	Sierad Produce Tbk	Industri Dasar dan Kimia
174	SMAR	SMART Tbk	Pertanian

NO	CODE	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR INDUSTRI
175	SMCB	Holcim Indonesia Tbk	Industri Dasar dan Kimia
176	SMDM	Suryamas Dutamakmur Tbk	Properti dan Real Estate
177	SMDR	Samudera Indonesia Tbk	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
178	SMGR	Semen Gresik (Persero) Tbk	Industri Dasar dan Kimia
179	SMRA	Summarecon Agung Tbk	Properti dan Real Estate
180	SMSM	Selamat Sempurna Tbk	Aneka Industri
181	SOBI	Sorini Agro Asia Corporinndo Tbk	Industri Dasar dan Kimia
182	SONA	Sona Topas Tourism Industry Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
183	SSIA	Surya Semesta Internusa Tbk	Properti dan Real Estate
184	SUGI	Sugih Energy Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
185	TBLA	Tunas Baru Lampung	Pertanian
186	TCID	Mandom Indonesia Tbk	Industri Barang Konsumsi
187	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
188	TINS	Timah Tbk	Pertambangan
189	TIRA	Tira Austenite Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
190	TIRT	Tirta Mahakam Resources Tbk	Industri Dasar dan Kimia
191	TKGA	Toko Gunung Agung Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
192	TLKM	Telekomunikasi Indonesia Tbk	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
193	TMAS	Pelayaran Tempuran Emas Tbk	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
194	TMPI	AGIS Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
195	TMPO	Tempo Scan Pacific Tbk	Industri Barang Konsumsi
196	TMPO	Tempo Inti Media Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
197	TOTL	Total Bangun Persada Tbk	Properti dan Real Estate
198	TPIA	Tri Polyta Indonesia Tbk	Industri Dasar dan Kimia
199	TRAM	Trada Maritime Tbk	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
200	TRIL	Triwira Insanlestari Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
201	TRIO	Trikonsel Oke Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
202	TRUB	Truba Alam Manunggal Engineering Tbk	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
203	TURI	Tunas Ridean Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
204	UNIC	Unggul Indah Cahaya Tbk	Industri Dasar dan Kimia
205	UNIT	Nusantara Inti Corpora Tbk	Aneka Industri
206	UNSP	Bakrie Sumatra Plantations Tbk	Pertanian
207	UNTR	United Tractors Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
208	UNTX	Unitex Tbk	Aneka Industri
209	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	Industri Barang Konsumsi

NO	CODE	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR INDUSTRI
210	VOKS	Voksel Electric Tbk	Aneka Industri
211	WAPO	Wahana Phonix Mandiri Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
212	WEHA	Panorama Transportasi Tbk	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
213	WICO	Wicaksana Overseas Int l Tbk	Perdagangan, Jasa dan Investasi
214	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk	Properti dan Real Estate
215	ZBRA	Zebra Nusantara Tbk	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi



Lampiran 4
Pembuktian Persamaan Regresi Logistik

No	CODE	$\text{Ln} \left(\frac{P_i}{1 - P_i} \right)$ Probabilita	Hasil Perhitungan	Probabilita Kredit	Hasil Perhitungan
			P>0,5=1 dan 0 sebaliknya	1=Layak dapat kredit dan 0=sebaliknya	
1	AALI	0,83736532	1	1	TRUE
2	ACES	0,66097659	1	1	TRUE
3	ADHI	0,824468	1	0	TRUE
4	ADMG	0,66282029	1	0	TRUE
5	ADRO	0,87182445	1	1	TRUE
6	AIMS	0,31195722	1	0	FALSE
7	AKKU	0,59780518	1	0	TRUE
8	AKRA	0,81329279	1	1	TRUE
9	ALKA	0,40531307	1	0	FALSE
10	ALMI	0,37850571	1	0	FALSE
11	AMFG	0,86660667	1	1	TRUE
12	AMRT	0,80190752	1	0	TRUE
13	ANTA	0,72258746	1	1	TRUE
14	ANTM	0,87355717	1	1	TRUE
15	APOL	0,54467972	1	0	TRUE
16	ARNA	0,85931054	1	1	TRUE
17	ARTI	0,46952618	0	1	FALSE
18	ASGR	0,74415482	1	1	TRUE
19	ASIA	0,35505001	0	1	FALSE
20	ASII	0,81849037	1	1	TRUE
21	ASRI	0,90034511	1	1	TRUE
22	ATPK	0,46225963	1	0	FALSE
23	AUTO	0,79062491	1	1	TRUE
24	BAPA	0,69137681	1	1	TRUE
25	BAYU	0,27060778	0	1	FALSE
26	BHIT	0,71502457	1	0	TRUE
27	BIMA	0,16106125	1	0	FALSE
28	BIPP	0,49227445	1	0	FALSE
29	BISI	0,87427076	1	1	TRUE
30	BKDP	0,39745725	1	0	FALSE
31	BKSL	0,76192549	1	0	TRUE
32	BLTA	0,71739878	1	0	TRUE
33	BMSR	0,49639473	1	0	FALSE

No	CODE	$\ln\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right)$	Hasil Perhitungan	Probabilita Kredit	Hasil Pehitungan
			P>0,5=1 dan 0 sebaliknya	1=Layak dapat kredit dan 0=sebaliknya	
34	BMTR	0,65964878	1	0	TRUE
35	BNBR	0,88285174	1	0	TRUE
36	BRAM	0,85676535	1	0	TRUE
37	BRPT	0,42324132	1	0	FALSE
38	BSDE	0,81675785	1	1	TRUE
39	BTEL	0,86873875	1	1	TRUE
40	BUDI	0,75848771	1	1	TRUE
41	BUMI	0,89095745	1	0	TRUE
42	BWPT	0,83217919	1	1	TRUE
43	BYAN	0,98784402	1	1	TRUE
44	CKRA	0,4170144	1	0	FALSE
45	CMNP	0,87410948	1	1	TRUE
46	CMPP	0,22563164	1	0	FALSE
47	CNTX	0,5996939	1	0	TRUE
48	COWL	0,66819837	1	1	TRUE
49	CPIN	0,89578821	1	1	TRUE
50	CSAP	0,73357198	1	0	TRUE
51	CTRA	0,39742299	0	1	FALSE
52	CTRP	0,53276314	1	1	TRUE
53	CTRS	0,54356618	1	1	TRUE
54	DEWA	0,61035538	1	0	TRUE
55	DGIK	0,77428156	1	1	TRUE
56	DILD	0,72880785	1	1	TRUE
57	DOID	0,91093885	1	0	TRUE
58	DSSA	0,69006312	1	0	TRUE
59	DUTI	0,80737692	1	1	TRUE
60	ELSA	0,86439894	1	1	TRUE
61	ELTY	0,79802008	1	1	TRUE
62	ENRG	0,75773475	1	0	TRUE
63	EPMT	0,82942222	1	1	TRUE
64	EXCL	0,95490664	1	1	TRUE
65	FAST	0,59365909	1	1	TRUE
66	FASW	0,76685199	1	1	TRUE
67	FISH	0,66311799	1	0	TRUE
68	FORU	0,66006573	1	1	TRUE
69	FPNI	0,47169218	1	0	FALSE

No	CODE	$\ln \left(\frac{P_i}{1 - P_i} \right)$	Hasil Perhitungan	Probabilita Kredit	Hasil Perhitungan
		Probabilita	P>0,5=1 dan 0 sebaliknya	1=Layak dapat kredit dan 0=sebaliknya	
70	FREN	0,10101915	1	0	FALSE
71	GDST	0,81601744	1	0	TRUE
72	GGRM	0,74380399	1	1	TRUE
73	GJTL	0,7703575	1	1	TRUE
74	GMTD	0,83755496	1	1	TRUE
75	GPRA	0,67901996	1	1	TRUE
76	GTBO	0,38477817	1	0	FALSE
77	GZCO	0,70152682	1	1	TRUE
78	HERO	0,80210357	1	1	TRUE
79	HEXA	0,7948914	1	1	TRUE
80	HITS	0,63064219	1	0	TRUE
81	HMSP	0,89106594	1	1	TRUE
82	HOME	0,60057988	1	0	TRUE
83	IDKM	0,80134186	1	0	TRUE
84	IKAI	0,45306549	1	0	FALSE
85	IKBI	0,58846985	1	1	TRUE
86	IMAS	0,42941815	1	0	FALSE
87	INAI	0,1263246	1	0	FALSE
88	INCI	0,42416079	1	0	FALSE
89	INCO	0,80162788	1	1	TRUE
90	INDF	0,8312249	1	1	TRUE
91	INDS	0,49148749	1	0	FALSE
92	INDX	0,46845951	0	1	FALSE
93	INDY	0,91195148	1	1	TRUE
94	INPP	0,51125802	1	1	TRUE
95	INRU	0,59491872	1	0	TRUE
96	INTA	0,82857348	1	0	TRUE
97	INTP	0,84995709	1	1	TRUE
98	INVS	0,70687384	1	1	TRUE
99	ISAT	0,888188	1	1	TRUE
100	ITMG	0,93111964	1	1	TRUE
101	ITTG	0,06147655	1	0	FALSE
102	JECC	0,57653678	1	0	TRUE
103	JIHD	0,53013439	1	1	TRUE
104	JKON	0,50554276	1	1	TRUE
105	JRPT	0,64864905	1	1	TRUE

No	CODE	$\ln\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right)$	Hasil Perhitungan	Probabilita Kredit	Hasil Perhitungan
		Probabilita	P>0,5=1 dan 0 sebaliknya	1=Layak dapat kredit dan 0=sebaliknya	
106	JSMR	0,90443248	1	1	TRUE
107	JSPT	0,768406	1	1	TRUE
108	KAEF	0,5073101	1	1	TRUE
109	KBLV	0,5255933	1	1	TRUE
110	KBRI	0,50190646	1	1	TRUE
111	KIJA	0,70712769	1	1	TRUE
112	KLBF	0,90103455	1	1	TRUE
113	KOIN	0,29048992	1	0	FALSE
114	KPIG	0,68404357	1	1	TRUE
115	LAMI	0,4786387	0	1	FALSE
116	LCGP	0,39181893	1	0	FALSE
117	LMAS	0,6197154	1	0	TRUE
118	LPCK	0,92855255	1	1	TRUE
119	LPKR	0,83589985	1	1	TRUE
120	LPLI	0,41965853	0	1	FALSE
121	LSIP	0,76997253	1	1	TRUE
122	LTLS	0,44319946	1	0	FALSE
123	MAIN	0,77718448	1	0	TRUE
124	MAMI	0,63642447	1	1	TRUE
125	MAPI	0,82100213	1	1	TRUE
126	MBAI	0,77334122	1	1	TRUE
127	MDLN	0,36449624	0	1	FALSE
128	MDRN	0,80822714	1	1	TRUE
129	MEDC	0,79814877	1	1	TRUE
130	MERK	0,64474553	1	1	TRUE
131	MICE	0,60508621	1	1	TRUE
132	MITI	0,50687992	1	0	TRUE
133	MLBI	0,82626378	1	1	TRUE
134	MLIA	0,49947655	1	0	FALSE
135	MNCN	0,80172156	1	1	TRUE
136	MPPA	0,71481933	1	1	TRUE
137	MRAT	0,56040436	1	1	TRUE
138	MTDL	0,7012796	1	1	TRUE
139	MTSM	0,11723799	0	1	FALSE
140	MYOH	0,01647404	1	0	FALSE
141	MYTX	0,36446392	1	0	FALSE

No	CODE	$\ln \left(\frac{P_i}{1 - P_i} \right)$	Hasil Perhitungan	Probabilita Kredit	Hasil Perhitungan
		Probabilita	P>0,5=1 dan 0 sebaliknya	1=Layak dapat kredit dan 0=sebaliknya	
142	NIKL	0,70830967	1	0	TRUE
143	PANR	0,62965396	1	1	TRUE
144	PBRX	0,761226	1	0	TRUE
145	PDES	0,20782502	0	1	FALSE
146	PGAS	0,95296191	1	1	TRUE
147	PGLI	0,27888088	0	1	FALSE
148	PLAS	0,57174209	1	0	TRUE
149	PLIN	0,70348275	1	1	TRUE
150	PNSE	0,58983487	1	1	TRUE
151	POLY	0,61603788	1	0	TRUE
152	POOL	0,35189688	1	0	FALSE
153	PRAS	0,6447176	1	0	TRUE
154	PTBA	0,93582373	1	1	TRUE
155	PTRO	0,7781505	1	1	TRUE
156	PTSN	0,74893846	1	0	TRUE
157	PTSP	0,55915827	1	1	TRUE
158	PUDP	0,60366057	1	1	TRUE
159	PWON	0,64853647	1	1	TRUE
160	PWSI	0,22718565	1	0	FALSE
161	RAJA	0,80681271	1	1	TRUE
162	RALS	0,40041255	0	1	FALSE
163	RIGS	0,83578102	1	1	TRUE
164	RMBA	0,7444735	1	1	TRUE
165	RUIS	0,64324522	1	1	TRUE
166	SAFE	0,55031883	1	0	TRUE
167	SAIP	0,38468897	1	0	FALSE
168	SCBD	0,56589847	1	1	TRUE
169	SCMA	0,84675784	1	1	TRUE
170	SDPC	0,40692763	1	0	FALSE
171	SGRO	0,82736032	1	1	TRUE
172	SHID	0,58804803	1	1	TRUE
173	SIPD	0,56345417	1	1	TRUE
174	SMAR	0,6956612	1	1	TRUE
175	SMCB	0,76278779	1	1	TRUE
176	SMDM	0,62718595	1	1	TRUE
177	SMDR	0,73670618	1	1	TRUE

No	CODE	$\text{Ln} \left(\frac{P_i}{1 - P_i} \right)$	Hasil Perhitungan	Probabilita Kredit	Hasil Perhitungan
		Probabilita	P>0,5=1 dan 0 sebaliknya	1=Layak dapat kredit dan 0=sebaliknya	
178	SMGR	0,87274946	1	1	TRUE
179	SMRA	0,74800785	1	1	TRUE
180	SMSM	0,67100027	1	1	TRUE
181	SOBI	0,63914395	1	1	TRUE
182	SONA	0,45725204	0	1	FALSE
183	SSIA	0,83593586	1	1	TRUE
184	SUGI	0,13772566	1	0	FALSE
185	TBLA	0,68643693	1	1	TRUE
186	TCID	0,65379367	1	1	TRUE
187	TGKA	0,74541814	1	0	TRUE
188	TINS	0,88592346	1	1	TRUE
189	TIRA	0,43763696	1	0	FALSE
190	TIRT	0,38949391	1	0	FALSE
191	TKGA	0,08109047	1	0	FALSE
192	TLKM	0,88268601	1	1	TRUE
193	TMAS	0,63232655	1	0	TRUE
194	TMPI	0,32532471	1	0	FALSE
195	TMPO	0,62994964	1	1	TRUE
196	TMPO	0,55155072	1	1	TRUE
197	TOTL	0,80127544	1	1	TRUE
198	TPIA	0,68186847	1	1	TRUE
199	TRAM	0,77352181	1	1	TRUE
200	TRIL	0,5184459	1	1	TRUE
201	TRIO	0,77125483	1	1	TRUE
202	TRUB	0,40581646	0	1	FALSE
203	TURI	0,76451842	1	1	TRUE
204	UNIC	0,62927701	1	1	TRUE
205	UNIT	0,414853	0	1	FALSE
206	UNSP	0,83788973	1	1	TRUE
207	UNTR	0,90534271	1	1	TRUE
208	UNTX	0,20308137	1	0	FALSE
209	UNVR	0,95223445	1	1	TRUE
210	VOKS	0,64779078	1	0	TRUE
211	WAPO	0,11297737	1	0	FALSE
212	WEHA	0,84584602	1	1	TRUE
213	WICO	0,23954026	1	0	FALSE

No	CODE	$\ln \left(\frac{P_i}{1 - P_i} \right)$	Hasil Perhitungan	Probabilita Kredit	Hasil Perhitungan
		Probabilita	P>0,5=1 dan 0 sebaliknya	1=Layak dapat kredit dan 0=sebaliknya	
214	WIKA	0,88045778	1	1	TRUE
215	ZBRA	0,2182735	1	0	FALSE



Lampiran 5
Hasil Pembuktian Persamaan Regresi Logistik

	Keterangan	2010
PROBABILITA CREDIT	TRUE	160
	FALSE	55
	TOTAL	215
	KETEPATAN (%)	0,744186047 74,42%

